



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SINTANG**

TAHUN 2020

**“Peningkatan Infrastruktur Dasar,
Ekonomi Kreatif, Reformasi Birokrasi
Menuju Kabupaten Sintang Yang
Berkelanjutan ”**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2019**



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 55 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, perlu disusun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2010-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor⁵);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran. Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan. : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kerwenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang merupakan penjabaran dan visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sintang, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat serta memperhatikan RPJMN.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah petunjuk umum tentang arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam penyusunan pedoman Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sintang untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2020, yang dimulai dan tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020 adalah :
 - a. sebagai pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2020;
 - b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Tujuan ditetapkannya RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020 adalah :
 - a. tersusunnya RKPD Kabupaten Sintang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat;
 - b. tersusunnya prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Sintang pada Tahun 2020 yang mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
 - c. terwujudnya sinergi antara perencanaan pembangunan Daerah dan penganggaran pembangunan Daerah Tahun 2020.

Pasal 4

Ruang Lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tentang:

- a. hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020;
- b. kerangka ekonomi Daerah Kabupaten Sintang beserta kerangka pendanaan;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020; dan
- d. rencana program dan prioritas Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020.

BAB III...

BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020 disusun untuk :

- a. bahan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. Rancangan KUA dan PPAS setiap SKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai pembicaraan pendahuluan penyusunan. APBD Tahun Anggaran 2020;
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara RKA SKPD Tahun Anggaran 2020 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020.

Pasal 6

Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berkewajiban melaksanakan RKPD ini secara konsisten, sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab .

Pasal 7

Dalam hal substansi RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020 ini tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab yang rasional dan obyektif, maka substansi RKPD tersebut wajib diprogramkan kembali dan menjadi prioritas utama pada penyusunan RKPD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam hal RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan Perubahan RKPD Tahun 2019, maka digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2019.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI SINTANG,


JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 5 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum	I - 5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I - 7
1.4. Maksud dan Tujuan	I - 9
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I - 10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II - 1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD	II - 39
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 3
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017	IV - 3
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V - 1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI - 1
6.1. Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020	VI - 1
6.2. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	VI - 1
BAB VII PENUTUP	VII - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menjalankan amanat penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah dibekali dengan pedoman perencanaan pembangunan nasional melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun kelimbelas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 dan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Tahun 2020 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Penetapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020 berorientasi pada arah pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

RKPD disusun melalui proses panjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD.

Pada tahap persiapan penyusunan RKPD, meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD.

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

- a. Perumusan rancangan awal RKPD, mencakup:
 - 1) analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - 2) analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - 3) analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - 4) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - 5) perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - 6) penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - 7) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - 8) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - 9) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - 10) perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - 11) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Hasil penyusunan rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- 1) pendahuluan;
- 2) gambaran umum kondisi Daerah.
- 3) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah.
- 4) sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.
- 5) rencana kerja dan pendanaan Daerah.
- 6) kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- 7) penutup

3. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan:

- a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan
- b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD. Pembahasan Rancangan RKPD dilaksanakan dalam rangka:

- a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
- b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
- c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
- e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD.

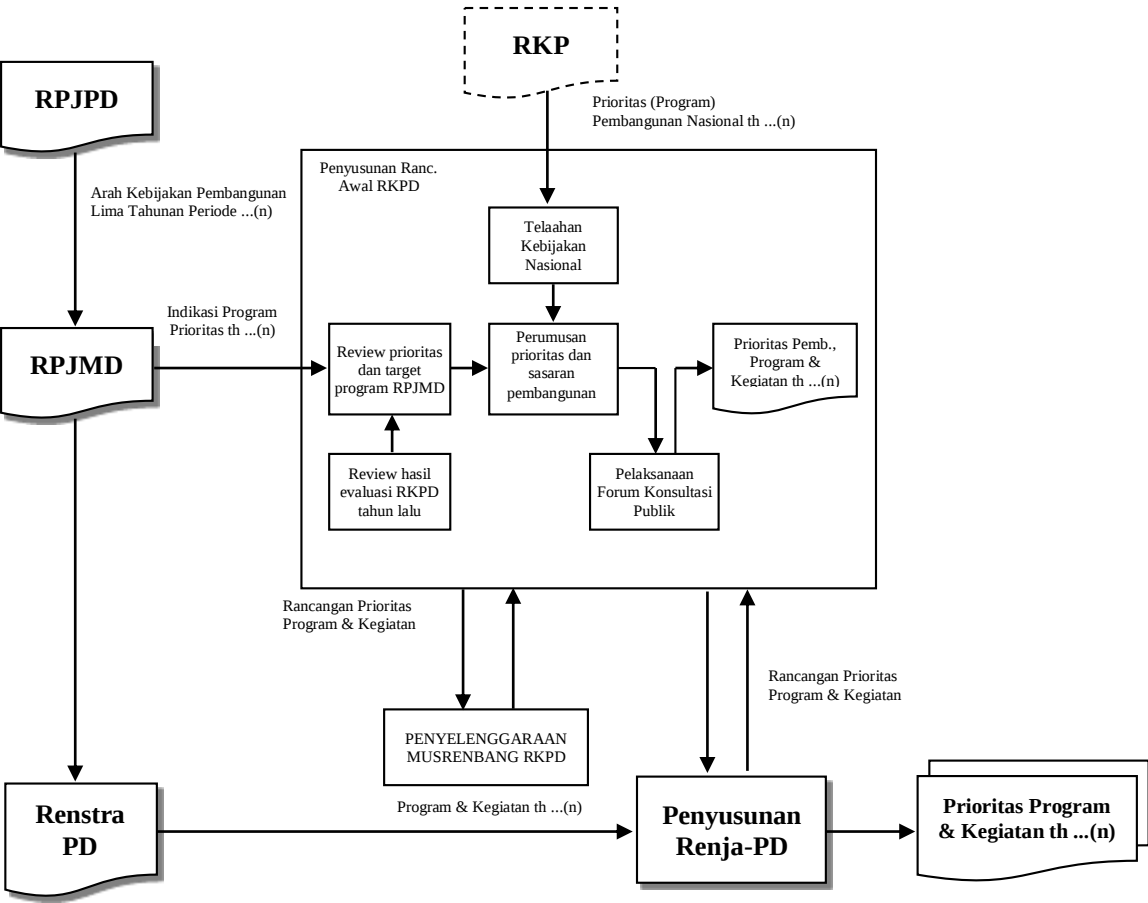
Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Murenbang RKPD yang ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD.

6. Penetapan RKPD.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi dan RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah.

RKPD yang telah ditetapkan dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten.

Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.



Gambar 1.1

Bagan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah pada Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang 2016-2036;

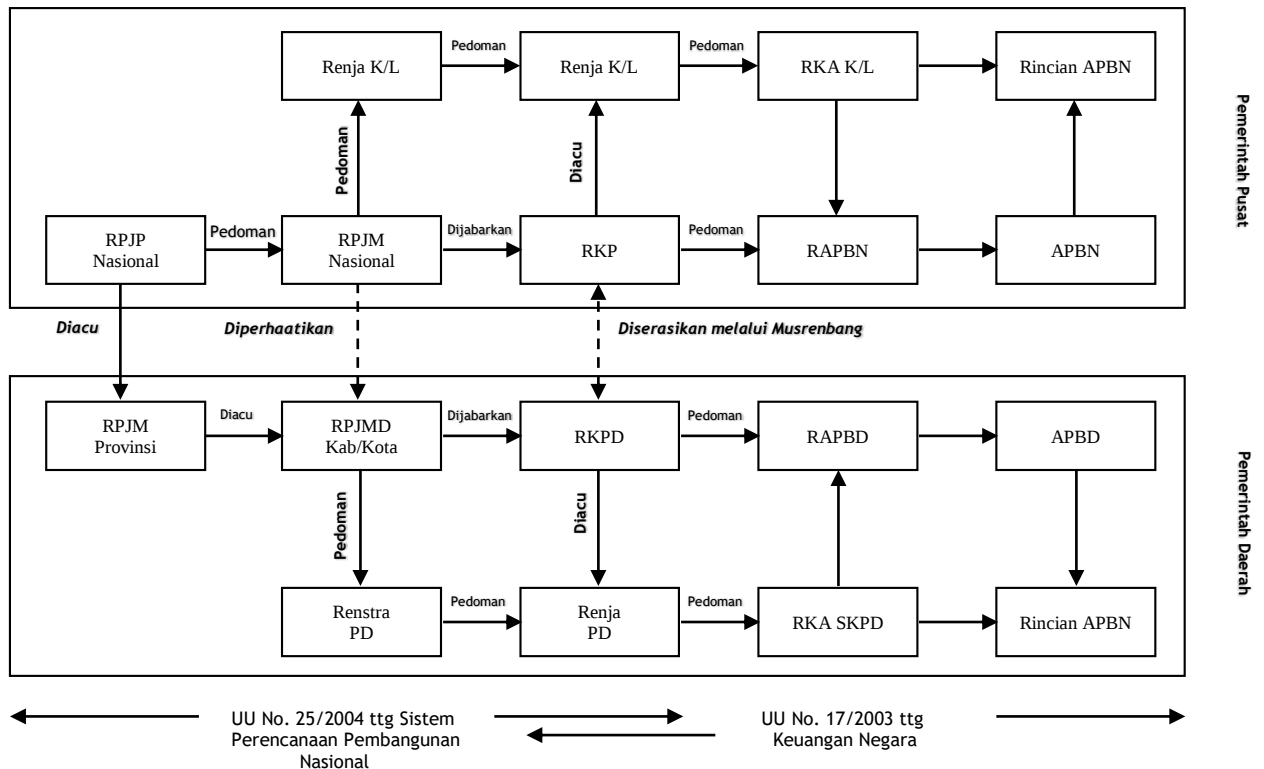
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra Perangkat Daerah, (4) RKPD dan (5) Renja Perangkat Daerah. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan

hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2. berikut :



Gambar 1.2

Hubungan Keterkaitan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

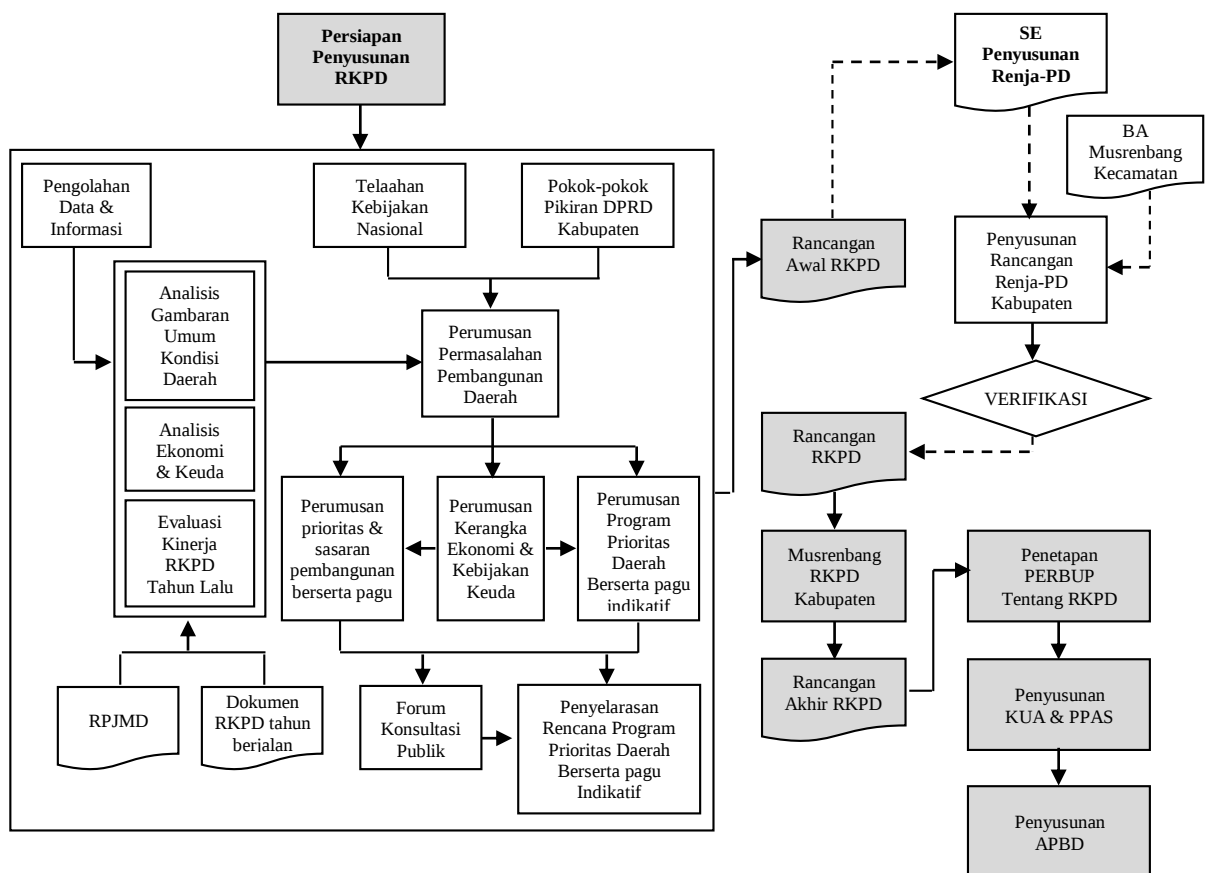
- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang;
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Organisasi Perangkat Daerah;
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020 adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Sintang dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020 adalah :

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2020;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2020;
3. Pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renja Perangkat Daerah; dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.



Gambar 1.3

Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Karakteristik Wilayah

1.1. Luas dan Batas Wilayah

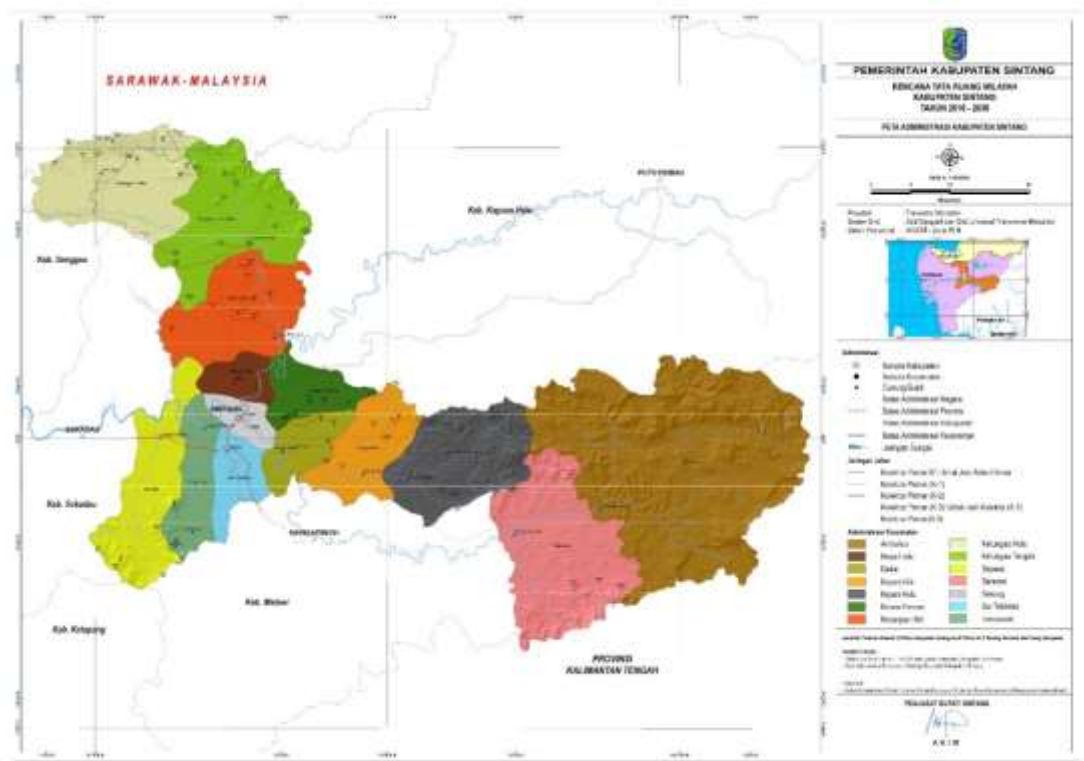
Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1°05' Lintang Utara serta 0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur serta 113°20' Bujur Timur. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Sintang dilalui oleh garis Khatulistiwa. Batas wilayah administratif Kabupaten Sintang, yaitu:

- Utara : Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak).
- Selatan : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Ketapang.
- Timur : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Barat : Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, khususnya Negara bagian Serawak. Wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia adalah Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km² dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 km² atau sebesar 29,52 persen, sedangkan Kecamatan Sintang merupakan Kecamatan yang terkecil luas wilayahnya yaitu 277,05 km² atau hanya sebesar 1,28 persen. Dari luas tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau 62,74 persen.

Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Sintang



Secara administrasi Kabupaten Sintang terbagi atas 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 391 Desa, secara rinci luas masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Desa di Kabupaten Sintang

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Area (Km ²)	Persentase (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Serawai	38	-	2.127,50	9,84
2.	Ambalau	33	-	6.386,40	29,52
3.	Kayan Hulu	31	-	937,50	4,33
4.	Sepauk	40	-	1.825,70	8,44
5.	Tempunak	26	-	1.027,00	4,75
6.	Sungai Tebelian	26	-	526,50	2,43
7.	Sintang	13	16	277,05	1,28
8.	Dedai	31	-	694,10	3,21
9.	Kayan Hilir	43	-	1.136,70	5,25
10.	Kelam Permai	17	-	523,80	2,42
11.	Binjai Hulu	11	-	307,65	1,42
12.	Ketungau Hilir	24	-	1.544,50	7,14
13.	Ketungau Tengah	29	-	2.182,40	10,09
14.	Ketungau Hulu	29	-	2.138,20	9,88
Jumlah		391	16	21.635,00	100

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

1.2. Topografi

Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 (Dua) sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta dua sungai kecil yaitu Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 persen dari luas daerah yaitu 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 persen yang terhampar hamper di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol hanya sekitar 0,05 juta hektar atau sebesar 2,08 persen.

Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata, potensi alam tersebut berupa air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 7 Kecamatan, yaitu Sepauk, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Serawai, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 gunung yang terdapat di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, yang berada di Kecamatan Serawai yaitu Gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m), sedangkan yang berada di Kecamatan Ambalau yaitu Gunung Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), Gunung Batu Baluran (tinggi 1.556 m) dan Gunung Batu Sambung (tinggi 1.770 m).

2. Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2017 oleh Badan Pusat Statistik, penduduk Kabupaten Sintang berjumlah 407.903 jiwa dengan jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki berjumlah 209.788 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 198.115 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2010-2017 tercatat rata-rata sebesar 1,61 persen. Angka ini lebih rendah jika di bandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya (2010-2016) yang besarnya rata-rata 1,64 persen per tahun.

Penyebaran penduduk Kabupaten Sintang tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Sintang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sebesar 74.778 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,34 persen selama kurun waktu 2010-2017, sedangkan yang menjadi posisi kedua yaitu Kecamatan Sepauk dengan penduduk sebanyak 51.786 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 2010-2017 sebesar 1,58 persen, yang menjadi urutan ketiga adalah Kecamatan Sungai Tebelian dengan jumlah penduduk sebesar 31.645 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,18 persen.

Tabel 2.2
Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Serawai	12.056	11.517	23.573
2.	Ambalau	6940	6.593	13.533
3.	Kayan Hulu	11.744	11.655	23.399
4.	Sepauk	26.804	24.982	51.786
5.	Tempunak	15.303	14.025	29.328
6.	Sungai Tebelian	16.437	15.208	31.645
7.	Sintang	37.866	36.912	74.778
8.	Dedai	15.338	14.460	29.798
9.	Kayan Hilir	13.592	12.567	26.159
10.	Kelam Permai	8.418	7.983	16.401
11.	Binjai Hulu	6.599	6.165	12.764
12.	Ketungau Hilir	11.530	10.799	22.329
13.	Ketungau Tengah	15.707	14.727	30.434
14.	Ketungau Hulu	11.454	10.522	21.976
Jumlah		209.788	198.115	407.903

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

Penduduk Kabupaten Sintang dengan golongan umur terbanyak adalah golongan umur dibawah lima tahun yang berjumlah 43.023 jiwa, sedangkan yang terkecil adalah golongan umur di atas 75 tahun sebesar 3.958 jiwa, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3

Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017

Golongan Umur			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
[1]			[2]	[3]	[4]
0	-	4	21.904	21.119	43.023
5	-	9	21.176	20.214	41.390
10	-	14	21.446	20.539	41.985
15	-	19	18.351	17.518	35.869
20	-	24	18.871	18.295	37.166
25	-	29	18.441	18.145	36.586
30	-	34	17.717	17.321	35.038
35	-	39	15.888	15.141	31.029
40	-	44	14.282	12.941	27.223
45	-	49	11.875	10.613	22.488
50	-	54	9.613	8.945	18.558
55	-	59	7.854	7.316	15.170
60	-	64	5.932	5.112	11.044
65	-	69	3.825	3.315	7.140
70	-	74	2.327	1.862	4.189
75	+		2.123	1.835	3.958
Jumlah			209.786	198.115	407.901

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

Kepadatan penduduk Kabupaten Sintang adalah 19 penduduk per km², kepadatan seperti tersebut maka daerah Kabupaten Sintang dikatakan mempunyai penduduk yang masih jarang. Rata-rata jumlah penduduk per desa/kelurahan sebanyak 1.002 jiwa. Jika dibandingkan dengan hasil proyeksi tahun sebelumnya rata-rata jumlah penduduk per desa/kelurahan mengalami peningkatan.

Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sintang (270 jiwa/km²) dengan rata-rata kepadatan penduduk per desa/kelurahan sebanyak 2.579 jiwa dan terendah berada di kecamatan Ambalau (2 jiwa/km²) dengan rata-rata jumlah penduduk per desa sebanyak 410 jiwa.

Tabel 2.4

Kepadatan Penduduk Kabupaten Sintang

No.	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Desa	Penduduk	Kepadatan Penduduk	
					Per Km ²	Per Desa
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Serawai	2.128	38	23.573	11	620
2.	Ambalau	6.386	33	13.533	2	410

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3.	Kayan Hulu	938	31	23.399	25	755
4.	Sepauk	1.826	40	51.786	28	1.295
5.	Tempunak	1.027	26	29.328	29	1.128
6.	Sungai Tebelian	527	26	31.645	60	1.217
7.	Sintang	277	29	74.778	270	2.579
8.	Dedai	694	31	29.798	43	961
9.	Kayan Hilir	1.137	43	26.159	23	608
10.	Kelam Permai	524	17	16.401	31	965
11.	Binjai Hulu	308	11	12.764	41	1.160
12.	Ketungau Hilir	1.545	24	22.329	14	930
13.	Ketungau Tengah	2.182	29	30.434	14	1.049
14.	Ketungau Hulu	2.138	29	21.976	10	758
Jumlah		21.635	407	407.903	19	1.002

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pencapaian indikator kinerja pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Sintang dijelaskan melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.5

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Pertumbuhan PDRB (%)	5,28	8,24	
2.	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	27,89	30,12	
3.	Laju Inflasi (%)	5,2	5,42	
4.	Pengeluaran Per Kapita (Rp. 000)	8.302		
5.	Indeks Pembangunan Manusia	64,78	65,16	66,07
6.	Indeks Gini	0,29	0,302	0,263
7.	Angka Kemiskinan (%)	10,07	10,20	10,35
8.	Angka Pengangguran (%)	2,25	1,93	2,34

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2017

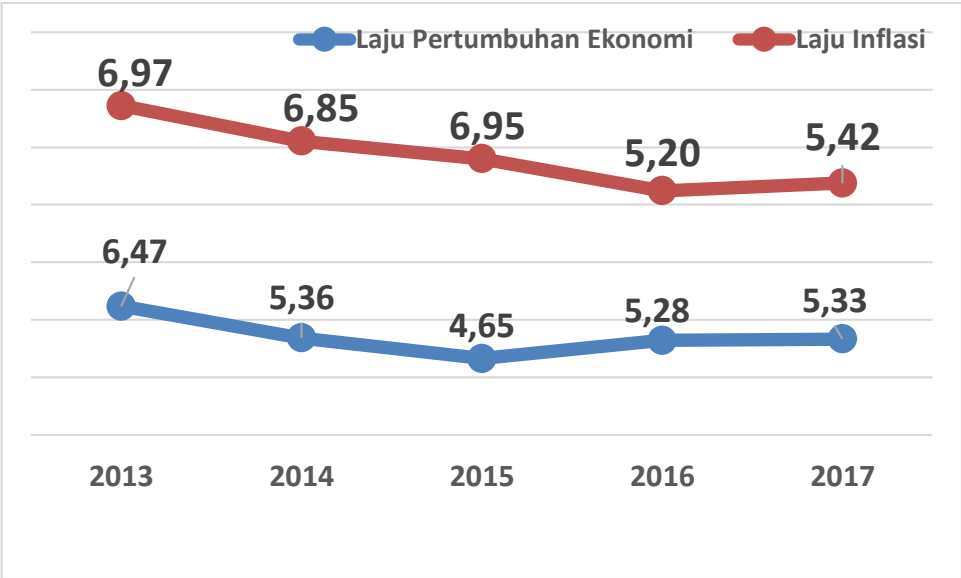
a. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi

Memasuki tahun 2017, PDRB Kabupaten Sintang atas dasar harga berlaku mencapai 12,29 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 9,77 persen. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 meningkat menjadi 8,68 triliun rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensian yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.2

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi 2013-2017



b. Struktur Ekonomi

Pada tahun 2017 struktur perekonomian Kabupaten Sintang didominasi oleh tiga kategori ekonomi yaitu kategori pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 22,21 persen, kategori perdagangan yang memberikan kontribusi sebesar 17,43 persen dan kategori konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 15,04 persen. Sementara sektor yang paling kecil sumbanganya yaitu pengadaan listrik dan gas sebesar 0,02 persen.

Tabel 2.6

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Di Kabupaten Sintang Tahun 2015-2017

No.	Lapangan Usaha	2015	2016*	2017**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,36	23,49	22,21
2.	Pertambangan dan Penggalian	8,48	8,59	8,96
3.	Industri Pengolahan	9,66	9,25	9,10

No.	Lapangan Usaha	2015	2016*	2017**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05
6.	Konstruksi	13,06	13,90	15,04
7.	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,74	17,67	17,43
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,06	2,10	2,07
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,39	2,41	2,42
10.	Informasi dan Komunikasi	4,58	4,76	5,01
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,33	2,46	2,57
12.	Real Estat	2,85	2,86	2,85
13.	Jasa Perusahaan	0,44	0,44	0,43
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,86	4,00	4,16
15.	Jasa Pendidikan	4,97	4,92	4,70
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,42	2,35	2,25
17.	Jasa Lainnya	0,74	0,73	0,72
PDRB		100	100	100

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

c. PDRB Per Kapita

Untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB per kapita, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2016 PDRB per kapita Kabupaten Sintang adalah sebesar Rp. 27,89 juta yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten Sintang selama setahun adalah sebesar Rp. 27,89 juta atau sebesar 2,3 juta per bulan.

Untuk lebih meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan. Karena pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama sekali terhadap perkembangan pendapatan regional.

Tabel 2.7

Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (persen)
Kabupaten Sintang Tahun 2015 – 2017

No.	Lapangan Usaha	2015	2016*	2017**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.277,95	6.540,87	6.693,92
2.	Pertambangan dan Penggalan	2.185,28	2.391,31	2.701,11
3.	Industri Pengolahan	2.490,37	2.576,23	2.742,49

No.	Lapangan Usaha	2015	2016*	2017**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,21	5,50	
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,79	14,13	
6.	Konstruksi	3.367	3.871	
7.	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.572	4.934	
8.	Transportasi dan Pergudangan	529,9	584,8	
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	617,107	672,06	729,56
10.	Informasi dan Komunikasi	1.179,23	1,326,14	1.511,48
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	599,77	684,09	775,64
12.	Real Estat	734,288	796,04	858,58
13.	Jasa Perusahaan	114,196	122,44	130,93
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	994,014	1,115,15	1.255,47
15.	Jasa Pendidikan	1.281,240	1,370,51	1.415,87
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	622,539	653,18	679,13
17.	Jasa Lainnya	192,003	203,79	218,03
PDRB		25.775,02	27.848,61	30.144,32

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

*) Angka Sementara

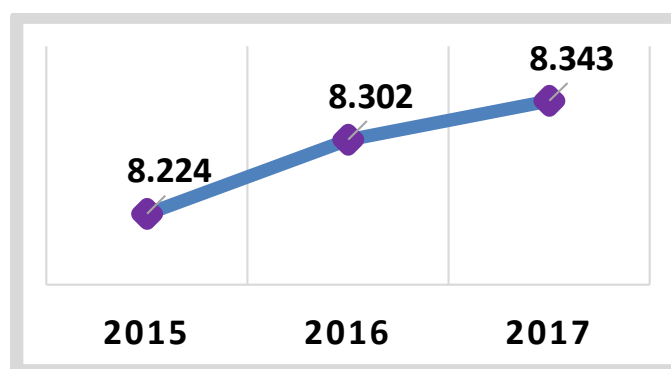
**) Angka Sangat Sementara

d. Pengeluaran Per Kapita

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Maret 2017, penduduk Kabupaten Sintang sebanyak 22,68 persen berada pada kelompok pengeluaran dibawah 500 ribu rupiah, 35,87 persen berada pada kelompok 500 ribu rupiah sampai dengan 749 ribu rupiah, kemudian dilanjutkan dengan penduduk yang berpendapatan antar 749 ribu rupiah sampai dengan 999 ribu rupiah sebanyak 18,32 persen dan sebanyak 32,14 persen penduduk yang memiliki pendapatan di atas 1 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Sintang masih memiliki pendapatan yang rendah. Rata-rata pengeluaran Per Kapita untuk makanan sebulan di Kabupaten Sintang sebesar Rp. 464.420,00.

Gambar 2.3

Pengeluaran Per Kapita Di Kabupaten Sintang Tahun 2015-2017



Tabel 2.8

Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat
Tahun 2015-2017

NO	KABUPATEN/KOTA	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rp)		
		2015	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Sambas	9.195,00	9.311,00	9.403,00
2.	Bengkayang	8.489,00	8.588,00	8.640,00
3.	Landak	6.670,00	6.737,00	6.931,00
4.	Pontianak	7.238,00	7.270,00	7.358,00
5.	Sanggau	7.622,00	7.729,00	7.828,00
6.	Ketapang	8.350,00	8.430,00	8.475,00
7.	Sintang	8.224,00	8.302,00	8.343,00
8.	Kapuas Hulu	6.640,00	6.691,00	6.883,00
9.	Sekadau	6.795,00	6.820,00	7.001,00
10.	Melawi	7.841,00	7.858,00	8.922,00
11.	Kayong Utara	6.950,00	7.030,00	7.434,00
12.	Kubu Raya	7.993,00	8.145,00	8.430,00
13.	Kota Pontianak	13.737,00	13.838,00	13.903,00
14.	Kota Singkawang	10.982,00	11.006,00	11.122,00
KALIMANTAN BARAT		8.279,00	8.348,00	8.472,00

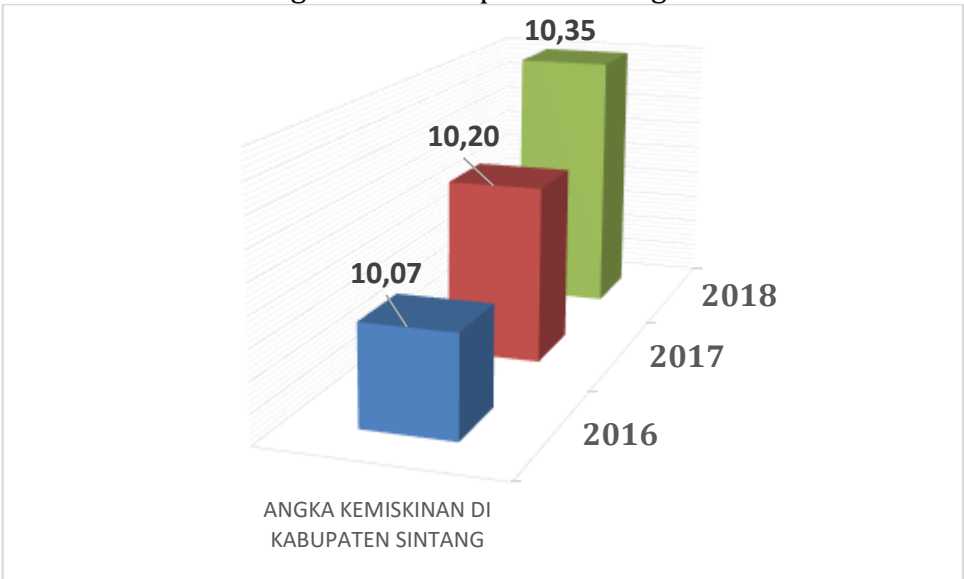
Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2018

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Gambar 2.4

Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Sintang Tahun 2015-2017



Tabel 2.9

IPM Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2015-2017
(Metode Baru)

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN		
		2015	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Sambas	64,14	64,94	65,92
2.	Bengkayang	64,65	65,45	65,99
3.	Landak	64,12	64,58	64,93
4.	Pontianak	63,37	63,84	64,00
5.	Sanggau	63,05	63,90	64,61
6.	Ketapang	64,03	64,74	65,71
7.	Sintang	64,18	64,78	65,16
8.	Kapuas Hulu	63,73	63,83	64,18
9.	Sekadau	62,34	62,52	63,04
10.	Melawi	63,78	64,25	64,43
11.	Kayong Utara	60,09	60,87	61,52
12.	Kubu Raya	65,02	65,54	66,31
13.	Kota Pontianak	77,52	77,63	77,93
14.	Kota Singkawang	70,03	70,10	70,25
KALIMANTAN BARAT		65,59	65,88	66,26
INDONESIA		69,55	70,18	70,81

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2018

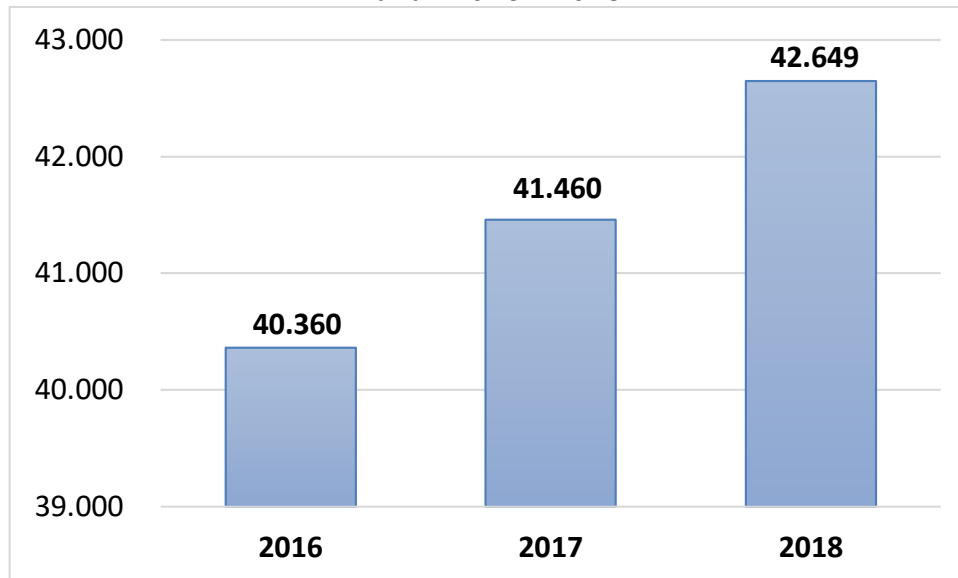
f. Angka Kemiskinan

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Perbedaannya terletak pada standar penilainnya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar yang ditentukan secara subyektif oleh masyarakat setempat. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan baik makanan maupun non makanan atau yang disebut sebagai garis kemiskinan. Sehingga penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Gambar 2.5

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sintang
Tahun 2016 – 2018

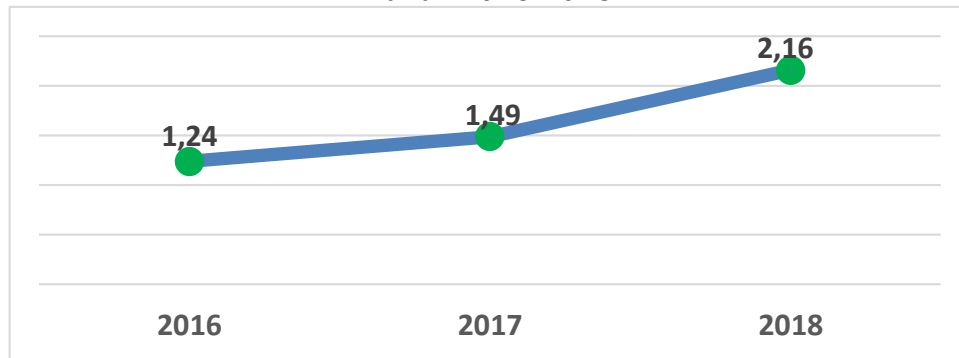


Garis kemiskinan Kabupaten Sintang pada tahun 2018 sebesar Rp. 551.704,00 perkapita/bulan. Jumlah ini meningkat Rp. 74.100,00 dibandingkan dengan garis kemiskinan pada tahun 2017 yang sebesar Rp. 477.604,00 perkapita/bulan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sintang menunjukkan angka yang semakin tinggi. Pada tahun 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sintang mencapai angka 2,16 meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,49. Indeks Kedalaman Kemiskinan yang semakin besar menunjukkan semakin jauhnya rata-rata pengeluaran penduduk miskin perkapita/bulan dari garis kemiskinan. Angka garis kemiskinan yang besar juga dapat menunjukkan rendahnya daya beli masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya.

Gambar 2.6

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Sintang
Tahun 2016-2018

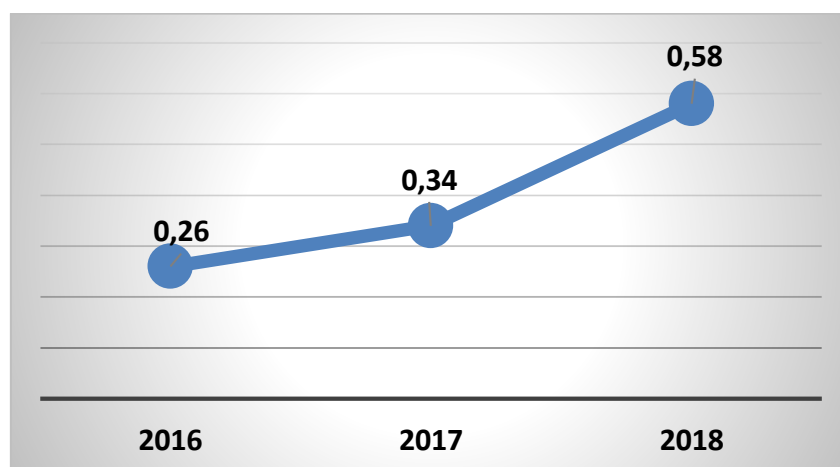


Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sintang Tahun 2018 adalah sebesar 0,58 sedangkan pada tahun 2017 adalah sebesar 0,34. Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Sintang masih relatif merata.

Indeks Keparahan Kemiskinan dapat menunjukkan kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Nilai yang semakin kecil dapat menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin relatif merata. Sebaliknya, nilai yang semakin besar menunjukkan bahwa pengeluaran antar penduduk miskin tidak merata, ada yang pengeluarannya sangat kecil dan ada pula yang pengeluarannya sangat besar namun di bawah garis kemiskinan.

Gambar 2.7

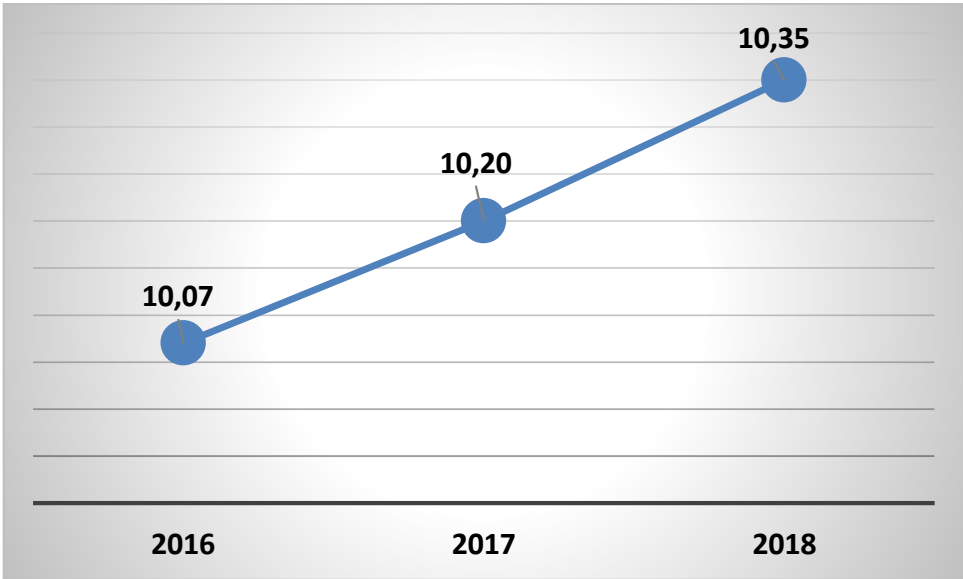
Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Sintang
Tahun 2016-2018



Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Sintang tahun 2018 sebesar 10,35 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Sintang dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang penduduk miskinnya adalah sebesar 10,20 persen.

Gambar 2.8

Angka Kemiskinan di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2018



Persentase angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Melawi sebesar 12,83%, sedangkan yang terendah yaitu Kabupaten Sanggau sebesar 4,67%.

Tabel 2.10

Angka Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat Tahun 2016-2018

NO	LOKASI	ANGKA KEMISKINAN (%)		
		2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Sambas	8,54	8,59	8,55
2.	Bengkayang	7,46	7,51	7,17
3.	Landak	12,32	12,23	11,77
4.	Mempawah	5,75	5,94	5,61
5.	Sanggau	4,51	4,52	4,67
6.	Ketapang	10,99	11,02	10,93
7.	Sintang	10,07	10,20	10,35
8.	Kapuas Hulu	9,82	9,45	9,6
9.	Sekadau	6,14	6,46	6,17
10.	Melawi	12,63	12,54	12,83
11.	Kayong Utara	10,19	9,89	10,08
12.	Kubu Raya	5,04	5,26	5,07

NO	LOKASI	ANGKA KEMISKINAN (%)		
		2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
13.	Kota Pontianak	5,55	5,31	5
14.	Kota Singkawang	5,33	5,42	5,12
KALIMANTAN BARAT		8,00	7,88	7,77
INDONESIA		10,70	10,12	9,82

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2018

Tabel 2.11

Tabel Kemiskinan Kabupaten/Kota
Di Kalimantan Barat Tahun 2018

NO	LOKASI	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P1)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Sambas	45,482	8,55	1,02	0,21	407.346
2.	Bengkayang	17.939	7,17	0,69	0,11	339.891
3.	Landak	43.732	11,77	1,82	0,46	351.942
4.	Mempawah	14.609	5,61	0,86	0,25	337.350
5.	Sanggau	21.592	4,67	0,51	0,09	312.909
6.	Ketapang	54.862	10,93	2,00	0,64	432.354
7.	Sintang	42.646	10,35	2,16	0,58	551.704
8.	Kapuas Hulu	24.760	9,60	1,34	0,29	430.652
9.	Sekadau	12.293	6,17	0,53	0,08	313.930
10.	Melawi	26.244	12,83	2,00	0,50	509.138
11.	Kayong Utara	11.130	10,08	1,47	0,32	287.078
12.	Kubu Raya	28.860	5,07	0,63	0,14	377.302
13.	Kota Pontianak	31.761	5,00	0,62	0,14	483.618
14.	Kota Singkawang	11.168	5,12	0,70	0,18	464.673
KALIMANTAN BARAT		387.077	7,77	1,18	0,28	409.287

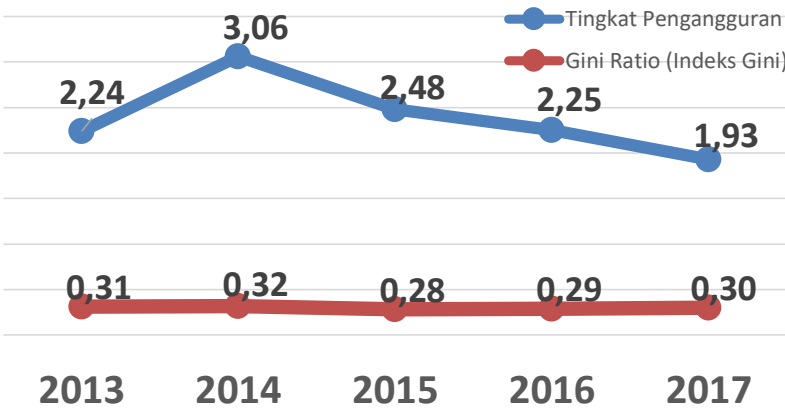
Sumber : Pengolahan Susenas, 2018

g. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kabupaten Sintang pada tahun 2017 tingkat pengangguran sebesar 1,93 persen dan gini ratio sebesar 0,30%, sedangkan tingkat pengangguran terbesar di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kota Pontianak sebesar 9,36% sedangkan yang terendah yaitu Kabupaten Sekadau sebesar 0,64%.

Gambar 2.9

Grafik Tingkat Pengangguran dan Gini Ratio
Kabupaten Sintang 2013-2017



Tabel 2.12

Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2015 - 2017

NO	LOKASI	ANGKA PENGANGGURAN (%)		
		2015	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Sambas	4,85		4,24
2.	Bengkayang	3,15		2,40
3.	Landak	5,81		2,03
4.	Mempawah	7,12		6,72
5.	Sanggau	5,13		3,27
6.	Ketapang	4,29		3,97
7.	Sintang	2,48	2,25	1,93
8.	Kapuas Hulu	3,00		2,21
9.	Sekadau	2,97		0,64
10.	Melawi	3,03		2,11
11.	Kayong Utara	3,76		5,00
12.	Kubu Raya	6,11		5,91
13.	Kota Pontianak	9,44		9,36
14.	Kota Singkawang	6,12		8,08
KALIMANTAN BARAT		5,15		4,36
INDONESIA		6,18		5,50

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2018

2) Fokus Kesejahteraan Sosial

Gambaran kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan Sosial

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Angka rata-rata lama sekolah	6,83	7,03	7,23
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	122,37	118,87	122,38
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	101,36	104,45	106,64
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	96,89	99,96	98,60
6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	75,93	88,96	74,12
8.	Angka usia harapan hidup	71,08	71,11	
9.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup		151	151
10.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	30,00	11,92	12,22
11.	Prevalensi Balita gizi buruk	2,96	3,28	4,90
12.	Rasio penduduk bekerja dengan angkatan kerja	6,71		

a. Pendidikan

Perkembangan fokus kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan pada pada tahun 2018 meliputi indikator Angka melek huruf, Angka rata-rata lama belajar/sekolah, Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI, Angka partisipasi kasar SMP/MTs, Angka Pendidikan yang ditamatkan, Angka partisipasi murni (APM) SD/MI dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.

Indikator bidang pendidikan yang melebihi target RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 untuk tahun 2018 terdapat 3 (tiga) indikator yaitu indikator Angka rata-rata lama sekolah yang ditargetkan sebesar 7,23 realisasi mencapai 7,23, Indikator APK SMP/MTs yang ditargetkan sebesar 101,38 realisasi sudah mencapai 106,64 dan Indikator APM SD/MI yang ditargetkan sebesar 98,09 realisasi sudah mencapai 98,60. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14

Indikator Kinerja Bidang Pendidikan
Tahun 2016-2018

No	Indikator	Tahun		
		2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Angka Melek Huruf	89,28	90,19	91,11
2.	Angka rata-rata lama sekolah	6,83	7,03	7,23
3.	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	122,37	118,87	122,38
4.	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	101,36	104,45	106,64
5.	Angka pendidikan yang ditamatkan	5,20	6,36	6,39
6.	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI	96,89	99,96	98,60
7.	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs	75,93	88,96	74,12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang

b. Kesehatan

Indikator kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat pada bidang kesehatan meliputi Angka kelangsungan hidup bayi, Angka usia harapan hidup dan Persentase balita gizi buruk.

Angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2018 sebesar 12,22 persen lebih tinggi dibandingkan dari target RPJM Kabupaten Sintang yaitu sebesar 28,00. Angka usia harapan hidup pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 71,55 tahun, sedangkan realisasi baru mencapai 70,95 tahun. Indikator Persentase balita gizi buruk 4,90 persen lebih tinggi dibandingkan dari target yaitu 2,50 persen.

c. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi nasional dan khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sector ekonomi dan sector ketenagakerjaan pada kelompok penduduk yang tergolong miskin, sehingga kelompok tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraannya.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka jumlah penduduk usia kerja (PUK) pada tahun 2017 tercatat 397.606 jiwa. Selanjutnya untuk jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terjadi peningkatan dari 255 jiwa pada tahun 2016 menjadi 921 jiwa pada tahun 2017.

Tabel 2.15

Penduduk Yang Mencari Pekerjaan Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2017

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Tidak Sekolah	-	-	-
2.	SD	14	10	24
3.	SMTP	23	11	34
4.	SMTA	421	192	613
5.	D I / D II / D III	20	23	43
6.	D IV / S 1	100	99	199
7.	S 2	5	3	8
Jumlah		583	338	921

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

1) Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Indikator kinerja pada aspek pelayanan umum bidang pendidikan dapat digambarkan tabel berikut.

Tabel 2.16

Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Pendidikan

No	Indikator	Tahun		
		2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Pendidikan Dasar			
1.	Angka partisipasi sekolah	97,65	97,95	98,25
2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	0,13	0,13	0,13
3.	Rasio guru/murid	1 : 29	1 : 29	
4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	0,022	0,022	0,017
5.	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	233.014	234.218	235,414
	Fasilitas Pendidikan			
6.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	24,71	35,77	66,34
7.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bngunan baik	31,90	41,52	80,31
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
8.	Angka pendidikan anak usia dini (PAUD)	54,75	50,97	68,40
	Angka Putus Sekolah			
9.	Angka putus sekolah (APS) SD/MI	0,04	0,68	0,17

No	Indikator	Tahun		
		2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
10.	Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	0,08	0,09	0,56
11.	Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,19	0,18	
	Angka Kelulusan (AL)			
12.	Angka kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00
13.	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00	100,00
14.	Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,23	100	
15.	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	90,93	92,35	89,71
16.	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SM	79,01	96,08	89,81
17.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	84,35	85,20	87,75
	Kebudayaan			
18.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2
19.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2
20.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	15	15	15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang

Angka putus sekolah pada tahun 2018 untuk tingkat pendidikan SD/MI menunjukkan penurunan, sementara SMP/MTs menunjukkan peningkatan di bandingkan tahun 2017. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMA/SMK/MA mengalami penurunan angka putus sekolah dari 0,19 persen tahun 2016 menjadi 0,18 persen pada tahun 2017.

Angka kelulusan sekolah pada tahun 2018 tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mencapai realisasi 100 persen, sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Sintang.

Jumlah sekolah di Kabupaten Sintang, dan jumlah murid menurut tingkat pendidikan serta jumlah ruang kelas menurut kondisi tahun 2016/2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17

Banyaknya Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2017/2018

NO	JENJANG	BANYAKNYA SEKOLAH	
		SWASTA	NEGERI
1.	TK	178	2
2.	SD/MI	19	413
3.	SLTP	14	95
4.	SLTA	11	23

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang

Tabel 2.18

Banyaknya Murid Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2017/2018

NO	JENJANG	BANYAKNYA SEKOLAH	
		SWASTA	NEGERI
1.	TK	185	4.647
2.	SD/MI	3.176	55.179
3.	SLTP	2.934	20.388
4.	SLTA	4.016	11.822

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang

Tabel 2.19

Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi
Tahun 2017/2018

NO	JENJANG	KONDISI RUANG KELAS			JUMLAH
		B	RR	RB	
1.	SD	447	1.585	355	2.387
2.	SMP	241	485	50	776
3.	SMA	169	266	31	466
4.	SMK	48	118	-	166

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang

b. Kesehatan

Kondisi aspek pelayanan umum di bidang kesehatan yaag dijabarkan dalam indikator umur harap hidup, angka kematian bayi, stunting, gizi buruk dan kurang pada balita dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20

Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib
Bidang Kesehatan Tahun 2016 - 2018

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]		
1.	Umur harapan hidup	Tahun	70,95	69,99	71,11
2.	Angka kematian ibu	/00.000 kh	-	151	151
3.	Angka kematian bayi	/000 kh	30,00	11,92	12,92
4.	Angka kematian balita	/000 kh	-	13,13	13,45
5.	Prevalensi balita yang pendek (stunting)	%	27,91	22,62	28,58
6.	Prevalensi gizi kurang pada balita	%	21,66	15,39	15,99
7.	Prevalensi gizi buruk pada balita	%	2,96	3,28	4,9

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]		
8.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	52,86	-	-
9.	Cakupan yankes rujukan masyarakat miskin	%	16,64	52,91	62,63
10.	Persentase puskesmas rawat inap mampu PONED	%	16,67	-	-
11.	Persentase RS kab/kota mampu PONEK	%	100	100	100
12.	Angka kesakitan TB-paru per 100.000 penduduk	/00.000 pddk	113,8	-	78,94
13.	Persentase kesembuhan TB-paru	%	89,38	-	95,54
14.	Angka kesakitan Malaria per 1.000 penduduk	/000 pddk	0,37	0,33	0,04
15.	Angka kesakitan DED per 100.000 penduduk	/00.000 pddk	29,52	-	74,52
16.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	%	0,01	-	0,01
17.	Persentase desa UCI	%	79,12	83,05	84,77
18.	Persentase RT dengan akses air minum yang layak	%	46,32	31	31,3
19.	Persentase RT dengan akses sanitasi yang layak	%	47,30	37,35	42,04
20.	Rasio dokter per 100.000 penduduk	%	11,94	12,90	13,64
21.	Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk	%	170,94	203,92	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sintang

c. Sosial

Kondisi aspek pelayanan umum bidang sosial yang meliputi fakir miskin, wanita tuna susila, penyandang cacat dan jompo terlantar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21

Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib
Bidang Sosial

No	Indikator	2016	2017
[1]	[2]	[4]	[5]
1.	Fakir Miskin (KK)	17.851	23.222
2.	Wanita Tuna Susila	231	-
3.	Penyandang Cacat Tubuh	322	257
4.	Penyandang Cacat Mental	43	39
5.	Penyandang Cacat Ganda	7	0
6.	Jompo Terlantar	50	-

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi jumlah rumah tak layak huni, persentase pengguna air bersih, sanitasi dan penduduk berakses air minum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22

Kondisi Perumahan Permukiman Kabupaten Sintang
Tahun 2016-2018

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
1.	Rumah tak layak huni	Unit	3.990	6.941	9.773
2.	Rumah tangga pengguna air bersih perpipaan	%	6,68	9,08	8.67
3.	Rumah tangga bersanitasi	%		60,20	62,57
4.	Persentase penduduk berakses air minum	%		22,75	25,66

e. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan jalan yang dilaksanakan memperhatikan keserasian dengan perkembangan transportasi jalan raya, terutama keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung jalan, jaringan jalan di pusat pertumbuhan, pusat produksi dan yang menggabungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran. Di samping itu juga dilakukan pembangunan jalan yang membuka daerah terpencil dan mendukung pengembangan pemukiman terutama pemukiman transmigrasi.

Pada tahun 2017 panjang jalan di wilayah Kabupaten Sintang sepanjang 2.289,62 kilometer, di mana permukaan jalan 39,5 persen jalan beraspal, 8,73 persen jalan kerikil, 49,39 persen jalan tanah dan 2,38 persen lainnya. Ditinjau dari kondisinya 34,6 persen baik, 17,6 persen sedang, 9,29 persen rusak dan 38,51 persen rusak berat.

Tabel 2.23

Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Tahun 2016-2017

No	Kondisi Jalan	Tahun 2016	Tahun 2017
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Baik	886,29	792,19
2.	Sedang	1.288,91	403,00
3.	Rusak	1.102,19	212,81

No	Kondisi Jalan	Tahun 2016	Tahun 2017
[1]	[2]	[3]	[4]
4.	Rusak Berat	1.411,16	881,62
Jumlah		4.688,55	2.289,62

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

f. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Secara umum tindak kriminal yang terjadi dalam masyarakat kabupaten sintang pada tahun 2016 yang terbanyak adalah kasus curat yaitu sebanyak 23 kasus dan diikuti oleh penganiiaan biasa, curanmor dan perjudian.

Tabel 2.24

Jumlah Tindak Pidana Menonjol menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2015-2017

No	Jenis Tindak Pidana	2015	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Pencurian dengan pemberatan	29	23	26
2.	Pencurian kendaraan bermotor	23	22	19
3.	Pencurian dengan kekerasan	22	8	2
4.	Penganiayaan berat	-	23	24
5.	Kebakaran	14	2	5
6.	Pembunuhan			1
7.	Pemeriksaan	1		
8.	Narkotika	12	32	21
9.	Perjudian	9	20	13

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

2) Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Kabupaten Sintang akan menghadapi tantangan di sektor ketengakerjaan diantaranya adalah:

1. Masalah kualifikasi dan kompetensi angkatan kerja. Hal ini berdampak pada kemampuan daya saing dalam memperoleh kesempatan kerja baik di dalam kabupaten maupun di luar kabupaten.
2. Terlaksananya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015, yang berarti akan terjadi perpindahan manusia untuk bekerja dari suatu Negara ke Negara lain akan terbuka lebar. Ini merupakan tantangan apabila tidak siap, tetapi akan menjadi kesempatan emas

bagi tenaga kerja yang kompeten untuk berkompetisi dengan tenaga kerja dari Negara lain.

3. Bonus Demografi yang terjadi Kabupaten Sintang pada tahun 2016-2021, dimana jumlah penduduk Kabupaten Sintang akan didominasi oleh penduduk usia produktif.

Selain itu dari segi sumber daya manusia, Kabupaten Sintang masih memiliki beberapa masalah. Adapun persoalan mendasar yang dihadapi penduduk usia kerja Kabupaten Sintang, yaitu:

1. Kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai lapangan pekerjaan di Kabupaten Sintang.
2. Rendahnya jumlah wirausahawan baru untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja.
3. Pekerja Kabupaten Sintang di dominasi oleh pekerja dengan pendidikan rendah sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi rendah.
4. Meningkatnya jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik, akibat ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
5. Sektor informal mendominasi lapangan pekerjaan, dimana sektor ini belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah.

Untuk meningkatkan daya saing dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sintang, baik sektor formal maupun informal, pemerintah menerapkan tiga strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM angkatan kerja melalui pengembangan kompetensi (*skill, knowledge, attitude*) pada Balai-balai latihan kerja (BLK) yang tersedia untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi, serta percepatan sertifikasi, kompetensi.
2. Pemberdayaan penganggur dan setengah penganggur melalui pelatihan dan penerapan program perluasan kesempatan kerja sektor informal, seperti padat karya, terapan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri serta pendampingan usaha.
3. Pengembangan program kewirausahaan, khususnya yang ditujukan kepada kaum muda melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang tersedia serta didukung pula oleh fasilitas pelatihan, permodalan, promosi serta pengembangan manajemen usaha melalui inkubasi bisnis.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di ukur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25

Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2018

No	Indikator	2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Persentase perempuan di lembaga pemerintah.	2.585	2.582	98,86
2.	Persentase Rasio KDRT	19	32	48
3.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur			
4.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	19	32	48
5.	Jumlah Pasangan usia subur			
6.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,82	2,77	
7.	Persentase akseptor KB	75,63	76,51	78,77
8.	Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1	42.957	42.957	42.957

c. Pangan

Produksi sektor pertanian terutama sub sektor tanaman bahan makanan perlu terus dipacu dengan tujuan untuk memantapkan swasembada pangan dan penganekaragaman jenis bahan makanan. Sub sektor tanaman pangan terdiri dari padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Padi sebagai penghasil beras merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk, oleh sebab itu padi merupakan komoditi strategis dalam konteks pembangunan terutama pembangunan sektor pertanian.

Tabel 2.26

Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Padi Sawah
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kuintal/Ha)	Produksi (Ton)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Serawai	174	21	372
2.	Ambalau	225	21	480
3.	Kayan Hulu	346	16	544
4.	Sepauk	2.491	36	9.019
5.	Tempunak	1.374	42	5.739
6.	Sungai Tebelian	645	35	2.275
7.	Sintang	213	24	508
8.	Dedai	1.567	19	3.032
9.	Kayan Hilir	1.475	30	4.389
10.	Kelam Permai	1.587	35	5.583
11.	Binjai Hulu	283	22	611
12.	Ketungau Hilir	1.015	25	2.564
13.	Ketungau Tengah	493	54	2.640
14.	Ketungau Hulu	524	17	909
Jumlah		12.412	31	38.665

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

Pada tahun 2016 produksi padi di Kabupaten Sintang sebesar 74.398 ton dengan luas panen sebesar 35.335 Ha dan rata-rata produksi sebesar 21,06 kuintal/Ha. Produksi padi terbesar yaitu padi sawah sebesar 38.665 ton dengan luas panen sebesar 12.412 Ha dan rata-rata produksi sebesar 31 kuintal/Ha. Sedangkan sisanya adalah padi ladang dengan produksi sebesar 35.733 ton dengan luas panen sebesar 22.923 Ha dan rata-rata produksi sebesar 15,59 kuintal/Ha.

Tabel 2.27

Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Padi Ladang
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kuintal/Ha)	Produksi (Ton)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Serawai	2.578	8,04	2.072
2.	Ambalau	2.000	12,01	2.401
3.	Kayan Hulu	1.825	17,31	3.159
4.	Sepauk	760	19,22	1.461
5.	Tempunak	815	14,81	1.207
6.	Sungai Tebelian	904	20,94	1.893

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kuintal/Ha)	Produksi (Ton)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
7.	Sintang	160	20,56	329
8.	Dedai	2.449	10,45	2.560
9.	Kayan Hilir	2.303	16,29	3.751
10.	Kelam Permai	1.464	20,12	2.945
11.	Binjai Hulu	425	20,16	857
12.	Ketungau Hilir	1.120	18,33	2.053
13.	Ketungau Tengah	5.375	17,47	9.391
14.	Ketungau Hulu	745	22,20	1.654
Jumlah		22.923	15,59	35.733

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

Tanaman palawija yang mempunyai jumlah produksi terbesar pada tahun 2016 di Kabupaten Sintang adalah ubi kayu sebesar 14.313 ton, jagung sebesar 2.855 ton, ubi jalar 1.815 ton, kacang tanah 204 ton, kedelai 30 ton, kacang hijau sebesar 2 ton.

Tabel 2.28

Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Jagung
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kuintal/Ha)	Produksi (Ton)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Serawai	64	105	672
2.	Ambalau	90	18	160
3.	Kayan Hulu	232	2	42
4.	Sepauk	127	29	369
5.	Tempunak	157	12	185
6.	Sungai Tebelian	64	29	186
7.	Sintang	48	29	137
8.	Dedai	64	13	81
9.	Kayan Hilir	135	8	103
10.	Kelam Permai	59	12	68
11.	Binjai Hulu	74	31	226
12.	Ketungau Hilir	63	8	48
13.	Ketungau Tengah	58	82	477
14.	Ketungau Hulu	21	48	101
Jumlah		1.256	23	2.855

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

Tabel 2.29

Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Ubi Kayu
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kuintal/Ha)	Produksi (Ton)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Serawai	33	371	1.223
2.	Ambalau	53	259	1.372
3.	Kayan Hulu	32	212	677
4.	Sepauk	53	376	1.994
5.	Tempunak	27	288	778
6.	Sungai Tebelian	20	306	612
7.	Sintang	31	171	529
8.	Dedai	25	127	317
9.	Kayan Hilir	40	269	1.075
10.	Kelam Permai	28	334	934
11.	Binjai Hulu	44	293	1.291
12.	Ketungau Hilir	46	329	1.514
13.	Ketungau Tengah	22	709	1.560
14.	Ketungau Hulu	10	437	437
Jumlah		464	308	14.313

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

Tabel 2.30

Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Ubi Jalar
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kuintal/Ha)	Produksi (Ton)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Serawai	6	182	109
2.	Ambalau	6	130	78
3.	Kayan Hulu	12	82	98
4.	Sepauk	18	204	367
5.	Tempunak	4	455	182
6.	Sungai Tebelian	8	188	150
7.	Sintang	7	144	101
8.	Dedai	11	45	50
9.	Kayan Hilir	-	-	-
10.	Kelam Permai	8	100	80
11.	Binjai Hulu	12	149	179
12.	Ketungau Hilir	7	226	158
13.	Ketungau Tengah	12	219	263
14.	Ketungau Hulu	-	-	-
Jumlah		111	164	1.815

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

Tabel 2.31

Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Kacang Tanah
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kuintal/Ha)	Produksi (Ton)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Serawai	5	22,00	11
2.	Ambalau	5	18,00	9
3.	Kayan Hulu	-	-	-
4.	Sepauk	29	9,66	28
5.	Tempunak	16	6,25	10
6.	Sungai Tebelian	22	24,55	54
7.	Sintang	9	80,00	72
8.	Dedai	7	8,57	6
9.	Kayan Hilir	-	-	-
10.	Kelam Permai	4	2,50	1
11.	Binjai Hulu	12	10,83	13
12.	Ketungau Hilir	-	-	-
13.	Ketungau Tengah	-	-	-
14.	Ketungau Hulu	-	-	-
Jumlah		109	18,72	204

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

d. Pertanian

Indikator Bidang Pertanian di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32

Indikator Bidang Pertanian di Kabupaten Sintang

No	Indikator	Satuan	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	M2	172.767	146.328
2.	Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	M2	63.750	59.158
3.	Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	Kasus	3	6
4.	Penyelesaian izin lokasi baru	Izin Lokasi	3	2
5.	Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	Izin Lokasi	2	5
6.	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	30% dari luas 21.635 Km ²	

7.	Ketaatan terhadap RTRW	%	90% dari jumlah penduduk	92% dari jumlah penduduk
8.	Luas wilayah produktif	Ha	135.235	21.638
9.	Luas wilayah industry	Ha	827.230	313
10.	Luas wilayah perkotaan	Ha	885.360	10.141

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Sintang

e. Lingkungan Hidup

Indikator Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.33

Indikator Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
1.	Persentase Penangan Sampah	%	65	68	38,50
2.	Pencemaran status mutu air (14 sungai)	Status Kondisi	cukup	Cukup	Cukup
3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	Perusahaan	28	13	24
4.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	M3	43.200	54.000	1:4.143 (TPS:jiwa)
5.	Penegakan hukum lingkungan	Kasus	5	5	7

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sintang

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan Kepemilikan Identitas Kependudukan di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34

Perkembangan Kepemilikan Identitas Kependudukan di Kabupaten Sintang

No	Indikator	Satuan	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Kepemilikan KTP Elektronik	Jiwa	272.551	288.842
2.	Kepemilikan Kartu Keluarga	Jiwa	412.069	114.451
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jiwa	277.855	328.766
4.	Kepemilikan Akta Kematian	Jiwa	3.322	4.069
5.	Kepemilikan Akta Perkawinan	Jiwa	7.772	39.526
6.	Pemanfaatan data kependudukan oleh stakeholders dinas melalui ketersediaan database kependudukan	Dokumen	26	
7.	Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana penunjang operasional dinas	Unit	18	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sintang

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana Nasional (KBN) merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk atau masyarakat, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui pengaturan jarak dan jumlah kelahiran anak ideal.

Di Kabupaten Sintang pada tahun 2017 peserta KB baru tercatat sebanyak 6.700 pasangan. Sementara peserta KB aktif tercatat sebanyak 57.211 pasangan dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur sebanyak 74.722 pasangan.

i. Perhubungan

Sesuai perkembangan teknologi dan pembangunan perekonomian yang semakin mantap, peranan jasa angkutan darat yang ditunjang dengan kondisi dan jenis permukaan jalan yang baik perlu lebih ditingkatkan sehingga mobilitas penduduk dan perdagangan antar daerah dapat berjalan dengan lancar.

Tabel 2.35

Perkembangan Perhubungan di Kabupaten Sintang

No	Indikator	Satuan	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	211.745	218.769
2.	Jumlah trayek	Trayek	73	73
3.	Jumlah kendaraan lulus uji	Unit	1.233	1.438
4.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis			
	a. Pelabuhan Sungai	6	2	11
	b. Bandar Udara	1	1	1
	c. Terminal Penumpang	3	4	3
5.	Angkutan Umum	Unit	361	361
6.	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	37	37
7.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	211.745	218.769
8.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/terminal	Orang	211.745	218.769

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sintang

j. Komunikasi dan Informatika

Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.36

Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika
Di Kabupaten Sintang Tahun 2015

No	Indikator	Satuan	2015
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Jumlah jaringan komunikasi	Buah	108
2.	Rasio warnet terhadap Penduduk	%	0,001000403
3.	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	Buah	10
4.	Jumlah penyiaran radio/TV local	Buah	6
5.	Web site milik pemerintah daerah	Web	17

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia dengan potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional, keberadaan koperasi juga memberi kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran.

Tabel 2.37

Data Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Sintang Tahun 2017

No	Kecamatan	Pelaku Usaha Mikro	Pelaku Usaha Kecil	Pelaku Usaha Menengah	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Serawai	42	50	10	102
2.	Ambalau	25	25	5	55
3.	Kayan Hulu	35	19	2	56
4.	Kayan Hilir	70	50	2	122
5.	Sepauk	39	80	6	125
6.	Tempunak	39	32	3	74
7.	Sungai Tebelian	50	70	5	125
8.	Sintang	1.473	1.108	53	2.634
9.	Kelam Permai	52	39	6	97
10.	Dedai	50	31	2	83
11.	Binjai Hulu	65	65	3	133

No	Kecamatan	Pelaku Usaha Mikro	Pelaku Usaha Kecil	Pelaku Usaha Menengah	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
12.	Ketungau Hilir	34	5	1	40
13.	Ketungau Tengah	67	77	4	148
14.	Ketungau Hulu	40	56	3	99
TOTAL		2.081	1.707	105	3.893

Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sintang

l. Penanaman Modal

Kegiatan Penanaman Modal (investasi) adalah kegiatan sentral dalam perekonomian, karena PMDN dan PMA dapat mempengaruhi produksi nasional maupun regional. Indikator Bidang Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.38

Indikator Bidang Penanaman Modal
di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2018

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Buah	216	226	236
2.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rp.	1.070,00	1.945,95	746,02
3.	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rp.	235,43	408,26	100,38
4.	Jumlah dan Jenis Bank dan Cabang	Unit	41	41	41

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sintang

m. Kepemudaan dan Olahraga

n. Statistik

o. Persandian

p. Kebudayaan

q. Perpustakaan

Tabel 2.39

Perkembangan Jumlah Peminjam, Anggota Perpustakaan dan Jumlah Buku di Kabupaten Sintang Tahun 2015-2017

No	Uraian	2015	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Jumlah peminjam	1.444	1.729	1.556
2.	Jumlah anggota	220	1.374	166
3.	Kelompok anggota	220	391	136
4.	Jumlah Buku	12.489	13.383	14.244

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

r. Kearsipan

3) Layanan Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2017 produksi perikanan sebesar 44.689.785 ton. Produksi perikanan dibedakan menjadi perairan umum, keramba dan kolam. Dari ketiga jenis budidaya perikanan tersebut, yang memiliki produksi terbesar adalah budidaya di kolam dengan produksi sebesar 743,78 ton.

Tabel 2.40

Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan

No	Uraian	2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Keramba Ikan	24 Unit	-	-
2.	KJA	13 Unit		-
3.	Kolam Ikan	141 Unit	195 Unit	996 Unit
4.	Bak Semen	35 Unit	-	-
5.	Bak Terpal	39 Unit	10 Unit	70 Unit

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Sintang

b. Pariwisata

c. Pertanian

Jumlah kecamatan, kelompok tani dan luas lahan penerima bantuan di Kabupaten Sintang Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.41

Perkembangan Kelompok Pertanian di Kabupaten Sintang Tahun 2018

No	Uraian	Kecamatan	Kelompok	Luas (Ha)
[1]	[2]	[3]		[4]
1.	Kelompok Tani Penerima Perluasan Sawah			
2.	Kelompok Tani Penerima Bantuan Jagung Hibrida	13	216	3.000
3.	Kelompok Tani Penerima Bantuan Pupuk Organik (UPPO)			
4.	Kelompok Tani Penerima Bantuan Padi Organik			
5.	Kelompok Tani Penerima Bantuan Padi Hazton	8	40	500
6.	Kelompok Tani Penerima Bantuan Kedelai	10	28	238

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sintang

d. Kehutanan

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu sekitar 21,99 persen dari luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat. Luas kawasan hutan Kabupaten Sintang berdasarkan SK Menhut No: 259/KPTS-11/2000 tanggal 23 Agustus 2000 yaitu Taman Nasional 68.603 Ha, Hutan Lindung 446.799 Ha, Hutan Produksi Terbatas 623.505 Ha, Hutan Produksi Biasa 188.465 Ha dan hutan Wisata 1.334 Ha. Sedangkan luas kawasan hutan Kabupaten Sintang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2015 seluas 1.282.835,94 Ha.

Tabel 2.42

Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Sintang
Tahun 2016 (Ha)

No	Jenis Hutan	Tahun 2016
[1]	[2]	[3]
1.	Hutan PPA/Taman Nasional	68.603,00
2.	Hutan Lindung	446.799,00
3.	Hutan Produksi Terbatas	623.505,10

No	Jenis Hutan	Tahun 2016
[1]	[2]	[3]
4.	Hutan Produksi Biasa	188.469,25
5.	Pertanian Lahan Kering/Areal Penggunaan Lain	834.808,75
6.	Hutan Wisata (HW)	1.334,00
Jumlah		2.163.520,00

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

Dari area yang ada di Kabupaten Sintang, pemanfaatan terbesar yaitu untuk pertanian lahan kering dan area penggunaan lain yaitu 38,59 persen, Taman Nasional sebesar 3,17 persen, Hutan Lindung sebesar 20,65 persen, Hutan Produksi sebesar 28,82 persen, Hutan Produksi Biasa sebesar 8,71 persen, dan Hutan Wisata sebesar 0,06 persen.

Tabel 2.43

Luas Lahan kritis di Luar Kawasan Hutan
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 (Ha)

No	Kecamatan	Jumlah
[1]	[2]	[3]
1.	Serawai	22.877,92
2.	Ambalau	15.610,27
3.	Kayan Hulu	69.929,43
4.	Sepauk	90.205,68
5.	Tempunak	60.188,47
6.	Sungai Tebelian	51.805,64
7.	Sintang	25.775,11
8.	Dedai	59.323,22
9.	Kayan Hilir	56.190,41
10.	Kelam Permai	57.326,94
11.	Binjai Hulu	29.679,54
12.	Ketungau Hilir	97.326,94
13.	Ketungau Tengah	59.746,70
14.	Ketungau Hulu	84.581,28
Jumlah		780.567,55

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

Tabel 2.44

Luas Lahan kritis di Dalam Kawasan Hutan
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 (Ha)

No	Jenis Hutan	Jumlah
[1]	[2]	[3]
1.	Hutan Lindung	102.615
2.	Hutan Produksi Terbatas	239.553
3.	Hutan Produksi Biasa	137.231

No	Jenis Hutan	Jumlah
[1]	[2]	[3]
4.	Hutan Wisata	1.791
5.	Taman Nasional	147
Jumlah		481.337

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2018

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

f. Perdagangan

Tabel 2.45

Jumlah Sarana Perdagangan dan Pedagang
Di Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2018

No	Uraian	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Pasar	34	35
2.	Kios	759	769
3.	Los	807	807
4.	Pedagang	1.149	1.159

Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sintang

g. Perindustrian

h. Transmigrasi

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

a. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur adalah katalisator pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya, sehingga dapat memacu produktifitas serta efisiensi, dan pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gerak laju pembangunan sebuah kawasan atau daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini sangat penting dan menjadi fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

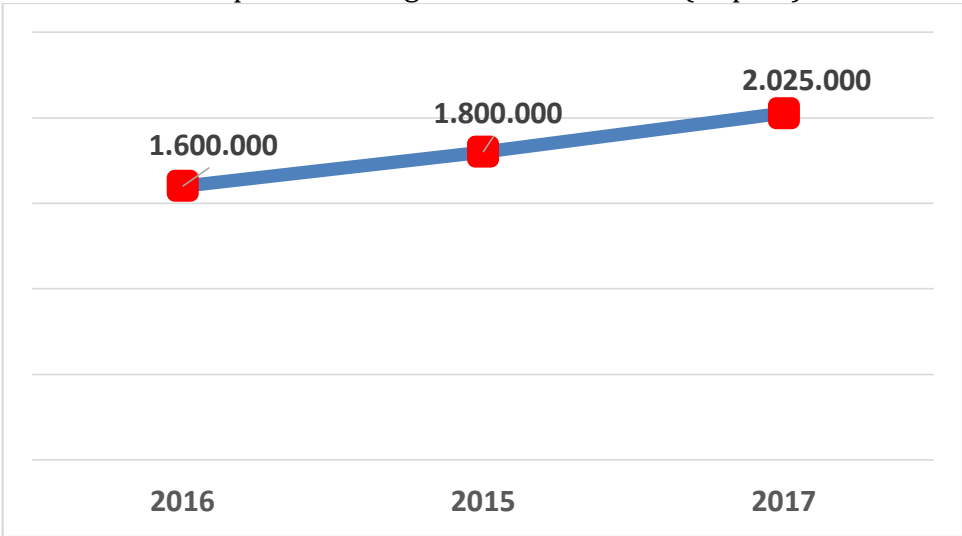
Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah/daerah yang bersangkutan, serta memiliki keterkaitan antara wilayah satu dan wilayah lainnya (konetivitas) dan antara sektor yang satu dan sektor lainnya (terintegrasi).

Pengembangan infrastruktur tidak hanya dilihat dari aspek fisik semata berupa ketersediaan jalan, drainase, listrik, air minum, pelabuhan, dan lain-lainnya. Pembangunan infrastruktur di sini harus juga melihat aspek layanan kebutuhan para pekerja atau keberlanjutannya.

b. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Gambar 2.9.

Rata-rata Kebutuhan Hidup Layak Menurut Bulan di Kabupaten Sintang Tahun 2015-2017 (Rupiah)



2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018

Anggaran Belanja Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mencapai Rp. 2.072.815.016.495,04 dengan realisasi mencapai Rp. 1.870.318.612.307,98 atau 90,23%.

Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp. 1.176.883.470.311,87 dengan realisasi mencapai Rp. 1.077.681.961.433,54 atau 91,57% dan Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp. 895.931.546.183,17 dengan realisai mencapai Rp. 792.636.650.874,44 atau 88,47%. Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.46

Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018
Per OPD

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020

No	OPD	PAGU	RALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	123.979.060.953,55	113.242.552.854,35	91,34
2	Dinas Kesehatan	142.610.862.803,40	130.193.752.079,00	91,29
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen	89.480.329.885,43	78.199.532.622,29	87,39
4	Dinas Pekerjaan Umum	128.066.764.500,00	117.516.816.362,45	91,76
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	108.753.854.318,00	97.756.940.026,53	89,89
6	Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan	12.488.601.828,00	10.580.683.470,00	84,72
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.148.828.172,00	8.797.549.472,00	96,16
8	Dinas Perhubungan	9.537.185.350,00	8.463.152.845,00	88,74
9	Dinas Lingkungan Hidup	25.108.094.108,00	9.647.930.059,00	38,43
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.175.308.570,00	5.099.936.642,00	98,54
11	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.365.371.891,00	9.350.178.110,00	90,21
12	Dinas Sosial	2.363.081.850,00	2.219.231.612,00	93,91
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.768.855.850,00	5.203.242.161,00	76,87
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.611.898.090,00	2.523.784.103,00	96,63
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.192.040.500,00	4.072.607.824,00	97,15
16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	6.866.744.800,00	6.538.496.136,00	95,22
17	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.954.692.500,00	2.847.716.477,00	96,38
18	Satuan Polisi Pamong Praja	8.489.921.601,00	7.804.473.973,00	91,93
19	Sekretariat Daerah	48.030.467.420,00	43.962.112.469,00	91,53
20	Sekretariat DPRD	24.730.998.046,50	21.947.872.911,00	88,75
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.199.363.829,00	11.186.739.462,00	91,70
22	Inspektorat	7.663.775.000,00	7.304.588.311,00	95,31
23	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	784.559.515,00	782.712.035,00	99,76
24	Kantor Kecamatan Kelam Permai	672.918.960,00	657.822.150,00	97,76
25	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	712.395.160,00	709.304.505,00	99,57
26	Kantor Kecamatan Tempunak	709.616.600,00	637.470.300,00	89,83
27	Kantor Kecamatan Dedai	837.014.800,00	809.885.649,00	96,76
28	Kantor Kecamatan Sepauk	1.021.543.920,00	986.462.227,00	96,57
29	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	713.727.512,50	698.939.970,00	97,93
30	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	822.195.400,00	820.589.617,00	99,80
31	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	823.205.200,00	808.138.488,00	98,17
32	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	843.203.200,00	843.083.100,00	99,99
33	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	722.928.275,00	681.893.550,00	94,32
34	Kantor Kecamatan Serawai	849.463.800,00	811.718.591,00	95,56
35	Kantor Kecamatan Ambalau	937.994.800,00	900.653.950,00	96,02
36	Kantor Kecamatan Sintang	4.166.978.202,00	3.946.138.364,00	94,70
37	Kantor Kecamatan Bukit Mangat	225.000.000,00	0,00	0,00
38	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah Utara	225.000.000,00	0,00	0,00
39	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah Selatan	225.000.000,00	0,00	0,00
40	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu Utara	225.000.000,00	0,00	0,00
41	Kantor Kecamatan Inggar	225.000.000,00	0,00	0,00
42	Kantor Kecamatan Tontang	225.000.000,00	0,00	0,00
43	Kantor Kecamatan Sintang Barat	225.000.000,00	0,00	0,00
44	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	8.481.615.374,79	7.698.907.751,00	90,77

No	OPD	PAGU	RALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
45	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.211.499.110,00	7.407.008.898,00	90,20
46	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	20.454.526.850,00	19.940.987.080,82	97,49
47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	4.012.292.090,00	3.940.989.868,00	98,22
48	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.671.291.750,00	3.602.624.920,00	98,13
49	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.950.000.000,00	1.896.658.860,00	97,26
50	Dinas Pertanian dan Perkebunan	29.061.584.198,00	18.285.933.795,00	62,92
51	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	12.309.889.600,00	11.306.460.624,00	91,85
	JUMLAH	895.931.546.183,17	792.634.274.274,44	88,47

Sumber : BPKAD, Realiasi 2018

Rekapitulasi RKPD Pendapatan dan Belanja Per SKPD Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Lampiran I.

2.2.2. Target Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan Realisasi sampai dengan Tahun 2018

Target Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 terhadap capaian sampai dengan tahun 2018 masih jauh dari harapan yang di rencanakan terutama pada indikator jumlah penduduk miskin yang meningkat dari tahun 2017 yang sebesar 10,20 persen menjadi sebesar 10,35 persen, sedangkan target pada RPJMD tahun 2018 sebesar 8,71 persen. Target dan realisasi indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78

Target dan Realisasi Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			2017	2018	2017	2018
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,1	6,3	5,33	
2.	Perkembangan PDRB	%	5,35	5,41	8,24	
3.	Laju Inflasi Kabupaten)*	%	6,50	6,75	5,42	
4.	PDRB Per Kapita	Rp.(Juta)	29,5	31,3	30,12	
5.	Jumlah Penduduk Miskin	%	8,81	8,71	10,20	10,35
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,04	3,02	1,93	
7.	IPM	Angka	65,00	66,00	65,16	

Tabel 2.79

Target Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sintang
Tahun 2019-2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
			2019	2020
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,5	6,7
2.	Pertumbuhan PDRB	%	5,75	5,92
3.	Laju Inflasi Kabupaten	%	6,48	6,87
4.	PDRB Per Kapita	Rp.(Juta)	33,6	35,3
5.	Jumlah Penduduk Miskin	%	8,21	
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,01	3,00
7.	IPM	Angka	67,00	68,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah yang dibahas dalam RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020 dalam rangka pencapaian penurunan angka kemiskinan, meliputi:

1. Peningkatan infrastruktur dasar;
2. Peningkatan ekonomi kreatif;
3. Peningkatan reformasi birokrasi; dan
4. Kabupaten lestari.

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Identifikasi Lingkungan Internal
 - a. Kekuatan Daerah
 - 1) Kabupaten Sintang memiliki berbagai potensi sumber daya alam, diantaranya yang menjadi andalan daerah adalah sumber daya hutan dan sumber daya pertanian (padi ladang, jagung, kedelai, dll) serta perkebunan (karet, kelapa sawit, dll). Sumber daya lainnya seperti pertambangan juga memiliki prospek untuk dikembangkan.
 - 2) Berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, yaitu Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau

Hulu yang menjadi beranda depan perekonomian wilayah kecamatan.

- 3) Memiliki potensi wisata yaitu Bukit Kelam, Hutan Wisata Baning, Taman Budaya Bukit Baka dan Bukit Raya, serta Istana Kerajaan Sintang.
- 4) Lembaga keuangan yang sangat mambantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha.

b. Kelemahan Daerah

- 1) Pemanfaatan potensi sumber daya alam dilakukan secara belum optimal sehingga belum dapat untuk meningkatkan roda perekonomian daerah.
- 2) Infrastruktur dasar yang masih jauh dari harapan, sehingga menghambat perekonomian daerah, akses pelayanan pendidikan, akses kesehatan dan pelayanan publik.
- 3) Infrastruktur di daerah kecamatan perbatasan yang sangat terbatas.
- 4) Masyarakat kesulitan air bersih disebabkan sungai tercemar akibat penambangan emas secara ilegal dan sungai dikelilingi kelapa sawit dan juga sungai-sungai besar mengalami pendangkalan, diakibatkan hutan mulai gundul.
- 5) Masih belum dimanfaatkan secara optimal anggaran yang tersedia untuk menunjang kegiatan prioritas daerah.

2. Identifikasi Lingkungan Eksternal

a. Peluang Daerah

- 1) Pemekaran wilayah di Kabupaten Sintang yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah baik secara politik maupun ekonomi, meningkatkan pelayanan bagi masyarkat dan mengelola potensi daerah dengan sebaik mungkin.
- 2) Menawarkan potensi daerah kepada investor berupa produk unggulan daerah dan di bidang pariwisata.

- 3) Pemerintah Pusat segera membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
- b. Ancaman Daerah
 - 1) Ancaman globalisasi berada pada semua aspek kehidupan masyarakat, baik dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, pertahanan dan keamanan.
 - 2) Kabupaten yang memiliki 2 kecamatan yang berbatasan dengan Negara Malaysia sehingga rawan terjadi jalur masuk Narkoba, Tenaga Kerja Ilegal dan terorisme

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

1. Urusan Pendidikan

1. APK dan APM yang masih rendah, terutama SMP dan SMA.
2. Masih banyak gedung SD, SMP, SMA dan SMK yang mengalami kerusakan.
3. Masih banyak SD, SMP, SMA dan SMK yang mengalami kekurangan ruang belajar
4. Banyak SD dan SMP yang belum memiliki gedung perpustakaan dan laboratorium
5. Masalah kekurangan guru terutama pada sekolah-sekolah di perhuluan dan pada unit-unit sekolah baru.
6. Penyebaran guru yang belum/tidak merata.
7. Kualifikasi Akademik/latar belakang pendidikan guru sebagian besar tergolong belum layak dan semi layak.
8. Masih terdapat sebagian penduduk Kabupaten Sintang tidak/belum bisa baca tulis.
9. Tempat tinggal sebagian besar siswa di daerah perhuluan sangat jauh dari lokasi sekolah, dipihak lain transportasi jalan kondisinya kurang mendukung.
10. Adanya keinginan sebagian besar masyarakat terhadap pendidikan gratis

2. Urusan Kesehatan

1. Jumlah tenaga kesehatan khususnya tenaga medis, para medis dan penunjang lainnya masih belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)..
2. Kurangnya akses dan mutu pelayanan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan.
4. Terbatasnya anggaran untuk membangun infrastruktur rumah sakit rujukan.

3. Urusan Perumahan dan Permukiman

1. Masih banyak jumlah rumah tidak layak huni.
2. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.
3. Kurangnya data base tentang perumahan, air bersih dan sanitasi
4. Masih terdapat sarana dan prasarana sanitasi yang belum memadai.
5. Kurangnya Fasilitas Gedung /tata bangunan gedung yang tidak memadai sehingga pelayanan publik tidak tersedia dengan baik

4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Kondisi panjang jalan dengan kondisi baik masih rendah dan sebagian permukaan berupa jalan tanah
2. Masih banyaknya jembatan dengan kondisi rusak.
3. Minimnya anggaran untuk meningkatkan kualitas jalan.
4. Masih lemahnya pengendalian ruang yang menyangkut proses perizinan, pemberian status dan insentif serta penertiban yang semakin rumit dan sulit diterapkan
5. Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.
6. Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap bangunan-bangunan yang melanggar rencana tata ruang dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

5. Urusan Sosial

1. Jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat.
2. Minimnya anggaran untuk merehabilitasi penyandang gangguan sosial akibat keterbatasan fisik.

3. Belum tersedianya fasilitas rumah singgah untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) orang sakit jiwa gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalahgunaan NAPZA serta penderita HIV/AIDS.

6. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

7. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum tersedianya Data base yang akurat sehingga sangat menyulitkan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan.
2. Adanya kecenderungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk tidak melaporkan permasalahannya.
3. Jumlah penduduk usia anak yang masih cukup tinggi.
4. Belum optimalnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

9. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Belum optimalnya pembinaan dan penataan terhadap pemerintahan desa dan BPD serta kelembagaan desa lainnya.
2. Belum optimalnya pemberdayaan terhadap masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara partisipatif untuk pengembangan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.
3. Masih rendahnya tingkat pemahaman aparat desa tentang tugas dan fungsi.

4. Belum tersedia sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi untuk menelaah/menelaah tugas-tugas kepala desa.

10. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi pada perempuan dan remaja masih rendah.
2. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana.
3. Masih rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1.
4. Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak sebagai aset keluarga dimasa depan.

11. Urusan Tenaga Kerja

1. Terbatasnya upaya penciptaan lapangan kerja.
2. Kualitas pekerja masih tergolong rendah hal ini disebabkan sebagian besar pekerja berpendidikan SLTP ke bawah.

12. Urusan Pangan

1. Pergeseran tata guna lahan dan lapangan usaha petani dari petani tanaman pangan ke petani perkebunan sawit dan kaaret.
2. Kurangnya ketersediaan pangan.
3. Belum dioptimalkan potensi lahan produktif untuk peningkatan ketahanan pangan.
3. Tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk dan pestisida.
4. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana wilayah seperti jalan dan jembatan untuk pendistribusian sarana produksi pertanian.

13. Urusan Penanaman Modal

1. Belum tersosialisasinya potensi investasi sehingga kurangnya minat investor untuk menanamkan modal.

2. Belum berkembangnya pola kemitraan dan kerjasama dengan investor.
3. Belum optimalnya layanan pengaduan penanaman modal dan perizinan.

14. Urusan Lingkungan Hidup

1. Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat mengelola lingkungan hidup.
3. Rusaknya lingkungan karena adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin.
4. Meningkatnya volume sampah terutama di wilayah perkotaan.
5. Terjadinya perubahan iklim.

15. Urusan Koperasi dan UKM

1. Rendahnya dan lemahnya kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi organisasi dan tatalaksana.
2. Lemahnya Koperasi, UMKM terhadap akses pasar.
3. Lemahnya akses Koperasi, UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha.

16. Urusan Perdagangan

1. Kurangnya pengawasan terhadap peredaran makanan dan produk berbahaya khususnya dari Negara tetangga.
2. Belum berfungsinya sarana pasar yang telah dibangun.
3. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian izin usaha.
4. Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan bagi usaha kecil menengah dan PKL

17. Urusan Perindustrian

1. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sentra industri rakyat.
2. Terbatasnya kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha industri.

18. Urusan Perhubungan

1. Keterbatasan anggaran dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang.
2. Masih lemahnya pengawasan terhadap kendaraan truk dengan tonase melebihi kapasitas.
3. Luasnya jangkauan dan kondisi geografis yang sulit.
4. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas.

19. Urusan Perpustakaan

1. Masih kurangnya gemar membaca.
2. Masih kurangnya bahan pustaka.
3. Belum dimanfaatkan secara optimal bahwa perpustakaan sebagai wahana pendidikan dan penelitian.
4. Belum tersedianya sumber daya aparatur yang membidangi perpustakaan.

20. Urusan Kearsipan

1. Masih kurangnya penyampaian dokumen daerah untuk diarsipkan.
2. Masih belum optimalnya pemanfaatan arsip.
3. Belum tersedianya sumber daya aparatur yang membidangi kearsipan.

21. Urusan Kebudayaan

1. Belum optimalnya peningkatan pelestarian cagar budaya daerah.
2. Masih belum optimalnya pemanfaatan museum.
3. Kurangnya kuantitas dan kualitas pelaku seni dan film.
4. Belum optimalnya pagelaran seni budaya daerah.
5. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di bidang kebudayaan.

22. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih rendahnya aktivitas kepemudaan dan kualitas kepemudaan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga.

3. Masih rendahnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.

23. Urusan Pertanahan

1. Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pengendalian pengelolaan pertanahan.
2. Belum mempunyai Sistem Informasi Manajemen Data sebagai media informasi untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan pertanahan.

24. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Adanya pengaruh globalisasi dalam sistem informasi dan komunikasi yang bersifat negatif dan dapat merusak generasi muda dan masyarakat pada umumnya.
2. Masih terdapat daerah yang belum terpasang jaringan telekomunikasi.

25. Urusan Statistik

26. Urusan Persandian

1. Masih terjadi gangguan frekuensi dalam pengiriman dan penerimaan berita disebabkan factor cuaca dan gangguan listrik.
2. Masih kurangnya tenaga teknis dan operator dalam pengoperasian peralatan radio SSB sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

27. Urusan Pertanian

1. Masih rendahnya sumber daya manusia petani
2. Masih rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.
3. Masih rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian.
4. Masih tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman dan terjadinya anomali iklim.

5. Rendahnya tingkat kesuburan tanah.
6. Belum optimalnya penerapan ekonomi pertanian.
7. Belum optimalnya pemanfaatan kelembagaan petani.
8. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian.
9. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai sehingga menghambat distribusi hasil pertanian.

28. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Kecenderungan penurunan produksi ikan di perairan umum.
2. Minimnya sarana dan prasarana perikanan.
3. Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan pembudidaya perikanan dalam penerapan inovasi teknologi.

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Masih banyak rumah tangga yang belum menggunakan tenaga listrik.
2. Belum memadainya kapasitas pembangkit dan jaringan listrik serta belum optimalnya pemanfaatan potensi energi lokal seperti tenaga air (PLTA dan Mikro Hidro) dan batu bara, maupun pengembangan energi alternatif lainnya.

30. Urusan Kehutanan

31. Urusan Pariwisata

1. Belum maksimalnya pengelolaan potensi wisata.
2. Kualitas jaringan sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih kurang baik.
3. Keterbatasan anggaran untuk biaya pemeliharaan sarana dan objek wisata.

32. Urusan Transmigrasi

1. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi.
2. Belum dimanfaatkan secara optimal sumber daya alam di kawasan transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Perlu peningkatan pelayanan jaminan hidup melalui pelatihan keterampilan.

33. Urusan Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan

1. Belum terlaksananya mekanisme secara selektif, transparansi dan jujur pengiriman peserta diklat.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana diklat.

34. Urusan Kepegawaian

1. Masih terbatasnya jumlah ASN.
2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.
3. Masih rendahnya kesejahteraan pegawai/insentif yang memadai berdasarkan beban kerja.
4. Masih banyaknya ASN yang menduduki jabatan Eselon namun belum mengikuti diklat perjenjangan, disebabkan keterbatasan anggaran.

35. Urusan Kesejahteraan Sosial

1. Belum selektifnya pemberian hibah bansos kepada masyarakat.

36. Urusan Penunjang Bidang Pengelolaan Perbatasan

1. Masih minimnya sarana dan prasarana serta pembangunan yang belum merata seperti sarana pendidikan, jalan, air bersih maupun sarana komunikasi.
2. Masih minimnya anggaran untuk pengembangan daerah perbatasan.
3. Belum terbangunnya Pos Lintas Batas Negara.

37. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) perencanaan.
2. Belum optimalnya implementasi sistem perencanaan dan pelaporan.
3. Masih rendahnya ketersediaan data dalam menyusun perencanaan pembangunan.

4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam mendukung pengembangan pembangunan daerah.

38. Urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Belum dimanfaatkan secara optimal hasil penelitian.
2. Minimnya anggaran dalam penyusunan dokumen penelitian.

39. Urusan Penunjang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah

1. Belum optimalnya kinerja birokrasi sehingga rendahnya mutu pelayanan yang diberikaan yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
2. Masih terhambatnya pemekaran wilayah disebabkan belum memiliki rekomendasi dari pemerintah provinsi dan pusat serta pemerintah pusat masih melaksanakan kebijakan moratorium pembentuk DOB.
3. Masih terdapat OPD yang terlambat dalam pengumpulan data sebagai bahan penyusunan LPPD dan LKPJ.
4. Keterbatasan anggaran dan kurangnya fasilitas yang mendukung pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan.
5. Belum mengikuti perkembangan kemajuan teknologi sarana operasional humas dan protokol untuk pelaksanaan pelayanan informasi dan pemberitaan.

40. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan

1. Masih terdapat ketidakkonsistenan antara perencanaan dengan penganggaran.
2. Belum diterapkannya akuntansi berbasis akrual yang dapat memberikan informasi keuangan yang lebih baik.
3. Belum tersambung secara online aplikasi keuangan.

41. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengelolaan Aset

1. Belum optimalnya manajemen dan pengelolaan aset daerah.
2. Masih belum optimalnya pengamanan aset daerah.

42. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

43. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Hukum

1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat yang dapat mengancam pada tindakan-tindakan melawan hukum atau anarkis diakibatkan tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan beragam.
2. Masih kurangnya koordinasi dan partisipasi OPD terkait sehingga mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dan mengolah bahan dalam penyusunan Peraturan Daerah.
3. Masih belum optimalnya pemanfaatan sistem jaringan dokumentasi informasi hukum.
4. Masih kurangnya penyuluhan hukum terpadu ke seluruh Kecamatan, karena keterbatasan anggaran.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019

Kemajuan ekonomi yang diKemajuan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun belum menunjukkan perubahan nyata (riil). Disamping karena terjadinya peningkatan produksi secara fisik, juga karena dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara nyata, pengaruh inflasi harus dihilangkan. Oleh karena itu, PDRB dihitung dengan menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada suatu tahun dasar yang telah ditetapkan, dalam hal ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010. Dengan cara ini maka dapat diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun atau selama periode tertentu.

Memasuki tahun 2017, PDRB Kabupaten Sintang atas dasar harga berlaku mencapai 12,30 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 9,77 persen. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 meningkat menjadi 8,68 triliun rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi secara riil yang diikuti dengan perubahan harga yang cepat pada setiap sektor ekonomi mengakibatkan struktur perekonomian mengalami perubahan. Struktur perekonomian Kabupaten Sintang pada tahun 2016 didominasi oleh tiga kategori ekonomi yaitu kategori pertanian, kategori perdagangan, dan kategori konstruksi.

Pada tahun 2017, kategori pertanian memberikan kontribusi terbesar yaitu 22,21 persen, kemudian diikuti kategori perdagangan sebesar 17,43 persen, serta kategori konstruksi sebesar 15,04 persen. Sektor yang paling kecil sumbangannya yaitu pengadaan listrik dan gas sebesar 0,02 persen.

Tabel 3.1

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sintang

No	Indikator	Tahun		
		2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28	5,33	5,47
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	10,07	10,20	10,35
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,25	1,93	2,34
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	64,78	65,16	66,07

Tabel 3.2

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sintang Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2015-2017

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2015	2016*	2017**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,36	23,46	22,21
B.	Pertambangan dan Penggalian	8,48	8,57	8,96
C.	Industri Pengolahan	9,66	9,21	9,10
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02
E.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05
F.	Konstruksi	13,06	13,88	15,04
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	17,74	17,69	17,43
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,06	2,10	2,07
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,39	2,42	2,42
J.	Informasi dan Komunikasi	4,58	4,75	5,01
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,33	2,46	2,57
L.	Real Estat	2,85	2,85	2,85
M.	Jasa Perusahaan	0,44	0,44	0,43
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,86	4,03	4,16
O.	Jasa Pendidikan	4,97	4,96	4,70
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,42	2,39	2,25
Q.	Jasa Lainnya	0,74	0,73	0,72
PDRB		100	100	100

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020

Perekonomian global tahun 2019 akan lebih baik, namun masih terdapat beberapa resiko yang perlu diwaspadai. Hal pertama yang harus diwaspadai, yaitu pemulihan ekonomi yang masih dibayangi oleh ketidakpastian dan yang kedua adalah restrukturisasi ekonomi di China yang berpotensi mempengaruhi perekonomian global.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebelumnya diprediksi mencapai 5,17 persen dari PDB. Sementara pada 2019, pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 5,15 persen. Prediksi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan

Barat tahun 2019 pada kisaran angka 5,0-5,4 persen dan pada tahun 2020 target perekonomian Kalimantan Barat diproyeksi tumbuh sebesar 5,35 persen. Kabupaten Sintang untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2019 pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 di prediksi berada di kisaran 6,5 persen, sedangkan pada tahun 2020 diproyeksikan berada di kisaran 6,7 persen.

Tabel 3.3

Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sintang
(Perkiraan Tahun 2019 dan 2020)

No	Indikator	Tahun	
		2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,5	6,7
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,21	
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,01	3,00
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	67,00	68,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

Tabel 3.4

Indikator Makro Ekonomi Kalimantan Barat
(Perkiraan Tahun 2018 dan 2019)

No	Indikator	Tahun	
		2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20	5,35
2.	Kemiskinan (%)	6,92	6,43
3.	TPT (%)	3,92	3,63
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	67,20	67,87
5.	Gini Rasio	0,33	0,32

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019 Prov. Kalbar

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi

penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah, mendorong berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan yang dijabarkan melalui target dan realisasi APBD serta efesiensi dan efektivitas pengelolaan belanja daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Sintang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah yang menuntut ketergantungan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pada tahun 2019, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 7,77%. Angka kontribusi tersebut lebih rendah dari tahun 2018, yaitu sebesar 12,19%. Sedangkan pada tahun 2020, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah diproyeksikan menurun sebesar 7,57%, sebagaimana terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Realisasi 2016	1.674.585.588.493	108.405.524.039	6,47
2.	Realisasi 2017	1.946.171.826.164	113.170.505.735	5,82
3.	Realisasi 2018	1.973.969.260.503	240.591.512.682	12,19
4.	Target 2019	1.942.842.993.660	150.923.284.660	7,77
5.	Proyeksi 2020	1.942.046.721.244	147.007.300.244	7,57

Sumber : BPKAD, 2019, diolah dan Realisasi 2018

Rincian obyek PAD berdasarkan kontribusi obyek pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2020 diproyeksikan menurun sebesar 37,41% dari tahun 2018 (tabel 3.2).

Tabel 3.2

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Kontribusi %
1.	Realisasi 2016	108.405.524.039	30.639.527.137	28,26
2.	Realisasi 2017	113.170.505.735	33.744.557.571	29,82
3.	Realisasi 2018	240.591.512.682	136.536.283.344	56,75
4.	Target 2019	150.923.284.660	58.582.000.000	38,82
5.	Proyeksi 2020	147.007.300.244	55.000.000.000	37,41

Sumber : BPKAD, 2019, diolah dan Realisasi 2018

- Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2020 diproyeksikan meningkat sebesar 3,06% (tabel 3.3).

Tabel 3.3

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Daerah	Kontribusi %
1.	Realisasi 2016	108.405.524.039	3.201.815.556	2,95
2.	Realisasi 2017	113.170.505.735	3.774.909.445	3,34
3.	Realisasi 2018	240.591.512.682	4.389.872.389	1,82
4.	Target 2019	150.923.284.660	4.833.984.416	3,20
5.	Proyeksi 2020	147.007.300.244	4.500.000.000	3,06

Sumber : BPKAD, 2019, diolah dan Realisasi 2018

- Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD pada tahun 2020 diproyeksikan meningkat sebesar 7,14% dari tahun 2019 (tabel 3.4).

Tabel 3.4

Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Kontribusi %
1.	Realisasi 2016	108.405.524.039	6.618.982.464	6,11
2.	Realisasi 2017	113.170.505.735	11.207.658.900	9,90
3.	Realisasi 2018	240.591.512.682	11.810.301.659	4,91
4.	Target 2019	150.923.284.660	10.500.000.000	6,96
5.	Proyeksi 2020	147.007.300.244	10.500.000.000	7,14

Sumber : BPKAD, 2019, diolah dan Realisasi 2018

4. Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD pada tahun 2020 diproyeksikan meningkat sebesar 52,38% dari tahun 2019 (tabel 3.5).

Tabel 3.5

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap PAD
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Kontribusi %
1.	Realisasi 2016	108.405.524.039	67.945.198.882	62,68
2.	Realisasi 2017	113.170.505.735	64.443.379.818	56,94
3.	Realisasi 2018	240.591.512.682	87.855.055.290	36,52
4.	Target 2019	150.923.284.660	77.007.300.244	51,20
5.	Proyeksi 2020	147.007.300.244	77.007.300.244	52,38

Sumber : BPKAD, 2019, diolah dan Realisasi 2018

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pada tahun 2019, kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah ditargetkan sebesar 68,78%. Angka kontribusi tersebut lebih rendah dari tahun 2017, yaitu sebesar 72,62%. Sedangkan pada tahun 2020, kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi 68,97%, sebagaimana terlihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6

Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Dana Perimbangan	Kontribusi %
1.	Realisasi 2016	1.674.585.588.493	1.294.363.476.154	77,29
2.	Realisasi 2017	1.946.171.826.164	1.404.911.040.138	72,19
3.	Realisasi 2018	1.973.969.260.503	1.305.574.639.979	66,14
4.	Target 2019	1.942.842.993.660	1.336.343.383.000	68,78
5.	Proyeksi 2020	1.942.046.721.244	1.339.463.095.000	68,97

Sumber : BPKAD, 2019, diolah dan Realisasi 2018

Adapun gambaran dana perimbangan berdasarkan kontribusi obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Kontribusi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terhadap dana perimbangan pada tahun 2020 diproyeksikan meningkat sebesar 3,37% dari tahun 2019 (tabel 3.7).

Tabel 3.7

Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Dana Perimbangan	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Kontribusi %
1.	Realisasi 2016	1.294.363.476.154	56.889.763.027	4,40
2.	Realisasi 2017	1.404.911.040.138	42.909.495.192	3,05
3.	Realisasi 2018	1.305.574.639.979	40.964.257.046	3,14
4.	Target 2019	1.336.343.383.000	42.000.000.000	3,14
5.	Proyeksi 2020	1.339.463.095.000	45.119.712.000	3,37

Sumber : BPKAD, 2019, diolah dan Realisasi 2018

2. Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap dana perimbangan pada tahun 2020 diproyeksikan menurun sebesar 69,71% dari tahun 2019 (tabel 3.8).

Tabel 3.8

Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Dana Perimbangan	Dana Alokasi Umum	Kontribusi %
1.	Realisasi 2016	1.294.363.476.154	925.671.945.000	71,52
2.	Realisasi 2017	1.404.911.040.138	909.410.866.000	64,73
3.	Realisasi 2018	1.305.574.639.979	909.410.866.000	69,66
4.	Target 2019	1.336.343.383.000	933.800.038.000	69,88
5.	Proyeksi 2020	1.339.463.095.000	933.800.038.000	69,71

Sumber : BPKAD, 2019, diolah dan Realisasi 2018

3. Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap dana perimbangan pada tahun 2020 diproyeksikan menurun sebesar 26,92% dari tahun 2019 (tabel 3.9).

Tabel 3.9

Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Dana Perimbangan	Dana Alokasi Khusus	Kontribusi %
1.	Realisasi 2016	1.294.363.476.154	311.801.768.127	24,09
2.	Realisasi 2017	1.404.911.040.138	452.590.678.946	32,21
3.	Realisasi 2018	1.305.574.639.979	355.199.516.933	27,21
4.	Target 2019	1.336.343.383.000	360.543.345.000	26,98
5.	Proyeksi 2020	1.339.463.095.000	360.543.345.000	26,92

Sumber : BPKAD, 2019, diolah dan Realisasi 2018

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil Lainnya serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada tahun 2019, kontribusi lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan daerah ditargetkan sebesar 23,45%. Angka kontribusi tersebut lebih tinggi dari tahun 2018, yaitu sebesar 21,67%. Sedangkan pada tahun 2020, kontribusi lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapat daerah diproyeksikan meningkat menjadi 23,46%, sebagaimana terlihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10

Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Kontribusi %
1.	Realisasi 2016	1.674.585.588.493	271.816.588.300	16,23
2.	Realisasi 2017	1.946.171.826.164	428.090.280.291	22,00
3.	Realisasi 2018	1.973.969.260.503	427.803.107.842	21,67
4.	Target 2019	1.942.842.993.660	455.576.326.000	23,45
5.	Proyeksi 2020	1.942.046.721.244	455.576.326.000	23,46

Sumber : BPKAD, 2019, diolah dan Realisasi 2018

Adapun gambaran lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan kontribusi objek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Kontribusi dana bagi hasil pajak provinsi terhadap lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2020 diproyeksikan tetap menjadi 10,98%, sebagaimana terlihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11

Kontribusi Bagi Hasil Pajak Provinsi terhadap
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	Kontribusi %
1.	Realisasi 2016	271.816.588.300	49.596.444.300	18,25
2.	Realisasi 2017	428.090.280.291	50.776.291.917	11,86
3.	Realisasi 2018	427.803.107.842	69.628.393.842	16,28
4.	Target 2019	455.576.326.000	50.000.000.000	10,98
5.	Proyeksi 2020	455.576.326.000	50.000.000.000	10,98

Sumber : BPKAD, 2019, diolah dan Realisasi 2018

2. Kontribusi dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2020 diproyeksikan tetap sebesar 74,44%, sebagaimana terlihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12

Kontribusi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Kontribusi
1.	Realisasi 2016	271.816.588.300	207.413.744.000	76,31
2.	Realisasi 2017	428.090.280.291	301.776.823.000	70,49
3.	Realisasi 2018	427.803.107.842	294.718.224.000	68,89
4.	Target 2019	455.576.326.000	339.153.726.000	74,44
5.	Proyeksi 2020	455.576.326.000	339.153.726.000	74,44

Sumber : BPKAD, 2019, diolah dan Realisasi 2018

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam tabel 3.13.

Tabel 3.13

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2019	Proyeksi 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	1.674.585.588.493	1.946.171.826.164	1.973.969.260.503	1.942.842.993.660	1.942.046.721.244
4.1	Pendapatan Asli Daerah	108.405.524.039	113.170.505.735	240.591.512.682	150.923.284.660	147.007.300.244
4.1.1	Pajak Daerah	30.639.5275.137	33.744.557.571	136.536.283.344	58.582.000.000	57.000.000.000
4.1.2	Retribusi Daerah	3.201.815.556	3.774.909.445	4.389.872.389	4.833.984.416	4.500.000.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.618.982.464	11.207.658.900	11.810.301.659	10.500.000.000	10.500.000.000
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.945.198.882	64.443.379.818	87.855.055.290	77.007.300.244	77.007.300.244
4.2	Dana Perimbangan	1.294.363.476.154	1.404.911.040.138	1.305.574.639.979	1.336.343.383.000	1.339.463.095.000
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	56.889.763.027	42.909.495.192	40.964.257.046	42.000.000.000	45.119.712.000
4.2.2	Dana Alokasi Umum	925.671.945.000	909.410.866.000	909.410.866.000	933.800.038.000	933.800.038.000
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	311.801.768.127	452.590.678.946	355.199.516.933	360.543.345.000	360.543.345.000
4.2.4	Dana Insentif Daerah	5.000.000.000	7.500.000.000			
4.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	271.816.588.300	428.090.280.291	427.803.107.842	455.576.326.000	457.904.056.000
4.3.1	Dana Hibah					66.422.600.000

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2019	Proyeksi 2020
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	49.596.444.300	50.776.291.917	69.628.393.842	50.000.000.000	53.000.000.000
4.3.4	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	207.413.744.000	301.776.823.000	294.718.224.000	339.153.726.000	338.481.456.000
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	14.806.400.000	-			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.674.585.588.493	1.946.171.826.164	1.973.969.260.503	1.942.842.993.660	1.946.374.451.244

Sumber : BPKAD, 2019, diolah dan Realisasi 2018

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Sintang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada tahun 2020, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 2.014.292.008.403,98 atau menurun sebesar Rp. 47.947.880.917 (2,33%) dari tahun 2019, dengan rincian :

- 1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.282.759.841.412,98
- 2. Belanja langsung sebesar Rp. 731.532.166.991

Adapun realisasi belanja daerah tahun 2016-2018 dan target belanja daerah tahun 2019 serta proyeksi belanja daerah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut ini.

Tabel 3.14
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2019	Proyeksi 2020
5	BELANJA DAERAH	1.743.529.977.056	1.881.665.413.680	1.870.318.612.307	2.062.239.889.320	2.014.292.008.403,98
5.1	Belanja Tidak Langsung	901.934.105.800	1.023.753.420.175	1.077.681.961.433	1.195.321.432.938	1.282.759.841.412,98
5.1.1	Belanja Pegawai	552.414.388.479	562.458.534.536	598.868.631.650	664.523.039.769	710.428.454.654,98
5.1.2	Belanja Subsidi	-	-	-	1.849.459.758	1.849.459.758
5.1.3	Belanja Hibah	37.313.154.559	52.313.235.600	65.337.020.000	55.496.337.000	105.496.337.000
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	159.111.000	8.058.666.000	8.678.788.000	5.112.000.000	5.112.000.000
5.1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.324.712.984	3.325.828.084	3.685.494.841	15.617.006.412	6.150.000.000
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	306.495.571.810	397.590.488.500	400.285.963.400	448.723.590.000	447.390.834.000
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.227.166.968	6.667.455	826.063.54	4.000.000.000	5.000.000.000
5.2	Belanja Langsung	841.595.871.256	857.911.993.504	792.636.650.874		731.532.166.991
5.2.1	Belanja Pegawai	11.825.049.859	28.657.253.004	29.744.636.020	95.870.482.092	95.870.482.092
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	387.057.587.126	394.624.455.367	426.911.124.213	423.101.149.220	92.235.298.151,25
5.2.3	Belanja Modal	442.713.234.271	434.630.285.133	335.980.890.641	347.946.825.070	543426386747,75
	JUMLAH BELANJA	1.743.529.977.056	1.881.665.413.680	1.870.318.612.307	2.062.239.889.321	2.014.292.008.403,98

Sumber : BPKAD, 2019, diolah dan Realisasi 2018

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SilPA) tahun anggaran 2018, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan diarahkan yaitu untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah serta penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku KUMKM.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun 2020 di Kabupaten Sintang antara lain diarahkan untuk:

- 1) Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
- 2) Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya dana cadangan bencana alam;
- 3) Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya pada tahun 2020, diproyeksikan sebesar Rp. 74.894.618.917,98 atau menurun sebesar Rp. 57.052.148.743 (43,24%) dari target tahun 2019. Di samping penerimaan pembiayaan, terdapat pula pengeluaran pembiayaan daerah, yang pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 7.649.331.758 atau mnurun sebesar Rp. 4.900.540.242 (39,05%) dari tahun 2019. Adapun realisasi pembiayaan daerah tahun 2016-2018 serta target tahun 2019 dan proyeksi tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.15.

Tabel 3.15
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2019	Proyeksi 2020
6	PEMBIAYAAN DAERAH	167.469.890.652	167.469.890.652	142.081.563.665	144.496.639.660	66.584.801.159,98
6.1	Penerimaan Pembiayaan	184.707.100.461	184.707.100.461	152.478.933.881	131.946.767.660	74.234.132.917,98

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2019	Proyeksi 2020
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa)	184.707.100.461	184.640.790.311	152.478.159.881	131.946.767.660	74.234.132.917,98
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	17.237.209.809	17.237.209.809	10.397.370.216	12.549.872.000	7.649.331.758
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	17.237.209.809	17.237.209.809	10.397.370.216	12.549.872.000	7.649.331.758
	Pembiayaan Neto	167.469.890.652	167.469.890.652	142.081.563.665	119.396.895.660	66.584.801.159,98
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	98.525.502.089	98.525.502.088	0	0	0

Sumber : BPKAD, 2019, diolah dan Realisasi 2018

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sintang dapat dijelaskan dalam table 4.1. berikut.

Tabel 4.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal	1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal.	1. Meningkatnya angka melek huruf. 2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun. 3. Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat. 4. Meningkatnya kualitas materi ajar budaya dan bahasa lokal dalam kurikulum pendidikan dasar. 5. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi.
2.	Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak serta penduduk miskin. 2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. 3. Meningkatnya prestasi olahraga untuk mendukung pola hidup sehat.
3.	Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur.	1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			2. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya. 3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah) 4. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.
		2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.
4.	Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial	1. Mewujudkan kualitas kehidupan keagamaan, toleran dalam kemajemukan masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama. 2. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama.
5.	Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan.	1. Meningkatnya perekonomian daerah. 2. Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal. 3. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah. 4. Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal. 5. Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat.

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
		2. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa.
6.	Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur.	1. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur daerah. 2. Meningkatnya objektivitas penempatan pejabat daerah.
		2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1. Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.
		3. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.	1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. 3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, stabilitas keamanan, dan ketertiban umum.
		4. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa. 2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020, yaitu “Peningkatan Infrastruktur Dasar, Ekonomi Kreatif, Reformasi Birokrasi Menuju Kabupaten Sintang Yang Berkelanjutan”.

Tabel 4.2

Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	SKPD
[1]	[2]	[3]	
1.	Peningkatan Infrastruktur Dasar	- Program Pendidikan Anak Usia Dini - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Program Pendidikan Non Formal - Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya - Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong - Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi - Program Pengembangan Perumahan - Program Lingkungan Sehat Perumahan - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Disdikbud Disdikbud Disdikbud Dinkes dan RSUD Dinkes dan RSUD Disperindagkop Dinkes dan RSUD DPU dan Perkim DPU dan Perkim DPU dan Perkim Dishub Diskominfo Perkim Perkim LH
2.	Peningkatan Ekonomi Kreatif	- Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah - Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan - Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Program Pembangunan Perkebunan - Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Disperindagkop DKPP DPP DKPP DPP DPP Disnakertran Disnakertran Disporapar

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	SKPD
[1]	[2]	[3]	
3.	Reformasi Birokrasi	- Program Pelayanan Administrasi Kependudukan - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur - Program Peningkatan Akuntabilitas Aparatur - Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan - Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin - Program Pelayanan Rumah Sakit - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pelayanan Manajemen Pendidikan	Disdukcapil DPMPTSP BKPSDM BKPSDM Inspektorat POLPP Dinkes RSUD BKPAD Disdikbud
4.	Sintang Yang Berkelanjutan	- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam - Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - Program Perencanaan Tata Ruang - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	LH LH LH LH LH DPRP DPRP

Disamping prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2020, dalam upaya mewujudkan visi-misi dr. H. Jarot Winarno, M.Med. PH dan Drs. ASKIMAN, MM selaku Bupati dan Wakil Bupati Sintang periode tahun 2016-2021 juga perlu diperkuat dengan menetapkan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah yang terdiri dari: membangun wilayah dari pinggiran, penataan dan pemekaran wilayah, aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan energi lainnya, hilirisasi produk, kegawatdaruratan infrastruktur transportasi, dan tata kelola pemerintahan.

Penjabaran lebih detail tentang penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3

Prime Mover (Penggerak Utama) Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016–2021

NO	PRIME MOVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
1	MEMBANGUN WILAYAH DARI PINGGIRAN	Mengembangkan Wilayah Perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan sebagai penggerak pembangunan wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas public pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil	Melaksanakan berbagai program pembangunan yang dimulai dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil	• Pada bidang transportasi dan prasarana wilayah lainnya, diarahkan untuk membangun, meningkatkan dan memelihara prasarana transportasi. • Pada bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan. • Pada bidang pendidikan di arahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan pendidikan. • Pada bidang aparatur pemerintah di arahkan	• Fungsionalnya sarana dan prasarana transportasi darat dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang. • Tersedianya fasilitas serta prasarana pendidikan padawilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil. • Tersedianya fasilitas serta prasarana kesehatan pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil. • Tersedianya fasilitas serta prasarana pengembangan

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
					pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparatur serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. • Pada bidang ekonomi diarahkan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pembinaan, pelatihan dan penyediaan sarana produksi serta pelatihan ekonomi kreatif. • Pada bidang social budaya diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana kehidupan beragama, pengembangan budaya dan kesenian, pembinaan ideologi; memperkuat poleksosbudhankam.	ekonomi pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil. • Tersedianya fasilitas serta prasarana pemerintahan pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.
2	PENATAAN DAN PEMEKARAN WILAYAH	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui	• Membuka isolasi wilayah • Meningkatkan hasil guna dan daya guna	Percepatan penyelesaian sengketa batas wilayah serta percepatan fasilitasi/	• Melaksanakan dan memfasilitasi sengketa batas wilayah baik antara Desa dan antar Kecamatan dan antar Kabupaten	• Penyelesaian 4 segmen batas wilayah (mungguaklawang-semitau; bongkongbaru – sunsong; Kapuas kiri

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
		penataan dan pemekaran wilayah	pelayanan umum (<i>public service</i>) di Kabupaten Sintang secara optimal. • Terciptanya keseimbangan fungsi dan intensitas penguunaan ruang/wilayah di Kabupaten Sintang. • Terciptanya percepatan pembangunan dan pengaturan perwilayahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang.	pelaksanaan pemekaran wilayah kecamatan, kabupaten dan Provinsi Kapuas Raya.	• Melaksanakan pemekaran wilayah Kecamatan • Memfasilitasi proses pemekaran Kabupaten Baru di Kabupaten Sintang • Memfasilitasi proses pembentukan Provinsi baru di wilayah Timur Kalimantan Barat	hulu – simbak jaya serta merah aria – menukung) • Pembentukan kecamatan baru (15 Kecamatan) • Pembentukan kabupaten Ketungau • Fasilitasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
			• Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Sintang yang diharapkan akan mengeliminir ketimpangan pembangunan perwilayahan. • Terciptanya pemerataan distribusi penduduk pada setiap kawasan/ wilayah di Kabupaten Sintang.			
3	AKSESIBILITAS TERHADAP SUMBER DAYA LISTRIK DAN ENERGI LAINNYA	Terwujudnya akses masyarakat terhadap sumber daya listrik secara memadai	• Memperbaiki kekurangan tenaga listrik yang ada. • Memperbaiki & meningkatkan system ketenagalistrikan, serta	Pengembangan listrik dan jaringannya	• Penambahan kapasitas pembangkit listrik & penambahan jaringan listrik. • Pemanfaatan potensi energy local seperti tenaga air (PLTA & Mikro Hidro) dan batubara, maupun	• Listrik nyala minimal 12 Jam Sehari • Jumlah desa yang dapat dialiri listrik • Jumlah masyarakat yang menikmati listrik

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
			melakukan efisiensi pembangkit, transmisi dan distribusi mulai dari hulu sampai hilir. • Pengaturan sisi konsumsi/ permintaan tenaga listrik melalui upaya penghematan penggunaan tenaga listrik (demand side management). • Mencari dan memanfaatkan sumber-sumber energi baru yang tersedia di daerah seperti halnya Tenaga Air ataupun Tenaga Uap.		pengembangan energi alternatif lainnya.	

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
4	HILIRISASI PRODUK	Meningkatnya kegiatan industri pengolahan berbasis hasil produksi pertanian dan perkebunan, dan berkembangnya kegiatan industri kerajinan/ rumah tangga, serta industri kecil dan menengah disertai pengembangan pasar dan kerjasama pola kemitraan	Terwujudnya keberadaan industri pengolahan berbasis hasil produksi pertanian dan perkebunan, industri kerajinan/ rumah tangga, serta industri kecil dan menengah	- Melaksanakan promosi investasi di bidang industri pengolahan - Perbaikan kualitas dan peningkatan pelayanan perizinan di bidang industri pengolahan. - Melakukan kajian pembentukan BUMD yang bergerak di bidang industri pengolahan.	Pengembangan industri pengolahan dan industri pendukung lainnya, termasuk pengembangan industri kerajinan/ rumah tangga, industri kecil dan menengah.	- Pabrik pengolahan bahan baku karet - Pabrik pengolahan bahan baku sawit - Terbentuknya BUMD yang bergerak di bidang industri pengolahan. - Industri pengolahan aneka makanan dan minuman, termasuk juga pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan buah-buahan lokal/ musiman. - Industri tenun dan anyaman

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
5	KEGAWATDARURATAN INFRASTRUKTUR (TRANSPORTASI)	Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang	Melaksanakan berbagai program dalam rangka penanganan kegawatdaruratan transportasi khususnya dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang.	• Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dari ambalau- sintang • Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dari perbatasan Malaysia-Sintang • Percepatan pembangunan fisik tebelian air port	• Jalan darat dari Ambalau-Sintang fungsional • Jalan darat dari perbatasan Malaysia-Sintang fungsional • Seluruh wilayah kecamatan dapat ditempuh minimal dengan kendaraan minibus • Ruas jalan dalam kondisi rusak berkurang • Operasional bandara tebelian
6.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Menciptakan birokrasi pemerintah Kabupaten Sintang yang professional dengan karakteristik adaptif,	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.	Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik; melakukan penataan dan	• Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi SKPD dengan paradigma dan peran baru.	• Opini BPK (WTP) selama 5 tahun berturut-turut • Semua temuan telah ditindaklanjuti • Semua program selesai dengan baik; • Semua perizinan

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
		berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.		penguatan organisasi tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan public, <i>mind set</i> dan <i>culture set</i> ; mengembangkan mekanisme control yang efektif.		selesai dengan cepat dan tepat; • Komunikasi dengan publik baik; • Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; • Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> secara konsisten dan berkelanjutan;

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Berdasarkan rumusan prioritas pembangunan daerah maka disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada lampiran.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai progress pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun indikator kinerja daerah yang terdiri dari indikator-indikator makro daerah dan indikator-indikator kinerja pembangunan daerah.

6.1. Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020

Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2020 dari indikator-indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Adapun target indikator makro pembangunan daerah tahun 2020 pada tabel 6.1 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.1

Target Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Sintang Tahun 2020

No	Indikator	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,3	5,47	6,5	6,7
2.	Tingkat Pengangguran (%)	3,02	2,34	3,01	3,00
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	10,20	10,35	8,21	7,71
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,00	66,07	67,00	68,00

6.2. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah merupakan akumulasi dari pencapaian indikator *outcome* dari program-program pembangunan daerah setiap tahunnya. Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah tahun 2020 adalah sebagaimana tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2
Target Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target		
			2018	2019	2020
-1	-2	-3	-12	-13	-9
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
01.00	Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
01.01	Pertumbuhan PDRB	%	5,41	5,75	5,92
01.02	Pertumbuhan ekonomi		6,3	6,5	6,7
01.03	Laju Inflasi Kabupaten	%	6,75	6,48	6,87
01.04	PDRB per kapita	Rp. (Juta)	31,3	33,6	35,3
01.05	Indeks Gini	Unit	0,32	0,31	0,31
01.06	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	91,29	91,79	92,29
01.07	Angka kriminalitas yang tertangani	%	65	70	75
01.08	Nilai Indeks Pembangunan Manusia	%	66	67	68
Fokus Kesejahteraan Masyarakat					
01.00	Pendidikan				
01.01	Angka melek huruf	%	91,11	92,04	92,98
01.02	Angka rata-rata lama belajar	Tahun	7,23	7,43	7,63
01.03	Angka partisipasi kasar				
01.03.01	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	%	122,39	122,4	122,41
01.03.02	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	%	101,38	101,39	101,4
01.04	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	5,45	5,7	5,95
01.05	Angka Partisipasi Murni				
01.05.01	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	98,09	98,69	99,29
01.05.02	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	78,99	80,52	82,05
02.00	Kesehatan				
02.01	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 100 kh	974	976	978
02.02	Angka usia harapan hidup	Tahun	71,55	71,85	72,15
02.03	Persentase balita gizi buruk	%	2,5	2,3	2,2
03.00	Pertanahan				
03.01	Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	M2	100.000	100.000	100.000
04.00	Ketenagakerjaan				
04.01	Penduduk yang bekerja	%	76	79	82
Fokus Seni Budaya Dan Olahraga					
01.00	Kebudayaan				
01.01	Jumlah grup kesenian	Grup	35	37	40
01.02	Jumlah gedung	Unit	4	4	5
02.00	Pemuda dan Olahraga				
02.01	a. Jumlah klub olahraga	Klub	428	438	448
	b. Jumlah gedung olahraga	Unit	22	24	26
ASPEK PELAYANAN UMUM					
Fokus Layanan Urusan Wajib					
01.00	Pendidikan dasar				
01.01	Angka partisipasi sekolah	%	98,25	98,55	98,85
01.01.01	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		0,13	0,13	0,13
01.01.02	Rasio guru/ murid		01.29	01.29	01.20
01.01.03	Rasio guru/murid per kelas rata-rata		0,017	0,017	0,017
01.02	Pendidikan menengah				
01.02.01	Angka partisipasi sekolah	%	63,84	68,84	73,84

-1	-2	-3	-12	-13	-9
01.02.02	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah		0,25	0,25	0,25
01.02.03	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jiwa	235.414	236.614	237.814
01.03	Fasilitas Pendidikan				
01.03.01	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	46,83	57,89	68,95
01.03.02	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik	%	51,14	60,76	70,38
01.04	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	64,85	69,9	74,95
01.05	Angka Putus Sekolah :				
01.05.01	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,13	0,8	0,3
01.05.02	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,33	0,28	0,22
01.06	Angka Kelulusan:				
01.06.01	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100
01.06.02	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100
01.06.03	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100
01.06.04	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SM	%	89,01	94	96
01.07	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jiwa	5.051	5.639	6.227
02.00	Kesehatan				
02.01	Rasio posyandu per satuan balita	Per 100 balita	1,11	1,15	1,2
02.02	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	21,19	21,69	22,2
02.03	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	1,01	1,09	1,18
02.04	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	23,21	24,81	26,4
02.05	Rasio paramedis (Perawat dan Bidan) per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	192,11	197,03	201,95
02.06	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	80,24	81,82	83,41
02.07	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	92,75	93,5	94,25
02.08	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	89,56	93,04	96,52
02.09	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100
02.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	75,04	80,02	85,01
02.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100
02.12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	23,32	25,55	27,77
02.13	Cakupan kunjungan bayi	%	83,71	85,8	87,9
02.14	Cakupan puskesmas	%	56,67	62,78	68,89
02.15	Cakupan pembantu puskesmas	%	74,42	76,28	78,14
02.16	Kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen	Tipe	Tipe C	Tipe C	Tipe B
02.17	Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen		Madya	Madya	Utama
03.00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
03.01	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	43,82	49,28	54,74
03.02	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik		49,79	50,21	50,53
03.03	Rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk		01.04,1	01.04,2	01.04,2
03.04	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		39,52	40,71	41,52
03.05	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk		0,325	0,320833333	0,316666667
03.06	Panjang jalan dilalui Roda 4	%	97	99	100
03.07	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	%	99	100	100
03.08	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Km	440,94	460,95	460,97
		%	20,05	20,96	21,87
03.09	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	5,98	6,58	7,24

-1	-2	-3	-12	-13	-9
03.10	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	5.275	5.319	5.353
03.11	Persentase rasio luas areal persawahan yang mendapatkan pengairan dengan memadai/ cukup	%	58,38	58,87	59,24
03.12	Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	30	30	30
03.13	Proporsi Panjang Jembatan Kayu Dalam Kondisi Baik dan Sedang	%	78,58	73,22	67,86
03.14	Banyaknya Jembatan Rangka Baja dan beton	%	21,42	26,78	32,14
		Unit	60	75	90
04.00	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman				
04.01	Rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)	%	5,5	5,8	6,2
04.02	Rumah tangga pengguna listrik	%	70,48	74,96	79,04
04.03	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan PLTS	Unit	250	250	250
04.04	Rumah tangga bersanitasi	%	32,5	35,1	37,1
05.00	Perhubungan				
05.01	Jumlah arus penumpang angkutan Umum	Org	559.227	570.411	581.820
05.02	Jumlah ijin trayek	Trayek	73	74	74
05.03	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	92	96	100
05.04	Jumlah Pelabuhan				
	Laut/Udara/Terminal Bis				
	a. Pelabuhan Sungai	Unit	3	3	3
	b. Pelabuhan Udara	Unit	2	2	2
	c. Terminal Bis	Unit	5	5	5
05.05	Angkutan darat	Unit	365	368	370
05.06	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	39	41	41
05.07	Lama pengujian kelayakan				
	angkutan umum (KIR)	Tahun	0,5	0,5	0,5
05.08	Biaya pengujian kelayakan				
	angkutan umum				
05.08.01	Pengujian Awal				
	a. JBB s.d. 2.500 kg	Rp.	71.000	71.000	71.000
	b. JBB 2.501 s.d. 7.500 kg	Rp.	91.000	91.000	91.000
	c. JBB 7.501 s.d. 14.000 kg	Rp.	111.000	111.000	111.000
	d. JBB > 14.000 kg	Rp.	131.000	131.000	131.000
05.08.02	Pengujian Berkala:				
	JBB s.d. 2.500 kg	Rp.	66.000	66.000	66.000
	JBB 2.501 s.d. 7.500 kg	Rp.	86.000	86.000	86.000
	JBB 7.501 s.d. 14.000 kg	Rp.	106.000	106.000	106.000
	JBB > 14.000 kg	Rp.	126.000	126.000	126.000
05.08.03	Pengujian Penghapusan Kendaraan				
	Kendaraan bermotor beroda 2 (dua)	Rp.	30.000	30.000	30.000
	Kendaraan bermotor beroda 4 (empat)	Rp.	50.000	50.000	50.000
	Kendaraan bermotor beroda 6 (enam)	Rp.	70.000	70.000	70.000
	Kendaraan bermotor lebih dari 6 (enam) roda	Rp.	80.000	80.000	80.000
05.09	Pemasangan Rambu-rambu	%	78,44	85,01	90,1
06.00	Lingkungan Hidup				
06.01	Persentase penanganan sampah	%	70	75	80
06.02	Persentase Penduduk berakses Air minum	%	5,5	5,8	6,2
06.03	Pencemaran status mutu air (14 Sungai)	Status Kondisi	Buruk	Sedang	Sedang
06.04	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	Prushaan	35	40	42
06.05	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	M3	988	1.012	1.036
06.06	Penegakan hukum lingkungan	Kasus	11	12	13
07.00	Pertanahan				

-1	-2	-3	-12	-13	-9
07.01	Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	M2	100.000	100.000	100.000
07.02	Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	M2	400.000	400.000	400.000
07.03	Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	Kasus	10	10	10
07.04	Penyelesaian izin lokasi				
07.04.01	Penyelesaian izin lokasi baru	Izin lokasi	2	2	2
07.04.02	Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	Izin lokasi	9	2	2
08.00	Administrasi Kependudukan dan catatan sipil				
08.01	Kepemilikan KTP Elektronik	Jiwa	271.667	294.917	319.017
08.02	Kepemilikan Kartu Keluarga	Jiwa	234.589	256.889	279.714
08.03	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jiwa	292.035	304.210	317.360
08.04	Kepemilikan Akta Kematian	Jiwa	3.897	4.707	5.557
08.05	Kepemilikan Akta Perkawinan	Jiwa	6.402	8.152	10.202
08.06	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jiwa	8.000	12.000	15.000
08.07	Ketersediaan database kependudukan yang akurat dan terintegrasi	Unit	1	1	1
08.08	Ketersediaan sarana pelayanan langsung (<i>direct service</i>)	Unit	2	2	2
08.09	Sosialisasi dan pembinaan masyarakat	Keg	5	7	12
09.00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
09.01	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Orang	3.394	3.577	3.760
09.02	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Orang	278	308	338
09.03	Rasio KDRT	Kasus	10	8	6
09.04	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Orng	4.216	4.416	04.08.16
09.05	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Kasus	11	8	6
10.00	Pengendalian Penduduk dan KB				
10.01	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jiwa	2,7	2,6	2,6
10.02	Rasio akseptor KB	%	74,6	75,16	75,63
10.03	Cakupan peserta KB aktif	Aseptor	55.892	55.392	55.892
10.04	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	KK	19.389	19.299	19.209
11.00	Sosial				
11.01	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi	Panti Asuhan	8	8	9
11.02	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jiwa	300	330	363
11.03	Penanganan masalah kesejahteraan sosial	Jiwa	121	133	146
12.00	Ketenagakerjaan				
12.01	Angka partisipasi angkatan kerja	%	82,7	85,6	87,09
12.02	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	81,9	83,15	84,7
12.03	Pencari kerja yang ditempatkan	jiwa	175	180	185
12.04	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,02	3,01	3
12.05	Keselamatan dan perlindungan	%	70,7	81,53	92,36
13.00	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
13.01	Persentase koperasi aktif	%	70,96	71,5	72,02
13.02	Jumlah BPR/LKM	Unit	4	4	5
14.00	Penanaman Modal				
14.01	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Buah	214	227	238
14.02	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rp	1.563,78	1.695,20	1.750,25
14.03	Rasio daya serap tenaga kerja	TK	210	215	230
14.04	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Milyar Rp	275	325	450
15.00	Kebudayaan				

-1	-2	-3	-12	-13	-9
15.01	Penyelenggaraan festival seni dan Budaya	even	2	2	2
15.02	Sarana penyelenggaraan seni dan Budaya	Unit	2	2	2
15.03	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	15	15	15
	Jumlah organisasi pemuda		10	10	10
16.00	Kepemudaan dan Olah Raga				
16.01	Jumlah organisasi pemuda		62	65	67
16.02	Jumlah organisasi olahraga		47	49	51
16.03	Jumlah kegiatan kepemudaan		55	60	65
16.04	Jumlah kegiatan olahraga		35	40	45
16.05	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)		7	8	9
16.06	Lapangan olahraga		428	438	448
17.00	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
17.01	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jmlh Ormas	118	118	125
17.02	Kegiatan pembinaan politik daerah	Org	1.850	1.850	2.500
17.03	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		0,85	0,9	1
17.04	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		47	50	55
17.05	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	100	100	100
17.06	Persentase Jumlah Penduduk miskin	%	8,71	8,21	7,71
17.07	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	unit	1	1	1
17.08	Penegakan PERDA	Perda	50	52	54
17.09	Cakupan patroli petugas Satpol PP		300	330	363
17.10	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	80	85	85
17.11	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	Org	4.080	4.090	4.100
17.12	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	WMK	3	4	4
17.13	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	18	17	16
17.14	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	70	75	80
17.15	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Unit	1	1	1
17.16	Prosentase Pengaduan Masyarakt yang ditindaklanjuti pemeriksaan	%	85	88	90
17.17	Prosentase Temuan Hasil Pemeriksanaan yang selesai ditindaklanjuti	%	70	80	90
17.18	Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Jangka Menengah	Buah	16	17	18
17.19	Prosentase Penanganan Pasca Bencana	%	70	80	85
17.20	Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan	Dokumen	2	3	4
18.00	Pangan				
18.01	Regulasi ketahanan pangan	Peraturan	0	0	0
18.02	Ketersediaan pangan utama	%	99	99	100
18.03	Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	80	90	100
18.04	Percepatan Penganeka-ragaman Konsumsi Pangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari	Desa	85	95	100
18.05	Desa Mandiri Pangan (diintervensi bantuan Pemerintah)	Desa	15	16	16
18.06	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	87,9	89,9	91,9
19.00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
19.01	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	91	95	100
19.02	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Tim Rak	407	407	407
19.03	Jumlah LPM	kelompok	8	9	9
19.04	PKK aktif	Tim Rak	407	407	407
19.05	Posyandu aktif		391	391	391

-1	-2	-3	-12	-13	-9
20.00	Statistik				
20.01	Buku ‘Kabupaten Dalam Angka’	Buku	19	20	21
20.02	Buku ‘PDRB’ Kabupaten	Buku	1	1	1
21.00	Arsip				
21.01	Pengelolaan arsip secara baku	%	85	90	95
21.02	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	95	95	95
22.00	Komunikasi dan Informatika				
22.01	Jumlah jaringan komunikasi		119	123	127
22.02	Rasio warnet terhadap Penduduk	%	0,001000403	0,001000403	0,001000403
22.03	Jumlah surat kabar nasional/ lokal		14	16	18
22.04	Jumlah penyiaran radio/TV lokal		8	9	10
22.05	Web site milik pemerintah daerah	ada	21	23	25
22.06	Pameran/expo	ada	2	3	3
23.00	Perpustakaan				
23.01	Jumlah perpustakaan	Unit	66	66	66
23.02	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Org	2.378	2.496	2.620
23.03	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	26.546	28.138	29.846
Fokus Layanan Urusan Pilihan					
01.00	Pertanian				
01.01	Produksi Padi	Ton/Thn	80.898	83.729	87.078
01.02	Produksi Jagung	Ton/Thn	3.158	3.960	3.449
01.03	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	27,94	28,43	28,93
01.04	Produksi Karet	Ton/Thn	54.558	57.286	60.150
01.05	Produksi Kelapa Sawit	Ton/Thn	1.209.418	1.330.360	1.463.396
01.06	Produksi Lada	Ton/Thn	1.227	1.350	1.485
01.07	Tingkat Penggunaan Benih Unggul Karet	%	75	80	85
01.08	Tingkat Penggunaan Benih Unggul Kelapa Sawit rakyat	%	50	60	70
01.09	Produksi Kakao	Ton/Thn	20,3	24,3	28,3
01.10	Produksi Kopi	Ton/Thn	109	112	116
01.11	Produksi peternakan	Ton/Thn	5.767	6.343	6.977
01.12	Luas Kebun				
01.12.01	Luas Kebun Karet	Ha	93.935	94.935	95.935
01.12.02	Luas Kebun Kelapa Sawit	Ha	192.798	212.078	233.286
01.12.03	Luas Kebun Lada	Ha	1.512	1.712	1.912
01.12.04	Luas Kebun Kakao	Ha	325	425	525
01.12.05	Luas Kebun Kopi	Ha	300	400	500
02.00	Kehutanan				
02.01	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	2,46	2,58	2,71
03.00	Energi dan Sumber Daya Mineral				
03.01	Jumlah Penertiban PETI		50	49	48
03.02	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	9,29	9,6	9,9
04.00	Pariwisata				
04.01	Kunjungan wisata	Orang	1.230	1.510	2.280
04.02	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rp.	223 jt	224 jt	225 jt
05.00	Perikanan				
05.01	Produksi perikanan	Ton/Thn	1.912	1.969	2.037
06.00	Perdagangan				
06.01	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,17	17,88	17,92

-1	-2	-3	-12	-13	-9
06.02	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok	40	45	50
07.00	Perindustrian				
07.01	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	10,59	10,73	10,61
07.02	Pertumbuhan Industri	%	3,22	2,85	3,1
07.03	Jumlah industri kecil menengah	IKM	300	330	380
07.04	Cakupan bina kelompok pengerajin	Kelompok	20	22	25
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
01.00	Fokus kemampuan Ekonomi Daerah				
01.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Juta Rp	14,39	16,25	17,98
01.02	Pengeluaran konsumsi non pangan Perkapita	Juta Rp	9,06	10,54	11,3
02.00	Pertanian				
02.01	Nilai Tukar Petani	Poin	101	102	103
Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur					
01.00	Perhubungan				
01.01	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Org	559.227	570.411	581.820
01.02	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Org	559.227	570.411	581.820
02.00	Penataan Ruang				
02.01	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100
02.02	Luas wilayah produktif	Ha	867.018,37	907.018,37	1.007.018,37
02.03	Luas wilayah industri	Ha	900.664,06	890.664,06	970.664,06
02.04	Luas wilayah perkotaan	Ha	156.397	161.997	202.197
03.00	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
03.01	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Unit	42	42	42
03.02	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Unit	6	6	6
03.03	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	Unit	426	448	470
03.04	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Unit	358	362	365
04.00	Lingkungan Hidup				
04.01	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	5,5	5,8	6,2
05.00	Komunikasi dan Informatika				
05.01	Rasio ketersediaan daya listrik		70,48	74,96	79,04
05.02	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	70,48	74,96	79,04
05.03	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan PLTS	Unit	250	250	250
Fokus Iklim Berinvestasi					
01.00	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
01.01	Angka kriminalitas		8,87	7,21	6,38
01.02	Lama proses perijinan				
	SIUP	Hari	5	5	5
	TDP	Hari	5	5	5
	IUI	Hari	14	14	14
	TDI	Hari	5	5	5
	IMB	Hari	21	21	21
	HO	hari	5	5	5
01.03	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jenis	29	29	29
01.04	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	1	1	1
Fokus Sumber Daya Manusia					
01.00	Ketenagakerjaan				
01.01	Rasio lulusan S1/S2/S3		89	94	97

BAB VII

PENUTUP

RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2020 merupakan rencana penjabaran tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, dan berfungsi sangat penting karena menjadi dasar Pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan RPJMD 2016-2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah, Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Sintang berupaya mengoptimalkan peran publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui masukan pokok-pokok pikiran DPRD dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Forum tersebut merupakan wahana bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menghasilkan rumusan rencana kerja yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan Kabupaten Sintang.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sintang sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian tema Pembangunan “Peningkatan infrastruktur dasar, ekonomi kreatif, reformasi birokrasi menuju Kabupaten Sintang yang berkelanjutan”.

BUPATI SINTANG

ttd

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. PH



PEMERINTAH DAERAH
PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN	TARGET 2020
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	149.007.300.244,00
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	57.000.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.500.000.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.500.000.000,00
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	77.007.300.244,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.339.463.095.000,00
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	45.119.712.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	933.800.038.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	360.543.345.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	457.904.056.000,00
4.3.1	Dana Hibah	66.422.600.000,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	53.000.000.000,00
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	338.481.456.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.946.374.451.244,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.281.427.085.412,98
5.1.1	Belanja Pegawai	710.428.454.654,98
5.1.3	Belanja Subsidi	1.849.459.758,00
5.1.4	Belanja Hibah	105.496.337.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.112.000.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	6.150.000.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan desa	447.390.834.000,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	731.532.166.991,00
00	URUSAN UMUM / NON URUSAN	140.345.400.810,00
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	454.649.414.934,00
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	38.232.727.451,00
03	URUSAN PILIHAN	56.062.163.359,00
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	42.242.460.437,00
	JUMLAH BELANJA	2.012.959.252.403,98
	SURPLUS/(DEFISIT)	(66.584.801.159,98)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	74.234.132.917,98
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	74.234.132.917,98
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.649.331.758,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.649.331.758,00
	PEMBIAYAAN NETTO	66.584.801.159,98
	SILPA	0,00



PEMERINTAH DAERAH
REKAPITULASI RKPD PENDAPATAN DAN BELANJA PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	SKPD	USULAN ANGGARAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	TOTAL
1	2	3	4	5	6
010101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	375.222.581.479,98	100.855.080.360,00	476.077.661.839,98
010201	Dinas Kesehatan	15.645.270.759,00	69.075.000.000,00	106.514.568.387,00	175.589.568.387,00
010201	SKPD INDUK	300.000.000,00	69.075.000.000,00	58.711.016.480,00	127.786.016.480,00
01020101	Puskesmas Serawai	1.285.021.435,00	0,00	3.792.895.195,00	3.792.895.195,00
01020102	Puskesmas Kemangai	1.400.498.313,00	0,00	3.151.343.702,00	3.151.343.702,00
01020103	Puskesmas Tebidah	1.158.334.703,00	0,00	3.092.938.270,00	3.092.938.270,00
01020104	Puskesmas Sepauk	1.246.778.958,00	0,00	3.309.290.600,00	3.309.290.600,00
01020105	Puskesmas Tempunak	684.432.340,00	0,00	1.803.028.950,00	1.803.028.950,00
01020106	Puskesmas Jelimpau	243.181.426,00	0,00	1.293.253.200,00	1.293.253.200,00
01020107	Puskesmas Pandan	782.869.450,00	0,00	2.355.543.900,00	2.355.543.900,00
01020108	Puskesmas Sungai Durian	995.572.982,00	0,00	2.863.076.000,00	2.863.076.000,00
01020109	Puskesmas Tanjung Puri	1.243.515.107,00	0,00	2.374.833.000,00	2.374.833.000,00
01020110	Puskesmas Dara Juanti	338.837.642,00	0,00	1.715.488.900,00	1.715.488.900,00
01020111	Puskesmas Dedai	546.166.800,00	0,00	2.042.794.900,00	2.042.794.900,00
01020112	Puskesmas Emparu	331.121.993,00	0,00	1.702.046.000,00	1.702.046.000,00
01020113	Puskesmas Mensiku	561.872.762,00	0,00	1.609.505.250,00	1.609.505.250,00
01020114	Puskesmas Merakai	591.824.636,00	0,00	3.640.772.300,00	3.640.772.300,00
01020115	Puskesmas Nanga Lebang	255.176.905,00	0,00	1.088.442.280,00	1.088.442.280,00
01020116	Puskesmas Nanga Ketungau	353.197.287,00	0,00	1.623.257.664,00	1.623.257.664,00
01020117	Puskesmas Nanga Mau	1.104.910.466,00	0,00	3.143.202.100,00	3.143.202.100,00
01020118	Puskesmas Kebong	638.082.884,00	0,00	2.075.984.700,00	2.075.984.700,00
01020119	Puskesmas Senaning	1.148.963.403,00	0,00	3.268.911.200,00	3.268.911.200,00
01020120	Puskesmas Serangas	434.911.267,00	0,00	1.856.943.796,00	1.856.943.796,00
010202	Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen	51.556.247.449,00	38.553.951.200,00	121.441.746.421,00	159.995.697.621,00
010301	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	8.005.000.000,00	108.713.578.000,00	116.718.578.000,00
010401	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	3.837.700.000,00	61.385.077.000,00	65.222.777.000,00
010501	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	10.129.445.440,00	8.736.412.500,00	18.865.857.940,00
010502	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	1.765.287.520,00	2.295.129.250,00	4.060.416.770,00
010601	Dinas Sosial	0,00	3.154.859.100,00	6.915.250.619,00	10.070.109.719,00
010602	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.489.085.206,00	3.154.533.200,00	4.643.618.406,00
020101	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	3.118.705.335,00	1.995.190.590,00	5.113.895.925,00
020301	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	4.360.721.052,00	24.168.484.720,00	28.529.205.772,00
020401	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	3.518.014.632,00	2.468.075.996,00	5.986.090.628,00
020501	Dinas Lingkungan Hidup	400.000.000,00	12.110.108.825,00	13.304.080.006,00	25.414.188.831,00
020601	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	500.000.000,00	4.439.196.743,00	3.632.327.800,00	8.071.524.543,00
020701	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	4.076.723.040,00	2.187.799.605,00	6.264.522.645,00
020801	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	7.408.593.182,00	9.510.033.000,00	16.918.626.182,00
020901	Dinas Perhubungan	593.855.100,00	3.694.217.981,00	3.981.961.000,00	7.676.178.981,00
021001	Dinas Komunikasi dan Informatika	520.000.000,00	3.079.267.879,00	1.955.125.000,00	5.034.392.879,00
021201	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	900.000.000,00	3.407.206.640,00	2.078.457.000,00	5.485.663.640,00

NO	SKPD	USULAN ANGGARAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	TOTAL
1	2	3	4	5	6
021301	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	100.000.000,00	3.886.127.637,00	4.688.990.200,00	8.575.117.837,00
021701	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	2.594.139.830,00	2.350.028.400,00	4.944.168.230,00
030301	Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	17.002.000.000,00	26.276.950.044,00	43.278.950.044,00
030701	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	986.144.900,00	6.401.768.480,00	9.753.292.000,00	16.155.060.480,00
040101	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	3.981.741.678,00	7.999.646.396,00	11.981.388.074,00
040201	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.856.782.036,00	4.921.515.780,00	6.403.894.250,00	11.325.410.030,00
040203	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	57.749.000.000,00	8.677.617.200,00	6.664.023.157,00	15.341.640.357,00
040301	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	5.696.542.581,00	1.930.866.453,00	7.627.409.034,00
040501	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	1.030.054.040,00	0,00	1.030.054.040,00
040502	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	18.611.848.794,00	0,00	18.611.848.794,00
040503	Sekretariat Daerah	0,00	15.006.885.395,00	38.393.405.070,00	53.400.290.465,00
040504	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	4.268.974.570,00	9.468.875.500,00	13.737.850.070,00
040505	Inspektorat	0,00	6.729.993.091,00	5.943.291.900,00	12.673.284.991,00
040506	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	0,00	2.095.201.339,00	844.596.800,00	2.939.798.139,00
040507	Kantor Kecamatan Kelam Permai	0,00	2.236.464.257,00	759.052.360,00	2.995.516.617,00
040508	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	0,00	1.661.239.025,00	772.641.160,00	2.433.880.185,00
040509	Kantor Kecamatan Tempunak	0,00	2.490.149.560,00	848.636.100,00	3.338.785.660,00
040510	Kantor Kecamatan Dedai	0,00	2.445.176.629,00	1.103.519.120,00	3.548.695.749,00
040511	Kantor Kecamatan Sepauk	0,00	3.085.546.040,00	1.092.599.920,00	4.178.145.960,00
040512	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	0,00	1.570.849.592,00	828.973.800,00	2.399.823.392,00
040513	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	0,00	1.687.131.440,00	945.219.000,00	2.632.350.440,00
040514	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	0,00	1.752.830.240,00	868.770.600,00	2.621.600.840,00
040515	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	0,00	2.427.904.520,00	942.086.000,00	3.369.990.520,00
040516	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	0,00	2.701.378.640,00	848.214.700,00	3.549.593.340,00
040517	Kantor Kecamatan Serawai	0,00	2.429.655.440,00	945.105.050,00	3.374.760.490,00
040518	Kantor Kecamatan Ambalau	0,00	1.852.620.760,00	846.960.680,00	2.699.581.440,00
040519	Kantor Kecamatan Sintang	0,00	14.113.727.360,00	11.497.357.877,00	25.611.085.237,00
040519	SKPD INDUK	0,00	14.113.727.360,00	1.079.569.295,00	15.193.296.655,00
04051901	Kelurahan Tanjung Puri	0,00	0,00	748.457.700,00	748.457.700,00
04051902	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	0,00	0,00	642.450.000,00	642.450.000,00
04051903	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	0,00	0,00	646.028.000,00	646.028.000,00
04051904	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	0,00	0,00	728.855.717,00	728.855.717,00
04051905	Kelurahan Ladang	0,00	0,00	628.000.000,00	628.000.000,00
04051906	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	0,00	0,00	683.997.170,00	683.997.170,00
04051907	Kelurahan Menyumbang Tengah	0,00	0,00	634.000.000,00	634.000.000,00
04051908	Kelurahan Akcaya	0,00	0,00	634.000.000,00	634.000.000,00
04051909	Kelurahan Rawa Mambok	0,00	0,00	634.000.000,00	634.000.000,00
04051910	Kelurahan Mekar Jaya	0,00	0,00	634.000.000,00	634.000.000,00
04051911	Kelurahan Sengkuang	0,00	0,00	634.000.000,00	634.000.000,00
04051912	Kelurahan Mengkurai	0,00	0,00	634.000.000,00	634.000.000,00
04051913	Kelurahan Kedabang	0,00	0,00	634.000.000,00	634.000.000,00
04051914	Kelurahan Ulak Jaya	0,00	0,00	634.000.000,00	634.000.000,00
04051915	Kelurahan Batu Lalau	0,00	0,00	634.000.000,00	634.000.000,00
04051916	Kelurahan Alai	0,00	0,00	633.999.995,00	633.999.995,00
040520	Kantor Kecamatan Bukit Mangat	0,00	1.382.190.500,00	314.315.000,00	1.696.505.500,00

NO	SKPD	USULAN ANGGARAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	TOTAL
1	2	3	4	5	6
040521	Kantor Kecamatan Inggar	0,00	1.382.190.500,00	279.315.000,00	1.661.505.500,00
040522	Kantor Kecamatan Tontang	0,00	1.382.190.500,00	314.315.000,00	1.696.505.500,00
040523	Kantor Kecamatan Sintang Barat	0,00	1.382.190.500,00	314.315.000,00	1.696.505.500,00
040527	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	3.094.943.482,00	2.000.000.000,00	5.094.943.482,00
	JUMLAH	149.007.300.244,00	710.428.454.654,98	731.532.166.991,00	1.441.960.621.645,98

NO	PPKD/SKPKD	USULAN ANGGARAN			
		PENDAPATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	PEMBIAYAAN	
				PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6
040202	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.797.367.151.000,00	570.998.630.758,00	74.234.132.917,98	7.649.331.758,00

NO	REKAPITULASI	JUMLAH USULAN ANGGARAN
1	PENDAPATAN	1.946.374.451.244,00
2	BELANJA DAERAH	2.012.959.252.403,98
	SURPLUS / (DEFISIT)	(66.584.801.159,98)
3	PEMBIAYAAN PENERIMAAN	74.234.132.917,98
4	PEMBIAYAAN PENGELUARAN	7.649.331.758,00
	PEMBIAYAAN NETTO	66.584.801.159,98
	SILPA	0,00



PEMERINTAH DAERAH
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 0101 Pendidikan
SKPD : 010101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		100.255.090.360,00	
0101	Pendidikan		100.255.090.360,00	
0101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		15.725.012.040,00	
0101.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	11.574.000,00	
0101.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	151.320.000,00	
0101.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	82.500.000,00	
0101.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	13.516.000,00	
0101.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	115.625.000,00	
0101.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	68.836.000,00	
0101.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	20.600.000,00	
0101.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	15.180.000,00	
0101.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	22.720.000,00	
0101.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	15.124.661.040,00	
0101.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	98.480.000,00	
0101.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		80.000.000,00	
0101.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	45.000.000,00	
0101.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	35.000.000,00	
0101.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		5.320.000,00	
0101.06.010	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	-	5.320.000,00	
0101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		78.282.459.620,00	
0101.16.087	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) Reguler Bidang Pendidikan SD	-	4.773.112.000,00	
0101.16.088	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) Reguler Bidang Pendidikan SMP	-	3.804.900.000,00	
0101.16.089	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) Affirmasi Bidang Pendidikan SD	-	445.494.000,00	
0101.16.090	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) Affirmasi Bidang Pendidikan SMP	-	760.000.000,00	
0101.16.095	Penyelenggaraan ulangan semester SMP/MTs	-	381.810.000,00	
0101.16.096	Penyelenggaraan ujian SD/MI	-	896.428.500,00	
0101.16.097	Penyelenggaraan ujian SMP/MTs	-	374.795.120,00	
0101.16.098	Penyelenggaraan test hasil belajar SD/MI	-	423.320.000,00	
0101.16.116	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI dan SMP/MTs Reguler	-	66.422.600.000,00	
0101.18	Program Pendidikan Non Formal		5.412.300.000,00	
0101.18.022	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAKNF) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	-	1.857.300.000,00	
0101.18.023	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) Reguler Bidang Pendidikan SKB	-	3.555.000.000,00	
0101.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		749.998.700,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0101.20.020	Pendidikan dan pelatihan calon pengawas	-	250.000.000,00	
0101.20.050	Peningkatan kinerja dan akuntabilitas guru wilayah terpencil	-	499.998.700,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		599.990.000,00	
0216	Kebudayaan		599.990.000,00	
0216.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		599.990.000,00	
0216.16.017	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAKNF) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	-	599.990.000,00	
	JUMLAH Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		100.855.080.360,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		58.606.016.480,00	
0102	Kesehatan		58.606.016.480,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		11.343.402.400,00	
0102.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	5.700.000,00	
0102.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	350.000.000,00	
0102.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	35.000.000,00	
0102.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	85.000.000,00	
0102.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	75.000.000,00	
0102.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	170.000.000,00	
0102.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	30.000.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	10.471.702.400,00	
0102.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	36.000.000,00	
0102.01.027	Pengelolaan administrasi keuangan	-	85.000.000,00	
0102.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		6.160.950.000,00	
0102.02.002	Pembangunan rumah dinas	-	2.300.000.000,00	
0102.02.003	Pembangunan gedung kantor	-	2.000.000.000,00	
0102.02.010	Pengadaan mebeleur	-	1.274.950.000,00	
0102.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	200.000.000,00	
0102.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	16.000.000,00	
0102.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	20.000.000,00	
0102.02.045	Penataan halaman kantor	-	200.000.000,00	
0102.02.204	Sewa rumah	-	150.000.000,00	
0102.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		315.295.000,00	
0102.06.010	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	-	315.295.000,00	
0102.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		10.439.108.030,00	
0102.15.001	Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan	-	10.112.509.830,00	
0102.15.002	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	-	326.598.200,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		11.998.265.000,00	
0102.16.006	Revitalisasi sistem kesehatan	-	80.465.000,00	
0102.16.009	Peningkatan kesehatan masyarakat	-	7.500.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	1.967.000.000,00	
0102.16.014	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	2.383.000.000,00	
0102.16.015	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	-	67.800.000,00	
0102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		774.700.000,00	
0102.20.004	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	-	774.700.000,00	
0102.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		100.000.000,00	
0102.23.009	Penilaian jabatan fungsional kesehatan	-	100.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0102.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		15.411.472.170,00	
0102.25.001	Pembangunan puskesmas	-	10.110.472.170,00	
0102.25.007	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	-	1.370.000.000,00	
0102.25.009	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan	-	500.000.000,00	
0102.25.010	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	-	1.177.000.000,00	
0102.25.024	Akreditasi Puskesmas	-	1.900.000.000,00	
0102.25.025	Pembangunan pagar puskesmas	-	354.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		2.062.823.880,00	
0102.32.001	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	606.750.000,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	1.456.073.880,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		105.000.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		105.000.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		105.000.000,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	65.000.000,00	
0405.24.021	Peringatan hari besar nasional dan daerah	-	40.000.000,00	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		47.803.551.907,00	
0102	Kesehatan		47.803.551.907,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		487.476.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	487.476.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		1.300.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	1.300.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		157.508.400,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	157.508.400,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		1.847.910.795,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	1.847.910.795,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		401.400.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	401.400.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		1.500.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	1.500.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		160.987.320,00	
0102.32.001	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	160.987.320,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		1.088.956.382,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	1.088.956.382,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		636.180.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	636.180.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		1.346.045.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	1.346.045.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		116.203.800,00	
0102.32.00	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari	-	116.203.800,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
3	keluarga kurang mampu	-	116.203.800,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		994.509.470,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	994.509.470,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		617.160.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	617.160.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		1.100.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	1.100.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		237.877.500,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	237.877.500,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		1.354.253.100,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	1.354.253.100,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		514.176.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	514.176.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		800.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	800.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		91.908.750,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	91.908.750,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		396.944.200,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	396.944.200,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		154.740.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	154.740.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		800.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	800.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		130.683.600,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	130.683.600,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		207.829.600,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	207.829.600,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		529.428.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	529.428.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		950.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	950.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		124.646.400,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	124.646.400,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		751.469.500,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	751.469.500,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		891.000.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	891.000.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		850.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	850.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		69.672.000,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	69.672.000,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		1.052.404.000,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	1.052.404.000,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		359.400.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	359.400.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		850.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	850.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		64.261.200,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	64.261.200,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		1.101.171.800,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	1.101.171.800,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		479.400.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	479.400.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		900.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	900.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		52.423.000,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	52.423.000,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		283.665.900,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	283.665.900,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		578.340.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	578.340.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		850.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	850.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		113.288.100,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	113.288.100,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		501.166.800,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	501.166.800,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		441.960.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	441.960.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		750.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	750.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		79.432.800,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	79.432.800,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		430.653.200,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	430.653.200,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		268.044.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	268.044.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		700.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	700.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		95.611.250,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	95.611.250,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		545.850.000,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	545.850.000,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		667.032.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	667.032.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		1.200.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	1.200.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		133.172.000,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	133.172.000,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		1.640.568.300,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	1.640.568.300,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		242.868.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	242.868.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		550.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	550.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		59.154.000,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	59.154.000,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		236.420.280,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	236.420.280,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		323.520.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	323.520.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		800.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	800.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		132.072.000,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	132.072.000,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		367.665.664,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	367.665.664,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		571.260.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	571.260.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		1.058.289.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	1.058.289.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		131.523.000,00	
0102.32.001	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	131.523.000,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		1.382.130.100,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	1.382.130.100,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		561.588.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	561.588.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		700.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	700.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		81.750.000,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	81.750.000,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		732.646.700,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	732.646.700,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		666.200.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	666.200.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		1.350.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	1.350.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		161.040.400,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	161.040.400,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		1.091.670.800,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	1.091.670.800,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		432.420.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	432.420.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		900.000.000,00	
0102.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	-	900.000.000,00	
0102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		105.356.400,00	
0102.32.003	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	-	105.356.400,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		419.167.396,00	
0102.33.001	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas	-	419.167.396,00	
	JUMLAH Dinas Kesehatan		106.514.568.387,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		121.229.446.421,00	
0102	Kesehatan		121.229.446.421,00	
0102.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		9.184.223.977,00	
0102.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	47.499.000,00	
0102.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	1.000.000.000,00	
0102.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	724.645.000,00	
0102.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	7.412.079.977,00	
0102.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		660.000.000,00	
0102.02.010	Pengadaan mebeleur	-	500.000.000,00	
0102.02.204	Sewa rumah	-	160.000.000,00	
0102.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		367.660.000,00	
0102.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	367.660.000,00	
0102.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		1.403.350.000,00	
0102.23.007	Akreditasi Rumah Sakit	-	1.403.350.000,00	
0102.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		260.196.000,00	
0102.24.011	Pelayanan kesehatan bersubsidi	-	260.196.000,00	
0102.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		58.197.769.005,00	
0102.26.001	Pembangunan rumah sakit	-	41.236.014.285,00	
0102.26.015	Pembangunan kamar jenazah	-	1.200.000.000,00	
0102.26.017	Rehabilitasi bangunan rumah sakit	-	12.600.000.000,00	
0102.26.020	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	-	1.461.754.720,00	
0102.26.033	Pembangunan gedung bank darah	-	1.700.000.000,00	
0102.33	Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		51.156.247.439,00	
0102.33.002	Program Badan Layanan Umum Daerah	-	51.156.247.439,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		212.300.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		212.300.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		212.300.000,00	
0405.24.021	Peringatan hari besar nasional dan daerah	-	212.300.000,00	
	JUMLAH Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen		121.441.746.421,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		108.665.307.338,00	
0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		108.665.307.338,00	
0103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.704.065.200,00	
0103.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	2.496.000,00	
0103.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	147.540.000,00	
0103.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	64.960.000,00	
0103.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	2.500.000,00	
0103.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	4.599.500,00	
0103.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	74.275.300,00	
0103.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	25.000.000,00	
0103.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	18.960.000,00	
0103.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	15.000.000,00	
0103.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	444.560.000,00	
0103.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	100.000.000,00	
0103.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	1.754.174.400,00	
0103.01.024	Penataan aset	-	50.000.000,00	
0103.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		115.550.000,00	
0103.02.010	Pengadaan mebeleur	-	35.000.000,00	
0103.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	37.850.000,00	
0103.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	17.700.000,00	
0103.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	10.000.000,00	
0103.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	15.000.000,00	
0103.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		54.402.500,00	
0103.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	54.402.500,00	
0103.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		35.000.400,00	
0103.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	7.000.000,00	
0103.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	5.000.400,00	
0103.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	8.000.000,00	
0103.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	15.000.000,00	
0103.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		56.763.475.000,00	
0103.15.009	Peningkatan jalan (DAKF Penugasan)	-	23.215.275.000,00	
0103.15.012	Pembangunan jembatan (DAKF Reguler)	-	24.748.200.000,00	
0103.15.013	Peningkatan jalan (DAKF Reguler)	-	8.800.000.000,00	
0103.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		100.000.000,00	
0103.16.001	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	-	100.000.000,00	
0103.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		74.999.830,00	
0103.23.010	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	-	25.000.000,00	
0103.23.017	Pengelolaan sarana dan prasarana workshop dan laboratorium	-	24.999.830,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0103.23.018	Monitoring operasional workshop dan laboratorium	-	25.000.000,00	
0103.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		3.452.510.000,00	
0103.24.022	Rehabilitasi jaringan irigasi (DAK Penugasan)	-	3.452.510.000,00	
0103.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		806.585.408,00	
0103.29.003	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	255.790.000,00	
0103.29.004	Penyusunan perencanaan program	-	150.795.408,00	
0103.29.005	Perencanaan teknis jalan kabupaten	-	100.000.000,00	
0103.29.007	Perencanaan teknis pengairan/sumber daya air	-	100.000.000,00	
0103.29.008	Perencanaan teknis jalan desa	-	100.000.000,00	
0103.29.009	Perencanaan teknik drainase dan jembatan	-	100.000.000,00	
0103.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan		44.558.719.000,00	
0103.30.009	Pembangunan jalan (DAKF Afirmasi Transportasi)	-	6.458.719.000,00	
0103.30.013	Pembangunan jalan perdesaan	-	35.000.000.000,00	
0103.30.024	Peningkatan jalan perdesaan (DAKF Afirmasi)	-	1.850.000.000,00	
0103.30.028	Pembangunan Jalan (TMMD)	-	1.250.000.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		48.270.662,00	
0405	Pemerintahan Umum		48.270.662,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		48.270.662,00	
0405.24.016	Peringatan Hari Jadi Kota Sintang	-	15.000.000,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	33.270.662,00	
	JUMLAH Dinas Pekerjaan Umum		108.713.578.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		61.347.837.665,00	
0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		47.070.864.900,00	
0103.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		369.995.900,00	
0103.29.001	Perencanaan pengembangan infrastruktur	-	270.000.000,00	
0103.29.004	Penyusunan perencanaan program	-	99.995.900,00	
0103.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan		46.700.869.000,00	
0103.30.017	Pembangunan jalan lingkungan perdesaan	-	40.000.000.000,00	
0103.30.019	Pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan (DAKF Afirmasi)	-	4.212.816.000,00	
0103.30.020	Pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan (DAKF Reguler)	-	2.488.053.000,00	
0104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		14.276.972.765,00	
0104.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.373.215.565,00	
0104.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	1.140.000,00	
0104.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	79.200.000,00	
0104.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	54.897.000,00	
0104.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	255.000,00	
0104.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	5.969.865,00	
0104.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	65.998.500,00	
0104.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	14.685.000,00	
0104.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	5.973.000,00	
0104.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	14.784.000,00	
0104.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	35.447.600,00	
0104.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	208.765.000,00	
0104.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	144.920.000,00	
0104.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	684.180.600,00	
0104.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	57.000.000,00	
0104.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		4.592.975.000,00	
0104.02.003	Pembangunan gedung kantor	-	4.500.000.000,00	
0104.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	47.000.000,00	
0104.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	23.075.000,00	
0104.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	8.000.000,00	
0104.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	14.900.000,00	
0104.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		45.500.000,00	
0104.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	45.500.000,00	
0104.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		37.807.200,00	
0104.06.008	Penyusunan laporan barang dan inventaris kantor	-	14.997.500,00	
0104.06.011	Penyusunan RKA SKPD	-	11.939.500,00	
0104.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	10.870.200,00	
0104.15	Program Pengembangan Perumahan		3.507.475.000,00	
0104.15.00	Pembangunan sarana dan prasarana rumah	-	3.507.475.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
7	sederhana sehat	-	3.507.475.000,00	
0104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		4.720.000.000,00	
0104.16.014	Pembangunan sanitasi (DAKF Afirmasi)	-	2.920.000.000,00	
0104.16.015	Pembangunan sanitasi (DAKF Penugasan)	-	1.800.000.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		37.239.335,00	
0405	Pemerintahan Umum		37.239.335,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		37.239.335,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	12.500.000,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	24.739.335,00	
	JUMLAH Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		61.385.077.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		7.202.202.500,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		7.202.202.500,00	
0105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.612.681.782,00	
0105.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	6.900.000,00	
0105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	117.600.000,00	
0105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	30.000.000,00	
0105.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	35.216.374,00	
0105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	80.557.136,00	
0105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	60.450.000,00	
0105.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	5.806.000,00	
0105.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	5.400.000,00	
0105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	193.951.000,00	
0105.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	303.400.000,00	
0105.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	2.571.127.200,00	
0105.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	199.996.350,00	
0105.01.023	Penataan dokumen arsip	-	2.277.722,00	
0105.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		872.240.000,00	
0105.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	72.320.000,00	
0105.02.010	Pengadaan mebeleur	-	25.000.000,00	
0105.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	27.540.000,00	
0105.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	253.580.000,00	
0105.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	50.000.000,00	
0105.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	250.080.000,00	
0105.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	30.000.000,00	
0105.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	13.720.000,00	
0105.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	50.000.000,00	
0105.02.045	Penataan halaman kantor	-	100.000.000,00	
0105.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		248.240.000,00	
0105.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	248.240.000,00	
0105.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		514.640.000,00	
0105.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	364.640.000,00	
0105.05.005	Bimbingan teknis kesamaptaaan	-	100.000.000,00	
0105.05.006	Pengembangan SDA POL PP	-	50.000.000,00	
0105.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		12.405.718,00	
0105.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	2.244.250,00	
0105.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	1.999.500,00	
0105.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	2.540.000,00	
0105.06.007	Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	-	3.221.968,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0105.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	2.400.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		94.580.000,00	
0105.15.004	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	-	50.000.000,00	
0105.15.005	Pengendalian keamanan lingkungan	-	44.580.000,00	
0105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		439.415.000,00	
0105.16.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	-	35.815.000,00	
0105.16.006	Pengamanan dan Pengawalan Pejabat VIP	-	250.000.000,00	
0105.16.007	Penertiban Baliho	-	23.600.000,00	
0105.16.008	Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	-	70.000.000,00	
0105.16.012	Patroli	-	60.000.000,00	
0105.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		1.000.000.000,00	
0105.19.002	Monitoring pelaksanaan pemilu	-	940.000.000,00	
0105.19.003	Rapat Koordinasi/Sosialisasi Kepada Kasi Trantib Kecamatan	-	60.000.000,00	
0105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		288.000.000,00	
0105.20.009	Monitoring dan evaluasi penegakan produk hukum	-	50.000.000,00	
0105.20.010	Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran produk hukum	-	138.000.000,00	
0105.20.011	Penyuluhan pencegahan berkembangnya penyakit masyarakat	-	100.000.000,00	
0105.21	Program pendidikan politik masyarakat		120.000.000,00	
0105.21.019	Sosialisasi peraturan daerah kabupaten sintang	-	120.000.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		1.050.000.000,00	
0205	Lingkungan Hidup		1.050.000.000,00	
0205.25	Program Peningkatan Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran		1.050.000.000,00	
0205.25.001	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	100.000.000,00	
0205.25.003	Pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran	-	100.000.000,00	
0205.25.102	Pembentukan Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (BALAKAR)	-	700.000.000,00	
0205.25.103	Penanggulangan kebakaran perumahan/pemukiman dan karhutla	-	150.000.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		484.210.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		484.210.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		320.160.000,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	50.000.000,00	
0405.24.025	Hari ulang tahun POL PP tingkat kabupaten	-	80.000.000,00	
0405.24.026	Hari ulang tahun POL PP tingkat provinsi	-	84.575.000,00	
0405.24.027	Hari Ulang Tahun POL PP tingkat nasional	-	85.585.000,00	
0405.24.028	Upacara peringatan hari jadi kota sintang	-	20.000.000,00	
0405.26	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah		164.050.000,00	
0405.26.004	Pembinaan pengembangan POL PP kecamatan	-	164.050.000,00	
	JUMLAH Satuan Polisi Pamong Praja		8.736.412.500,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		2.295.129.250,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		2.295.129.250,00	
0105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		664.639.400,00	
0105.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	6.170.000,00	
0105.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	34.200.000,00	
0105.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	7.000.000,00	
0105.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	200.000,00	
0105.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	44.986.000,00	
0105.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	33.330.000,00	
0105.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	4.500.000,00	
0105.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	34.960.000,00	
0105.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	183.595.000,00	
0105.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	106.110.000,00	
0105.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	146.990.400,00	
0105.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	49.992.000,00	
0105.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	12.606.000,00	
0105.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		115.700.000,00	
0105.02.010	Pengadaan mebeleur	-	20.000.000,00	
0105.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	32.700.000,00	
0105.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	30.000.000,00	
0105.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	18.000.000,00	
0105.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	15.000.000,00	
0105.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		51.000.000,00	
0105.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	51.000.000,00	
0105.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		69.960.000,00	
0105.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	69.960.000,00	
0105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		135.181.000,00	
0105.16.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	-	135.181.000,00	
0105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan		192.598.500,00	
0105.17.005	Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Perbatasan	-	60.036.000,00	
0105.17.006	Peningkatan Ketahanan Idiologi Negara dan Bela Negara Bagi Generasi Muda	-	86.487.500,00	
0105.17.009	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	-	46.075.000,00	
0105.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		121.378.500,00	
0105.18.005	Pemberdayaan Forum Pembaruan Kebangsaan	-	71.372.500,00	
0105.18.012	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Organisasi dan Lembaga Asing	-	50.006.000,00	
0105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		74.660.800,00	
0105.20.012	Pemberdayaan Tim Terpadu Penangan Gangguan Keamanan Di Daerah	-	74.660.800,00	
0105.21	Program pendidikan politik masyarakat		330.255.350,00	
0105.21.00	Forum Kerukunan Umat Beragama	-	54.096.600,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
6	Forum Kerukunan Umat Beragama	-	54.096.600,00	
0105.21.010	Pemantauan, Penetapan dan Evaluasi Perkembangan Politik	-	65.103.250,00	
0105.21.012	Sosialisasi paket peraturan perundang-undangan bidang politik	-	50.000.000,00	
0105.21.013	Sosialisasi pelaksanaan bantuan keuangan partai politik	-	71.066.500,00	
0105.21.015	Pemberdayaan, pembinaan kepengurusan ormas dan sosialisasi UU dan peraturan pemerintah tentang ormas	-	89.989.000,00	
0105.24	Program Fasilitas Peningkatan Demokrasi dan Pemilu		388.847.700,00	
0105.24.003	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaann demokrasi	-	85.552.100,00	
0105.24.005	Sosialisasi penyelenggaraan pilkada	-	199.970.600,00	
0105.24.007	pemantauan distribusi logistik dan posko penyelenggaraan pilkada	-	103.325.000,00	
0105.25	Program Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Daerah		150.908.000,00	
0105.25.001	Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	-	150.908.000,00	
	JUMLAH Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		2.295.129.250,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		6.715.251.019,00	
0106	Sosial		6.715.251.019,00	
0106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		477.928.820,00	
0106.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	1.002.000,00	
0106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	33.600.000,00	
0106.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	7.800.000,00	
0106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	24.999.700,00	
0106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	12.565.190,00	
0106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	7.157.700,00	
0106.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	3.120.000,00	
0106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	14.000.000,00	
0106.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	89.590.000,00	
0106.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	107.907.000,00	
0106.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	151.190.400,00	
0106.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	16.822.200,00	
0106.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	6.174.630,00	
0106.01.024	Penataan aset	-	2.000.000,00	
0106.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		194.809.999,00	
0106.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	65.610.000,00	
0106.02.010	Pengadaan mebeleur	-	15.000.000,00	
0106.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	44.600.000,00	
0106.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	30.000.000,00	
0106.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	10.000.000,00	
0106.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	23.599.999,00	
0106.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	3.000.000,00	
0106.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	3.000.000,00	
0106.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		20.000.000,00	
0106.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	20.000.000,00	
0106.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		101.270.000,00	
0106.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	101.270.000,00	
0106.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		13.652.900,00	
0106.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	1.919.000,00	
0106.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	1.845.000,00	
0106.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	1.960.800,00	
0106.06.008	Penyusunan laporan barang dan inventaris kantor	-	2.048.500,00	
0106.06.010	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	-	2.010.000,00	
0106.06.011	Penyusunan RKA SKPD	-	1.985.000,00	
0106.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	1.884.600,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		332.251.500,00	
0106.15.006	Bantuan fakir miskin (Rumah Kumuh)	-	125.000.000,00	
0106.15.010	Monitoring dan evaluasi penyaluran bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah	-	75.405.000,00	
0106.15.011	Pembinaan dan Monitoring Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	-	31.847.000,00	
0106.15.012	Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	99.999.500,00	
0106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		204.942.300,00	
0106.16.010	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat cepat dan kejadian luar biasa	-	50.000.900,00	
0106.16.012	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi orang terlantar, punk, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan lain-lain	-	54.955.500,00	
0106.16.013	Pelatihan taruna siaga bencana (Tagana)	-	40.000.000,00	
0106.16.014	Penanganan gangguan jiwa terlantar	-	59.985.900,00	
0106.18	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma		137.447.000,00	
0106.18.003	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	-	68.800.000,00	
0106.18.007	Pembinaan penyandang eks orang dengan gangguan kejiwaan	-	68.647.000,00	
0106.19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo		29.783.000,00	
0106.19.005	Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik	-	29.783.000,00	
0106.20	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		49.978.000,00	
0106.20.009	Bimbingan sosial terhadap keluarga orang dengan gangguan kejiwaan	-	49.978.000,00	
0106.22	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		5.153.187.500,00	
0106.22.001	Penyediaan premi asuransi kesehatan (Jamkesda terintegrasi JKN)	-	4.699.697.500,00	
0106.22.004	Fasilitasi pendamping program keluarga harapan (PKH)	-	373.490.000,00	
0106.22.005	Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan Pemadanan Data Bantuan Sosial (Bansos) PKH, KIS, Ranstra, Lansia dan PMKS	-	80.000.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		199.999.600,00	
0405	Pemerintahan Umum		199.999.600,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		199.999.600,00	
0405.24.005	Peringatan Hari Pahlawan	-	99.998.500,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	25.000.100,00	
0405.24.019	Fasilitasi sarana dan prasarana makam pahlawan	-	75.001.000,00	
		JUMLAH Dinas Sosial	6.915.250.619,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		3.085.419.100,00	
0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		560.541.350,00	
0103.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		150.321.950,00	
0103.16.003	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	-	150.321.950,00	
0103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		410.219.400,00	
0103.18.004	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	-	410.219.400,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		690.814.600,00	
0105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		690.814.600,00	
0105.22.001	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	-	101.370.000,00	
0105.22.004	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	-	94.950.000,00	
0105.22.006	Pendataan dan Pemetaan Daerah Potensi Rawan Bencana	-	89.233.000,00	
0105.22.008	Pembuatan Peta Rawan Bencana	-	20.000.000,00	
0105.22.009	Identifikasi Penilaian Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana	-	100.675.500,00	
0105.22.010	Kajian kebutuhan Pasca Bencana	-	45.107.000,00	
0105.22.011	Posko penanganan darurat/tanggap darurat bencana	-	197.555.000,00	
0105.22.012	Apel siaga pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-	41.924.100,00	
0106	Sosial		1.834.063.150,00	
0106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.081.716.400,00	
0106.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	3.000.000,00	
0106.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	51.960.000,00	
0106.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	9.000.000,00	
0106.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	459.000,00	
0106.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	59.941.000,00	
0106.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	19.562.250,00	
0106.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	17.254.900,00	
0106.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	11.880.000,00	
0106.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	24.035.000,00	
0106.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	417.475.000,00	
0106.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	153.615.000,00	
0106.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	254.533.200,00	
0106.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	50.000.000,00	
0106.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	9.001.050,00	
0106.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		378.100.000,00	
0106.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	200.000.000,00	
0106.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	45.600.000,00	
0106.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	17.450.000,00	
0106.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	88.250.000,00	
0106.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	8.250.000,00	
0106.02.03	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer	-	18.550.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0	dan printer	-	18.550.000,00	
0106.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		21.000.000,00	
0106.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	21.000.000,00	
0106.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		263.618.000,00	
0106.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	206.510.000,00	
0106.05.002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	57.108.000,00	
0106.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		89.628.750,00	
0106.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	3.711.250,00	
0106.06.010	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	-	3.741.250,00	
0106.06.016	Penyusunan standard operating procedure (SOP)	-	78.219.250,00	
0106.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	3.957.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		69.114.100,00	
0405	Pemerintahan Umum		69.114.100,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		69.114.100,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	40.000.000,00	
0405.24.030	Peringatan hari kesiapsiagaan nasional	-	29.114.100,00	
	JUMLAH Badan Penanggulangan Bencana Daerah		3.154.533.200,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		1.807.019.090,00	
0201	Tenaga Kerja		1.807.019.090,00	
0201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		633.397.090,00	
0201.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	4.690.000,00	
0201.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	71.100.000,00	
0201.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	2.750.000,00	
0201.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	31.574.000,00	
0201.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	22.714.090,00	
0201.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	21.390.000,00	
0201.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	4.680.000,00	
0201.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	13.545.000,00	
0201.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	130.412.000,00	
0201.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	123.340.000,00	
0201.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	184.638.000,00	
0201.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	12.300.000,00	
0201.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	8.564.000,00	
0201.01.024	Penataan aset	-	1.700.000,00	
0201.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		298.650.000,00	
0201.02.010	Pengadaan mebeleur	-	11.000.000,00	
0201.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	14.500.000,00	
0201.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	15.000.000,00	
0201.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	27.550.000,00	
0201.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	7.000.000,00	
0201.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	7.000.000,00	
0201.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	216.600.000,00	
0201.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		35.000.000,00	
0201.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	35.000.000,00	
0201.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		193.110.000,00	
0201.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	193.110.000,00	
0201.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		16.357.000,00	
0201.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	1.700.000,00	
0201.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	1.550.000,00	
0201.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	1.550.000,00	
0201.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	1.550.000,00	
0201.06.007	Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	-	2.000.000,00	
0201.06.008	Penyusunan laporan barang dan inventaris kantor	-	2.000.000,00	
0201.06.010	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	-	2.000.000,00	
0201.06.011	Penyusunan RKA SKPD	-	2.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0201.06.015	Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja	-	2.007.000,00	
0201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		80.000.000,00	
0201.15.006	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	-	80.000.000,00	
0201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		299.999.800,00	
0201.16.006	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	-	50.000.000,00	
0201.16.008	Pembinaan dan sertifikasi kelembagaan	-	49.999.800,00	
0201.16.009	Pelayanan para pencari kerja secara online	-	30.160.000,00	
0201.16.010	Administrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA	-	73.544.000,00	
0201.16.011	Pengendalian dan Evaluasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	-	26.456.000,00	
0201.16.012	Penyusunan perencanaan tenaga kerja kabupaten	-	20.320.000,00	
0201.16.013	Surveillance implementasi ISO 9001:2015	-	49.520.000,00	
0201.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		250.505.200,00	
0201.17.002	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	-	82.330.000,00	
0201.17.004	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	-	100.000.000,00	
0201.17.009	Penetapan upah minimum tenaga kerja	-	32.381.000,00	
0201.17.010	Pembentukan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga kerja sama Tripartit	-	18.175.000,00	
0201.17.012	Monitoring pelaksanaan pengupahan dan kepesertaan Jamsostek di Perusahaan	-	17.619.200,00	
03	URUSAN PILIHAN		150.000.000,00	
0308	Transmigrasi		150.000.000,00	
0308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		75.000.000,00	
0308.15.007	Pengembangan Kawasan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi	-	75.000.000,00	
0308.16	Program Transmigrasi Lokal		75.000.000,00	
0308.16.003	Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Lokal Kalimantan	-	75.000.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		38.171.500,00	
0405	Pemerintahan Umum		38.171.500,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		38.171.500,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	38.171.500,00	
	JUMLAH Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1.995.190.590,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		2.137.751.890,00	
0203	Pangan		2.137.751.890,00	
0203.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		953.977.260,00	
0203.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	5.217.000,00	
0203.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	104.400.000,00	
0203.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	14.360.000,00	
0203.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	2.509.600,00	
0203.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	69.873.000,00	
0203.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	26.931.000,00	
0203.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	7.017.000,00	
0203.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	4.320.000,00	
0203.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	39.997.000,00	
0203.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	250.040.000,00	
0203.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	125.000.000,00	
0203.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	304.312.660,00	
0203.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		180.330.000,00	
0203.02.010	Pengadaan mebeleur	-	16.200.000,00	
0203.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	51.560.000,00	
0203.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	39.870.000,00	
0203.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	40.200.000,00	
0203.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	17.500.000,00	
0203.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	15.000.000,00	
0203.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		19.964.000,00	
0203.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	19.964.000,00	
0203.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		110.350.000,00	
0203.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	110.350.000,00	
0203.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		12.999.980,00	
0203.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	3.999.990,00	
0203.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	3.999.990,00	
0203.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	5.000.000,00	
0203.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		263.460.700,00	
0203.15.034	Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Skor Pola Pangan	-	100.000.000,00	
0203.15.049	Pembinaan dan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-	100.000.000,00	
0203.15.053	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan	-	63.460.700,00	
0203.16	Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan		195.000.000,00	
0203.16.004	Koordinasi Pembinaan dan Pemantauan Distribusi Pangan	-	195.000.000,00	
0203.17	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan		24.995.000,00	
0203.17.00	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan	-	24.995.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
1	Keamanan Pangan	-	24.995.000,00	
0203.19	Program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan		376.674.950,00	
0203.19.001	Pemberdayaan Ekonomi dan Gizi Rumah Tangga Melalui Pemanfaatn Lahan Perkarangan	-	186.675.000,00	
0203.19.004	Kordinasi dan Pembinaan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	-	65.000.000,00	
0203.19.005	Gerakan Makan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (B2SA)	-	124.999.950,00	
03	URUSAN PILIHAN		21.980.000.030,00	
0301	Kelautan dan Perikanan		21.980.000.030,00	
0301.20	Program pengembangan budidaya perikanan		21.835.000.000,00	
0301.20.003	Pembinaan dan pengembangan perikanan	-	80.000.000,00	
0301.20.005	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	-	21.000.000.000,00	
0301.20.006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pembudidaya Ikan	-	755.000.000,00	
0301.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		20.000.000,00	
0301.21.008	Pelestarian dan pembinaan potensi sumber daya ikan	-	20.000.000,00	
0301.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		125.000.030,00	
0301.23.002	Pengembangan dan peningkatan konsumsi ikan melalui lomba masak berbahan utama ikan	-	125.000.030,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		50.732.800,00	
0405	Pemerintahan Umum		50.732.800,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		50.732.800,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	29.175.400,00	
0405.24.021	Peringatan hari besar nasional dan daerah	-	21.557.400,00	
JUMLAH Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			24.168.484.720,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		908.238.468,00	
0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		908.238.468,00	
0103.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		33.333.140,00	
0103.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	7.489.300,00	
0103.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	7.498.340,00	
0103.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	9.199.810,00	
0103.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	9.145.690,00	
0103.31	Program Perencanaan Tata Ruang		200.000.000,00	
0103.31.016	Koordinasi perencanaan penataan ruang	-	200.000.000,00	
0103.32	Program Pemanfaatan Ruang		464.989.125,00	
0103.32.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	-	104.989.125,00	
0103.32.020	Persetujuan Siteplan/Rencana Tapak	-	180.000.000,00	
0103.32.021	Penunjang pelayanan Advice Planning/SKRK	-	180.000.000,00	
0103.33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		209.916.203,00	
0103.33.005	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	104.916.210,00	
0103.33.012	Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah	-	104.999.993,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		1.505.300.728,00	
0204	Pertanahan		1.505.300.728,00	
0204.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		914.061.128,00	
0204.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	1.080.000,00	
0204.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	60.000.000,00	
0204.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	8.900.000,00	
0204.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	960.000,00	
0204.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	4.605.000,00	
0204.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	34.893.748,00	
0204.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	6.500.780,00	
0204.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	2.028.000,00	
0204.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	6.480.000,00	
0204.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	9.963.600,00	
0204.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	238.520.000,00	
0204.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	155.854.000,00	
0204.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	369.876.000,00	
0204.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	14.400.000,00	
0204.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		31.000.000,00	
0204.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	27.000.000,00	
0204.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	2.000.000,00	
0204.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	2.000.000,00	
0204.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		375.002.200,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0204.16.003	Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan	-	124.999.800,00	
0204.16.004	Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang	-	80.004.000,00	
0204.16.008	Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang	-	80.000.000,00	
0204.16.012	Pelayanan penerbitan izin, pengendalian penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	89.998.400,00	
0204.17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		121.237.400,00	
0204.17.001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan	-	121.237.400,00	
0204.18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan		64.000.000,00	
0204.18.002	Pemetaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	64.000.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		54.536.800,00	
0405	Pemerintahan Umum		54.536.800,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		54.536.800,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	47.456.800,00	
0405.24.021	Peringatan hari besar nasional dan daerah	-	7.080.000,00	
	JUMLAH Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan		2.468.075.996,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		50.000.000,00	
0104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		50.000.000,00	
0104.20	Program pengelolaan areal pemakaman		50.000.000,00	
0104.20.007	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	-	50.000.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		13.071.244.036,00	
0205	Lingkungan Hidup		13.071.244.036,00	
0205.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4.820.882.311,00	
0205.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	1.290.000,00	
0205.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	150.000.000,00	
0205.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	12.250.000,00	
0205.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	55.350.000,00	
0205.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	6.195.000,00	
0205.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	34.663.681,00	
0205.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	20.440.160,00	
0205.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	10.000.000,00	
0205.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	4.200.000,00	
0205.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	28.037.000,00	
0205.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	438.330.000,00	
0205.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	200.565.000,00	
0205.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	3.821.424.620,00	
0205.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	25.377.000,00	
0205.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	12.759.850,00	
0205.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		93.450.000,00	
0205.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	24.800.000,00	
0205.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	42.900.000,00	
0205.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	14.000.000,00	
0205.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	11.750.000,00	
0205.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		35.350.000,00	
0205.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	35.350.000,00	
0205.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		82.600.000,00	
0205.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	82.600.000,00	
0205.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		22.444.300,00	
0205.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	8.414.000,00	
0205.06.011	Penyusunan RKA SKPD	-	7.967.800,00	
0205.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	6.062.500,00	
0205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		1.591.353.000,00	
0205.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	-	600.000.000,00	
0205.15.016	Pengelolaan kebersihan kota	-	75.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0205.15.020	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAK)	-	842.540.000,00	
0205.15.023	Pengadaan tanah timbunan TPA	-	73.813.000,00	
0205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		351.186.460,00	
0205.16.003	Pemantauan Kualitas Lingkungan	-	50.000.000,00	
0205.16.017	Penunjang layanan laboratorium	-	50.000.000,00	
0205.16.018	Penunjang komisi penilai AMDAL	-	40.001.400,00	
0205.16.019	Pengawasan kualitas lingkungan daerah investasi	-	50.000.000,00	
0205.16.021	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	-	51.186.500,00	
0205.16.022	Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD)	-	50.000.000,00	
0205.16.042	Pelayanan pengaduan kasus dan sengketa lingkungan hidup	-	50.000.000,00	
0205.16.043	Monitoring, evaluasi dan pelaporan UKL-UPL dan AMDAL	-	9.998.560,00	
0205.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		3.212.135.218,00	
0205.17.040	Permbangunan Konservasi Tanah dan Air	-	3.212.135.218,00	
0205.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		233.862.579,00	
0205.19.001	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	-	50.000.000,00	
0205.19.009	Penyusunan pelaporan kegiatan dinas lingkungan hidup	-	33.862.579,00	
0205.19.012	Sosialisasi Peraturan Online Single System	-	150.000.000,00	
0205.22	Program Pengendalian kebakaran hutan		1.992.002.100,00	
0205.22.010	Penyusunan rancangan teknis agroforestry	-	454.260.500,00	
0205.22.011	Pemeliharaan agroforestry	-	1.537.741.600,00	
0205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		200.000.000,00	
0205.24.006	Pemeliharaan RTH	-	200.000.000,00	
0205.26	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan		435.978.068,00	
0205.26.012	Pelatihan pembuatan kompos limbah vegetasi	-	435.978.068,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		182.835.970,00	
0405	Pemerintahan Umum		182.835.970,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		182.835.970,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	42.337.500,00	
0405.24.020	Peringatan Hari Lingkungan Hidup se Dunia	-	140.498.470,00	
	JUMLAH Dinas Lingkungan Hidup		13.304.080.006,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		3.582.279.908,00	
0206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.567.278.408,00	
0206.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		887.542.360,00	
0206.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	4.000.000,00	
0206.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	141.550.000,00	
0206.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	8.800.000,00	
0206.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	600.000,00	
0206.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	112.305.720,00	
0206.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	17.014.240,00	
0206.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	63.720.000,00	
0206.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	5.000.000,00	
0206.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	4.800.000,00	
0206.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	15.207.600,00	
0206.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	103.295.000,00	
0206.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	406.449.800,00	
0206.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	4.800.000,00	
0206.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		129.640.000,00	
0206.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	20.000.000,00	
0206.02.010	Pengadaan mebeleur	-	12.000.000,00	
0206.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	31.980.000,00	
0206.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	10.000.000,00	
0206.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	10.000.000,00	
0206.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	30.160.000,00	
0206.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	8.000.000,00	
0206.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	7.500.000,00	
0206.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		80.320.000,00	
0206.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	80.320.000,00	
0206.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		39.850.631,00	
0206.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	5.000.000,00	
0206.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	5.000.000,00	
0206.06.007	Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	-	5.000.000,00	
0206.06.011	Penyusunan RKA SKPD	-	5.000.000,00	
0206.06.017	Penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT)	-	5.000.000,00	
0206.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	14.850.631,00	
0206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		2.429.925.417,00	
0206.15.003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	-	70.254.750,00	
0206.15.009	Pengembangan data base kependudukan	-	59.587.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0206.15.012	Sosialisasi kebijakan kependudukan	-	68.998.150,00	
0206.15.015	Pelaksanaan e-KTP	-	65.000.000,00	
0206.15.016	Pengelolaan administrasi peristiwa kependudukan berbasis aplikasi SIAK	-	59.587.000,00	
0206.15.017	Penyusunan profil kependudukan	-	36.799.540,00	
0206.15.019	Pembinaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	-	20.072.477,00	
0206.15.020	Penataan administrasi kependudukan pada desa/kelurahan pemekaran	-	59.450.000,00	
0206.15.022	Pelaksanaan kartu identitas anak (KIA)	-	58.000.000,00	
0206.15.026	Monitoring dan evaluasi kepemilikan akta kelahiran usia 0 - 18 tahun	-	143.261.800,00	
0206.15.027	Pembinaan prosedur dan tata cara pencatatan sipil	-	57.214.400,00	
0206.15.028	Kerjasama penataan administrasi kependudukan	-	45.002.700,00	
0206.15.029	Penataan dokumentasi dan pemanfaatan data administrasi	-	65.994.600,00	
0206.15.030	Monitoring dan evaluasi aplikasi SIAK	-	40.144.300,00	
0206.15.036	Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	-	29.966.800,00	
0206.15.038	Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	-	81.690.700,00	
0206.15.040	Pendaftaran dan Pendataan penduduk Warga Negara Asing	-	50.000.000,00	
0206.15.050	Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan (DAKNF)	-	740.742.550,00	
0206.15.051	Pelayanan langsung akta catatan sipil (DAKNF)	-	270.041.000,00	
0206.15.052	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) (DAKNF)	-	48.000.000,00	
0206.15.053	Penyusunan buku data penduduk per semester (DAKNF)	-	22.189.450,00	
0206.15.055	Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (DAKNF)	-	55.963.200,00	
0206.15.056	Koordinasi administrasi kependudukan (DAKNF)	-	221.455.000,00	
0206.15.057	Bimbingan teknis administrasi kependudukan (DAKNF)	-	37.520.000,00	
0206.15.058	Pembinaan Administrasi Kependudukan Dalam Daerah	-	22.990.000,00	
0216	Kebudayaan		15.001.500,00	
0216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		15.001.500,00	
0216.15.019	Gawai Dayak	-	15.001.500,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		50.047.892,00	
0405	Pemerintahan Umum		50.047.892,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		50.047.892,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	35.047.892,00	
0405.24.016	Peringatan Hari Jadi Kota Sintang	-	15.000.000,00	
	JUMLAH Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.632.327.800,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		2.162.800.705,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		2.162.800.705,00	
0207.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		857.336.805,00	
0207.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	942.000,00	
0207.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	54.360.000,00	
0207.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	10.700.000,00	
0207.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	400.000,00	
0207.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	22.104.000,00	
0207.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	4.389.000,00	
0207.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	4.485.800,00	
0207.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	9.720.000,00	
0207.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	10.925.000,00	
0207.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	163.896.000,00	
0207.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	173.035.000,00	
0207.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	387.799.800,00	
0207.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	10.715.000,00	
0207.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	3.865.205,00	
0207.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		223.520.000,00	
0207.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	35.000.000,00	
0207.02.010	Pengadaan mebeleur	-	25.000.000,00	
0207.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	25.000.000,00	
0207.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	25.000.000,00	
0207.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	38.520.000,00	
0207.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	25.000.000,00	
0207.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	25.000.000,00	
0207.02.045	Penataan halaman kantor	-	25.000.000,00	
0207.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		52.350.000,00	
0207.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	52.350.000,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		49.639.500,00	
0207.15.008	Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kades Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	-	24.999.500,00	
0207.15.011	Kompetisi desa dan kader desa dalam upaya pencegahan stunting	-	24.640.000,00	
0207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		125.284.870,00	
0207.16.008	Gelar teknologi tepat guna	-	25.270.000,00	
0207.16.015	Pengembangan Kawasan Perdesaan	-	25.015.000,00	
0207.16.016	Pembinaan P2EMAS	-	24.999.870,00	
0207.16.017	Pembinaan, monitoring dan evaluasi BUMDES	-	25.000.000,00	
0207.16.018	Pembinaan program pos pelayanan teknologi tepat guna	-	25.000.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		364.020.260,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0207.17.010	Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat	-	24.190.000,00	
0207.17.015	Penilaian lomba desa tingkat Kabupaten	-	54.950.000,00	
0207.17.027	Penetapan patok batas wilayah desa	-	24.760.000,00	
0207.17.028	Penegasan batas wilayah desa	-	54.805.000,00	
0207.17.031	Pembinaan dan evaluasi pemekaran desa dan dusun	-	46.695.760,00	
0207.17.032	Pembinaan, penataan dan evaluasi tingkat perkembangan desa	-	54.570.000,00	
0207.17.039	Asistensi profil desa	-	54.145.000,00	
0207.17.040	Sosialisasi terkait regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa	-	25.000.000,00	
0207.17.041	Unit pengelolaan penanganan pengaduan bantuan sosial beras sejahtera	-	19.905.000,00	
0207.17.043	Pembinaan desa mandiri	-	4.999.500,00	
0207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		349.187.470,00	
0207.18.005	Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	-	54.998.500,00	
0207.18.006	Rapat kerja Camat dengan Lurah/Kades	-	24.999.870,00	
0207.18.008	Bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	-	19.998.500,00	
0207.18.009	Tim satuan tugas pengelolaan dana desa	-	55.000.000,00	
0207.18.010	Tim pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes/perubahan Perdes tentang APBDes	-	54.999.500,00	
0207.18.011	Monitoring, evaluasi, pembinaan, pelaksanaan dan pelaporan aset desa	-	54.169.000,00	
0207.18.012	Pelaksanaan pengambilan sumpah janji dan pelantikan kepala desa, pimpinan dan anggota BPD	-	10.051.000,00	
0207.18.013	Rapat kerja ketua BPD	-	24.972.800,00	
0207.18.014	Pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja perangkat desa	-	25.000.300,00	
0207.18.015	Monitoring dan evaluasi kinerja BPD	-	24.998.000,00	
0207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		89.992.300,00	
0207.20.003	Sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan desa	-	4.999.600,00	
0207.20.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	-	54.998.500,00	
0207.20.007	Sekretariat bersama penanganan, pengawasan dan pencegahan permasalahan dana desa	-	24.995.000,00	
0207.20.009	Bimbingan teknis penatausahaan keuangan desa	-	4.999.200,00	
0207.21	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan		51.469.500,00	
0207.21.001	Sosialisasi dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak	-	26.624.500,00	
0207.21.002	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)	-	24.845.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		24.998.900,00	
0405	Pemerintahan Umum		24.998.900,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		24.998.900,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	19.998.900,00	
0405.24.021	Peringatan hari besar nasional dan daerah	-	5.000.000,00	
	JUMLAH Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		2.187.799.605,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		9.473.172.000,00	
0202	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak		1.339.444.688,00	
0202.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		689.492.390,00	
0202.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	3.000.000,00	
0202.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	60.000.000,00	
0202.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	15.050.000,00	
0202.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	20.000.000,00	
0202.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	6.650.040,00	
0202.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	5.020.000,00	
0202.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1.020.000,00	
0202.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	18.468.000,00	
0202.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	228.580.000,00	
0202.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	282.720.000,00	
0202.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	40.000.000,00	
0202.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	8.984.350,00	
0202.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		509.952.298,00	
0202.15.004	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	40.414.160,00	
0202.15.005	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	-	45.489.342,00	
0202.15.006	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	-	42.933.149,00	
0202.15.007	Sosialisasi Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Kabupaten Sintang	-	50.625.030,00	
0202.15.009	Sosialisasi Program Nasional Bagi Anak Indonesia	-	56.864.223,00	
0202.15.010	Jejaring Forum Anak Daerah	-	28.005.854,00	
0202.15.011	Sosialisasi Hak-Hak Anak Sesuai Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak	-	19.957.854,00	
0202.15.012	Forum Anak Daerah Kabupaten Sintang	-	75.244.770,00	
0202.15.014	Hari Anak Nasional Kabupaten Sintang	-	44.597.708,00	
0202.15.015	Apresiasi Anak Daerah	-	52.507.708,00	
0202.15.016	Pembinaan dan Penyuluhan Stunting Pada Kecamatan	-	53.312.500,00	
0202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		50.000.000,00	
0202.16.010	Pengarusutamaan Gender	-	50.000.000,00	
0202.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		70.000.000,00	
0202.17.010	Kegiatan GMS dan Minigrant	-	35.000.000,00	
0202.17.011	Kegiatan Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu	-	35.000.000,00	
0202.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		20.000.000,00	
0202.18.007	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-	20.000.000,00	
0208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		8.133.727.312,00	
0208.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		214.150.000,00	
0208.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	75.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0208.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	49.000.000,00	
0208.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	80.150.000,00	
0208.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	5.000.000,00	
0208.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	5.000.000,00	
0208.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		65.630.000,00	
0208.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	65.630.000,00	
0208.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		11.820.000,00	
0208.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	5.910.000,00	
0208.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	5.910.000,00	
0208.15	Program Keluarga Berencana		5.326.741.472,00	
0208.15.004	Promosi Pelayanan Khibra	-	40.000.000,00	
0208.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana	-	95.350.000,00	
0208.15.007	Operasional pembinaan program KB oleh Kader	-	2.523.017.492,00	
0208.15.008	Dukungan media KIE dan Manajemen BOKB	-	559.650.000,00	
0208.15.009	Penyebaran Informasi Program KB melalui Mupen	-	29.994.000,00	
0208.15.010	Konsultasi dan rapat penyusunan Program KB/KS keluar Daerah Kabupaten	-	49.875.000,00	
0208.15.011	Penyebaran Informasi melalui media penyiaran/Interaktif	-	5.000.000,00	
0208.15.012	Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana	-	1.190.013.000,00	
0208.15.013	Distribusi alat dan obat kontrasepsi	-	50.000.000,00	
0208.15.016	Pengadaan Sarana Komunikasi Penyuluh KB	-	150.000.000,00	
0208.15.018	Pengadaan Kendaraan Operasional Bidang Keluarga Berencana (DAKF)	-	380.000.000,00	
0208.15.020	Pembinaan, monitoring SSK dan pojok kependudukan kampung KB	-	22.646.000,00	
0208.15.021	Sosialisasi pendidikan kependudukan bagi kader kampung KB	-	54.905.800,00	
0208.15.023	Pengadaan sarana kerja PPKBD	-	82.050.000,00	
0208.15.024	Penilaian Angka Kredit PLKB	-	13.540.180,00	
0208.15.025	Implan removal kit	-	39.700.000,00	
0208.15.027	Pengadaan IUD Kit	-	41.000.000,00	
0208.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja		190.000.000,00	
0208.16.001	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	-	60.000.000,00	
0208.16.003	Pembinaan Saka Kencana dan Pemilihan Duta GenRe Kabupaten Sintang	-	30.000.000,00	
0208.16.004	Pelatihan pendidikan sebaya bagi Remaja di Kabupaten Sintang	-	60.000.000,00	
0208.16.005	Pusat informasi dan konseling/PIK	-	40.000.000,00	
0208.17	Program pelayanan kontrasepsi		168.999.450,00	
0208.17.002	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	-	39.999.450,00	
0208.17.005	Pelayanan kontrasepsi mobile (MOYAN)	-	129.000.000,00	
0208.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		2.012.026.390,00	
0208.18.001	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	-	1.628.810.000,00	
0208.18.002	Pembinaan pencatatan dan pelaporan Program KB pada masyarakat pedesaan	-	50.059.940,00	
0208.18.003	Tim Manunggal TNI-KB-Kesehatan	-	45.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0208.18.004	Bulan bhakti Bhayangkara	-	45.000.000,00	
0208.18.005	Kegiatan Gerak PKK-KB-Kesehatan	-	45.000.000,00	
0208.18.006	Pelatihan manajemen usaha bagi pengurus kelompok UPPKS	-	30.000.000,00	
0208.18.009	Lomba pengelola KB teladan	-	23.514.600,00	
0208.18.010	Rapat Kerja Daerah Program KB, PP dan PA	-	39.999.900,00	
0208.18.011	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Dalduk Keluar Daerah	-	53.540.000,00	
0208.18.013	Evaluasi dan Monitoring Data KB di Kecamatan	-	51.101.950,00	
0208.22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		64.360.000,00	
0208.22.001	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	-	23.860.000,00	
0208.22.002	Pengadaan BKB Kit	-	40.500.000,00	
0208.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga		40.000.000,00	
0208.23.001	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	-	40.000.000,00	
0208.24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU		40.000.000,00	
0208.24.001	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	-	40.000.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		36.861.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		36.861.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		36.861.000,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	36.861.000,00	
	JUMLAH Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		9.510.033.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		257.312.100,00	
0101	Pendidikan		257.312.100,00	
0101.23	Program Pendidikan Tinggi		257.312.100,00	
0101.23.003	Kerjasama pemerintah daerah dengan sekolah tinggi transportasi darat	-	257.312.100,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		3.724.648.900,00	
0209	Perhubungan		3.724.648.900,00	
0209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.065.055.300,00	
0209.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	2.690.000,00	
0209.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	121.872.000,00	
0209.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	15.578.000,00	
0209.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	480.000,00	
0209.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	60.070.700,00	
0209.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	28.262.500,00	
0209.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	4.316.000,00	
0209.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	4.380.000,00	
0209.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	36.225.000,00	
0209.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	319.442.000,00	
0209.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	122.204.500,00	
0209.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	303.504.600,00	
0209.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	39.551.000,00	
0209.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	6.479.000,00	
0209.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		174.560.000,00	
0209.02.010	Pengadaan mebeleur	-	7.900.000,00	
0209.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	42.000.000,00	
0209.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	13.800.000,00	
0209.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	78.060.000,00	
0209.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	9.000.000,00	
0209.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	23.800.000,00	
0209.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		162.260.000,00	
0209.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	162.260.000,00	
0209.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		6.775.400,00	
0209.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	1.522.400,00	
0209.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	2.372.700,00	
0209.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	2.880.300,00	
0209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		30.000.000,00	
0209.16.004	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	-	30.000.000,00	
0209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan		440.068.200,00	
0209.17.002	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	-	4.790.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0209.17.006	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	-	29.960.000,00	
0209.17.010	Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah	-	44.895.000,00	
0209.17.013	Fasilitas perijinan di bidang perhubungan	-	197.350.000,00	
0209.17.014	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	-	2.710.000,00	
0209.17.015	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	-	24.570.000,00	
0209.17.017	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	8.615.000,00	
0209.17.018	Pembinaan pelajar pelopor lalu lintas dan angkutan jalan	-	37.798.200,00	
0209.17.019	Pengawasan terhadap kelengkapan dokumen dan sarana keselamatan kapal angkutan sungai	-	55.105.000,00	
0209.17.020	Pengumpulan dan analisis data kepelabuhanan	-	20.000.000,00	
0209.17.021	Pembinaan dan penyuluhan keselamatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan	-	14.275.000,00	
0209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		1.188.775.000,00	
0209.18.004	Pembangunan Terminal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	-	83.775.000,00	
0209.18.005	Pembangunan Terminal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DAKF)	-	1.105.000.000,00	
0209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas		657.155.000,00	
0209.19.004	Kegiatan Pengendalian Disiplin Perlengkapan Kendaraan di Jalan	-	41.420.000,00	
0209.19.006	Pengendalian dan Pengawasan Wilayah Perairan Daratan	-	15.735.000,00	
0209.19.007	Pemeliharaan alat pemberi isyarat	-	70.000.000,00	
0209.19.009	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAKF)	-	200.000.000,00	
0209.19.020	Pengadaan pagar pengaman jalan (DAKF)	-	300.000.000,00	
0209.19.021	Pemeliharaan rambu - rambu lalu lintas	-	30.000.000,00	
	JUMLAH Dinas Perhubungan		3.981.961.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		1.899.925.000,00	
0210	Komunikasi dan Informatika		1.699.924.500,00	
0210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		818.844.500,00	
0210.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	1.100.000,00	
0210.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	75.760.000,00	
0210.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	4.500.000,00	
0210.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	9.750.000,00	
0210.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	63.000.000,00	
0210.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	22.261.800,00	
0210.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	3.300.000,00	
0210.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	5.400.000,00	
0210.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	6.325.000,00	
0210.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	122.672.700,00	
0210.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	37.000.000,00	
0210.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	455.175.000,00	
0210.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	5.000.000,00	
0210.01.023	Penataan dokumen arsip	-	3.800.000,00	
0210.01.024	Penataan aset	-	3.800.000,00	
0210.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		57.000.000,00	
0210.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	57.000.000,00	
0210.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		122.740.000,00	
0210.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	122.740.000,00	
0210.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		19.500.000,00	
0210.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	4.500.000,00	
0210.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	3.500.000,00	
0210.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	3.500.000,00	
0210.06.008	Penyusunan laporan barang dan inventaris kantor	-	3.500.000,00	
0210.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	4.500.000,00	
0210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		531.840.000,00	
0210.15.014	Pengadaan dan Pengembangan Jaringan Internet Publik (Hotspot Publik)	-	100.000.000,00	
0210.15.027	Pengelolaan dan Penyelenggaraan PPID Pemerintah Daerah	-	183.656.000,00	
0210.15.028	Pembentukan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	47.794.000,00	
0210.15.031	Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Bidang Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	50.390.000,00	
0210.15.032	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah	-	36.000.000,00	
0210.15.034	Pemeliharaan rutin/berkala website sintang.go.id	-	50.000.000,00	
0210.15.039	Penyelenggaraan e-Government Kecamatan se-Kabupaten Sintang	-	31.500.000,00	
0210.15.041	Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	-	32.500.000,00	
0210.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		50.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0210.17.001	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	-	50.000.000,00	
0210.19	Pengawasan dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika		100.000.000,00	
0210.19.001	Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (BTS)	-	61.735.000,00	
0210.19.002	Pengelolaan dan Pendataan Menara Telekomunikasi (BTS)	-	38.265.000,00	
0214	Statistik		100.000.000,00	
0214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		100.000.000,00	
0214.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	-	100.000.000,00	
0215	Persandian		100.000.500,00	
0215.15	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		100.000.500,00	
0215.15.002	Monitoring dan Pemeliharaan Peralatan Radio Kecamatan	-	36.910.500,00	
0215.15.003	Pengelolaan dan Pengembangan Persandian	-	63.090.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		55.200.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		55.200.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		55.200.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	10.200.000,00	
0405.24.002	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	-	25.000.000,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	20.000.000,00	
	JUMLAH Dinas Komunikasi dan Informatika		1.955.125.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		2.031.752.000,00	
0212	Penanaman Modal		2.031.752.000,00	
0212.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		688.863.000,00	
0212.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	2.000.000,00	
0212.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	79.830.000,00	
0212.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	5.700.000,00	
0212.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	1.953.000,00	
0212.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	20.000.000,00	
0212.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	12.200.000,00	
0212.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	3.700.000,00	
0212.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	4.440.000,00	
0212.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	23.598.000,00	
0212.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	150.600.000,00	
0212.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	81.200.000,00	
0212.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	278.457.000,00	
0212.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	14.295.000,00	
0212.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	10.890.000,00	
0212.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		189.922.000,00	
0212.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	37.500.000,00	
0212.02.010	Pengadaan mebeleur	-	12.000.000,00	
0212.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	18.000.000,00	
0212.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	9.000.000,00	
0212.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	17.500.000,00	
0212.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	5.000.000,00	
0212.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	6.500.000,00	
0212.02.045	Penataan halaman kantor	-	84.422.000,00	
0212.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		138.987.000,00	
0212.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	99.600.000,00	
0212.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	39.387.000,00	
0212.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		13.980.000,00	
0212.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	3.780.000,00	
0212.06.011	Penyusunan RKA SKPD	-	6.200.000,00	
0212.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	4.000.000,00	
0212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		250.000.000,00	
0212.15.010	Penyelenggaraan pameran investasi	-	90.000.000,00	
0212.15.015	Pemutakhiran data dan informasi pada aplikasi SIPID	-	60.000.000,00	
0212.15.016	Penyelenggaraan forum/pertemuan bisnis	-	50.000.000,00	
0212.15.01	Pembuatan materi promosi investasi	-	50.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
8	Pembuatan materi promosi investasi	-	50.000.000,00	
0212.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		119.178.700,00	
0212.16.010	Optimalisasi Perencanaan Penanaman Modal	-	45.000.000,00	
0212.16.011	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	-	74.178.700,00	
0212.17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah		80.000.000,00	
0212.17.002	Kajian pengembangan penanaman modal sektor pariwisata	-	80.000.000,00	
0212.18	Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi		50.821.300,00	
0212.18.001	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	50.821.300,00	
0212.19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan		500.000.000,00	
0212.19.001	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan A/I	-	125.000.000,00	
0212.19.002	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan A/II	-	125.000.000,00	
0212.19.004	Penyusunan SOP pelayanan perizinan dan non perizinan	-	62.500.000,00	
0212.19.005	Monitoring pelayanan perizinan dan non perizinan	-	62.500.000,00	
0212.19.006	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	-	61.200.000,00	
0212.19.007	Penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	-	25.000.000,00	
0212.19.008	Penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan	-	38.800.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		46.705.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		46.705.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		46.705.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	20.785.000,00	
0405.24.016	Peringatan Hari Jadi Kota Sintang	-	5.200.000,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	20.720.000,00	
	JUMLAH Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2.078.457.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		3.866.194.738,00	
0213	Kepemudaan dan Olah Raga		3.866.194.738,00	
0213.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.342.645.520,00	
0213.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	3.150.000,00	
0213.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	99.000.000,00	
0213.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	5.000.000,00	
0213.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	2.880.000,00	
0213.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	7.268.860,00	
0213.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	48.820.500,00	
0213.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	23.896.400,00	
0213.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	10.475.000,00	
0213.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	13.474.560,00	
0213.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	44.860.000,00	
0213.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	433.710.000,00	
0213.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	97.560.000,00	
0213.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	539.590.200,00	
0213.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	12.960.000,00	
0213.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		58.300.000,00	
0213.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	27.000.000,00	
0213.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	13.200.000,00	
0213.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	18.100.000,00	
0213.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		52.360.000,00	
0213.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	52.360.000,00	
0213.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		111.130.000,00	
0213.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	111.130.000,00	
0213.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		30.146.100,00	
0213.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	9.522.700,00	
0213.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	10.175.600,00	
0213.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	10.447.800,00	
0213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan		1.035.883.200,00	
0213.16.010	Seleksi calon peserta Paskibraka	-	77.784.000,00	
0213.16.011	Pendidikan dan pelatihan Paskibraka	-	725.429.100,00	
0213.16.012	Lomba pidato dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda	-	34.895.750,00	
0213.16.013	Perlombaan olahraga peringatan Hari Olahraga Nasional	-	81.308.000,00	
0213.16.015	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	-	50.586.500,00	
0213.16.017	Peringatan Hari Olahraga Nasional	-	30.984.100,00	
0213.16.021	Lomba Busana Nusantara Peringatan Hari Sumpah Pemuda	-	34.895.750,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0213.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		85.000.000,00	
0213.17.002	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	-	85.000.000,00	
0213.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba		21.852.000,00	
0213.18.002	Pemberian penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS bagi pemuda	-	21.852.000,00	
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		891.809.400,00	
0213.20.018	Pelaksanaan pertandingan/perlombaan olahraga pada peringatan Hari Besar Nasional	-	72.337.500,00	
0213.20.020	Training Center (TC) dan seleksi atlet POPDA	-	164.411.000,00	
0213.20.021	Pekan olahraga pelajar daerah (POPDA)	-	424.570.900,00	
0213.20.041	Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup	-	230.490.000,00	
0213.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		237.068.518,00	
0213.21.006	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	-	237.068.518,00	
03	URUSAN PILIHAN		741.455.462,00	
0302	Pariwisata		741.455.462,00	
0302.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		275.481.200,00	
0302.15.005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	-	175.153.100,00	
0302.15.014	Pagelaran Seni Pertunjukan Daerah	-	100.328.100,00	
0302.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		291.243.520,00	
0302.16.008	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	-	291.243.520,00	
0302.17	Program Pengembangan Kemitraan		174.730.742,00	
0302.17.010	Sosialisasi dan pelatihan tentang pengembangan ekonomi kreatif	-	81.341.344,00	
0302.17.011	Pengembangan cenderamata khas daerah	-	53.167.398,00	
0302.17.014	Pembinaan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata	-	40.222.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		81.340.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		81.340.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		81.340.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	25.260.000,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	35.580.000,00	
0405.24.021	Peringatan hari besar nasional dan daerah	-	20.500.000,00	
	JUMLAH Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		4.688.990.200,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		2.288.943.400,00	
0217	Perpustakaan		1.980.261.900,00	
0217.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		758.406.400,00	
0217.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	3.490.000,00	
0217.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	86.400.000,00	
0217.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	6.800.000,00	
0217.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	3.861.800,00	
0217.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	25.742.250,00	
0217.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	17.914.950,00	
0217.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	12.617.000,00	
0217.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	6.732.000,00	
0217.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	30.100.000,00	
0217.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	210.505.000,00	
0217.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	17.115.000,00	
0217.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	325.028.400,00	
0217.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	12.100.000,00	
0217.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		365.618.100,00	
0217.02.004	Pengadaan mobil jabatan	-	300.000.000,00	
0217.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	10.260.450,00	
0217.02.014	Pengadaan pemasangan listrik (tambah daya)	-	20.000.000,00	
0217.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	18.357.650,00	
0217.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	5.000.000,00	
0217.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	12.000.000,00	
0217.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		15.000.000,00	
0217.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	15.000.000,00	
0217.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		174.940.000,00	
0217.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	174.940.000,00	
0217.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		14.000.000,00	
0217.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	2.000.000,00	
0217.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	2.000.000,00	
0217.06.007	Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	-	2.000.000,00	
0217.06.008	Penyusunan laporan barang dan inventaris kantor	-	2.000.000,00	
0217.06.010	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	-	2.000.000,00	
0217.06.011	Penyusunan RKA SKPD	-	2.000.000,00	
0217.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	2.000.000,00	
0217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		652.297.400,00	
0217.15.003	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	-	40.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0217.15.009	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	-	107.074.500,00	
0217.15.011	Story telling/lomba bercerita	-	112.382.900,00	
0217.15.012	Pengenalan perpustakaan pada anak usia dini	-	20.565.000,00	
0217.15.016	Peningkatan pelayanan perpustakaan	-	43.155.000,00	
0217.15.017	Pelayanan perpustakaan keliling	-	54.120.000,00	
0217.15.020	Pengembangan koleksi perpustakaan	-	225.000.000,00	
0217.15.021	Pelatihan dan pembinaan berbasis inklusi sosial	-	50.000.000,00	
0218	Kearsipan		308.681.500,00	
0218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		144.990.200,00	
0218.16.008	Penyusutan arsip	-	144.990.200,00	
0218.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan		60.459.500,00	
0218.17.002	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	-	60.459.500,00	
0218.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi		103.231.800,00	
0218.18.007	Pembinaan Arsip Desa	-	76.530.000,00	
0218.18.008	Pengeembangan koleksi gallery arsip	-	26.701.800,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		61.085.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		61.085.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		61.085.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	10.250.000,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	50.835.000,00	
	JUMLAH Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2.350.028.400,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
03	URUSAN PILIHAN		26.237.696.624,00	
0303	Pertanian		26.237.696.624,00	
0303.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.118.142.737,00	
0303.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	2.557.500,00	
0303.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	51.521.868,00	
0303.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	12.000.000,00	
0303.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	123.391.000,00	
0303.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	44.510.149,00	
0303.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	18.251.720,00	
0303.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	1.999.800,00	
0303.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	8.697.600,00	
0303.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	15.076.500,00	
0303.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	281.940.000,00	
0303.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	176.200.000,00	
0303.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	373.999.800,00	
0303.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	7.996.800,00	
0303.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		35.120.000,00	
0303.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	28.000.000,00	
0303.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	7.120.000,00	
0303.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		142.248.650,00	
0303.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	88.490.000,00	
0303.05.004	Penilaian angka kredit	-	53.758.650,00	
0303.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		170.428.240,00	
0303.15.006	Pengembangan kemitraan kelembagaan petani pekebun	-	50.306.240,00	
0303.15.007	Penilaian petani berprestasi tingkat kabupaten	-	91.634.000,00	
0303.15.008	Penetapan indeks kabupaten	-	28.488.000,00	
0303.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan		20.258.589.087,00	
0303.16.032	Pengelolaan lahan dan air	-	20.061.024.987,00	
0303.16.033	Pengawasan kebijakan subsidi pertanian	-	149.344.500,00	
0303.16.035	Penyusunan angka ramalan (ARAM) padi dan palawija	-	48.219.600,00	
0303.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		4.155.066.960,00	
0303.19.007	Pemeliharaan kebun bibit lada	-	50.680.000,00	
0303.19.008	Pengembangan usaha perkebunan	-	49.500.000,00	
0303.19.009	Pengembangan perlindungan tanaman perkebunan	-	62.954.960,00	
0303.19.010	Pengembangan sarana dan prasarana perkebunan	-	41.200.000,00	
0303.19.011	Pembinaan dan pendampingan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	-	86.389.900,00	
0303.19.013	Penilaian usaha perkebunan	-	72.500.000,00	
0303.19.014	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan berkelanjutan	-	3.704.353.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0303.19.018	Pembinaan dan pendampingan pembangunan perkebunan rakyat	-	87.489.100,00	
0303.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		134.104.950,00	
0303.20.004	Penyusunan program penyuluhan kabupaten sintang	-	97.189.600,00	
0303.20.008	Penilaian penyuluh PNS dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian teladan tingkat	-	36.915.350,00	
0303.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		223.996.000,00	
0303.21.006	Pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies	-	223.996.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		39.253.420,00	
0405	Pemerintahan Umum		39.253.420,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		39.253.420,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	30.712.520,00	
0405.24.021	Peringatan hari besar nasional dan daerah	-	8.540.900,00	
	JUMLAH Dinas Pertanian dan Perkebunan		26.276.950.044,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		400.000.520,00	
0211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		400.000.520,00	
0211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif		59.998.600,00	
0211.15.012	Kegiatan fasilitasi pembiayaan UMKM dan koperasi pada perbankan dan lembaga pembiayaan	-	59.998.600,00	
0211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		70.000.000,00	
0211.16.006	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	-	70.000.000,00	
0211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		100.000.280,00	
0211.17.005	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	50.000.100,00	
0211.17.017	Kegiatan pendataan UMKM	-	50.000.180,00	
0211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		170.001.640,00	
0211.18.011	Kegiatan pelatihan perkoperasian	-	70.000.140,00	
0211.18.021	Kegiatan pendataan koperasi	-	50.001.500,00	
0211.18.023	Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK	-	50.000.000,00	
03	URUSAN PILIHAN		9.293.291.480,00	
0306	Perdagangan		7.533.584.870,00	
0306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan		599.768.990,00	
0306.15.006	Monitoring/pemantauan produk AMDK/AMIU dan pemasarannya	-	49.999.800,00	
0306.15.014	Operasi pasar	-	200.000.000,00	
0306.15.016	Monitoring harga sembako	-	64.009.850,00	
0306.15.017	Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	-	39.999.860,00	
0306.15.020	Pendidikan dan pelatihan metrologi legal	-	85.760.000,00	
0306.15.022	Pendataan alat UTTP	-	69.999.700,00	
0306.15.024	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	-	39.999.850,00	
0306.15.031	Monitoring peredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya	-	49.999.930,00	
0306.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		6.933.815.880,00	
0306.18.008	Pembangunan UPT metrologi legal	-	1.419.500.000,00	
0306.18.013	Tera/tera ulang alat ukur takar timbang	-	59.999.880,00	
0306.18.020	Monitoring dan pengawasan perizinan	-	80.000.000,00	
0306.18.033	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan/ Pembangunan Pasar/ Kios/ Los	-	4.954.316.000,00	
0306.18.034	Pemasangan Jaringan Listrik	-	50.000.000,00	
0306.18.038	Survey Rencana Pembangunan dan Revitalisasi Pasar	-	40.000.000,00	
0306.18.040	Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pasar Pemerintah	-	50.000.000,00	
0306.18.048	Pendataan dan Penempatan Pedagang Pasar Milik Pemerintah	-	140.000.000,00	
0306.18.049	Pendataan dan Pelayanan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	-	140.000.000,00	
0307	Perindustrian		1.759.706.610,00	
0307.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.089.927.550,00	
0307.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	3.409.000,00	
0307.01.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	-	73.200.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
2	listrik	-	73.200.000,00	
0307.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	30.050.700,00	
0307.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	135.383.000,00	
0307.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	40.049.900,00	
0307.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	30.000.850,00	
0307.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	13.378.200,00	
0307.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	6.000.000,00	
0307.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	21.850.000,00	
0307.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	285.090.000,00	
0307.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	29.239.900,00	
0307.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	379.476.000,00	
0307.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	2.200.000,00	
0307.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	3.207.600,00	
0307.01.023	Penataan dokumen arsip	-	14.189.900,00	
0307.01.024	Penataan aset	-	23.202.500,00	
0307.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		51.250.000,00	
0307.02.010	Pengadaan mebeleur	-	10.740.000,00	
0307.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	20.070.000,00	
0307.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	7.190.000,00	
0307.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	13.250.000,00	
0307.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		38.225.000,00	
0307.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	38.225.000,00	
0307.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		55.640.000,00	
0307.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	55.640.000,00	
0307.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		10.166.300,00	
0307.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	1.625.800,00	
0307.06.008	Penyusunan laporan barang dan inventaris kantor	-	5.013.100,00	
0307.06.011	Penyusunan RKA SKPD	-	2.003.900,00	
0307.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	1.523.500,00	
0307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		430.393.960,00	
0307.16.011	Promosi produk IKM	-	155.051.000,00	
0307.16.016	Pelatihan industri kerajinan rumah tangga	-	50.000.000,00	
0307.16.017	HUT Dekranasda	-	146.338.500,00	
0307.16.018	Pameran Pekan Raya Sintang	-	20.842.500,00	
0307.16.022	Pameran Produksi IKM Pekan Gawai Dayak	-	18.161.960,00	
0307.16.023	Pembinaan IKM melalui pembinaan langsung	-	40.000.000,00	
0307.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		50.000.000,00	
0307.17.009	Bimbingan teknis modifikasi bordir dan fashion (pelatihan menjahit)	-	50.000.000,00	
0307.18	Program Penataan Struktur Industri		34.103.800,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0307.18.004	Monitoring dan pendataan usaha industri	-	34.103.800,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		60.000.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		60.000.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		60.000.000,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	30.000.000,00	
0405.24.021	Peringatan hari besar nasional dan daerah	-	30.000.000,00	
	JUMLAH Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		9.753.292.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		35.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		35.000.000,00	
0105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		35.000.000,00	
0105.20.020	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekuser Narkoba (P4GN)	-	35.000.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		7.964.646.396,00	
0401	Perencanaan		7.897.820.896,00	
0401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.273.263.250,00	
0401.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	2.600.000,00	
0401.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	123.840.000,00	
0401.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	15.390.000,00	
0401.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	1.800.000,00	
0401.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	200.000.000,00	
0401.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	51.347.150,00	
0401.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	40.505.000,00	
0401.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	7.860.000,00	
0401.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	4.380.000,00	
0401.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	50.000.000,00	
0401.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	359.955.000,00	
0401.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	112.780.000,00	
0401.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	223.762.700,00	
0401.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	30.004.000,00	
0401.01.023	Penataan dokumen arsip	-	26.630.000,00	
0401.01.028	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	-	22.409.400,00	
0401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		94.951.776,00	
0401.02.010	Pengadaan mebeleur	-	2.600.000,00	
0401.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	34.000.000,00	
0401.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	9.000.000,00	
0401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	34.000.000,00	
0401.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	2.700.000,00	
0401.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	12.651.776,00	
0401.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		97.790.000,00	
0401.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	97.790.000,00	
0401.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		18.630.300,00	
0401.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	6.850.100,00	
0401.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	5.250.100,00	
0401.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	6.530.100,00	
0401.15	Program Pengembangan data/informasi		249.999.380,00	
0401.15.00	Update data Sistem Informasi Profil Daerah	-	119.999.680,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
7	Update data Sistem Informasi Profil Daerah	-	119.999.680,00	
0401.15.008	Database Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pembangunan	-	129.999.700,00	
0401.16	Program Kerjasama Pembangunan		894.998.970,00	
0401.16.006	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana	-	349.999.700,00	
0401.16.007	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan dan pengendalian	-	249.999.800,00	
0401.16.008	Dana penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	-	64.999.800,00	
0401.16.009	Koordinasi pembangunan Bandar Udara Tebelian	-	79.999.860,00	
0401.16.013	Dana penunjang kegiatan percepatan pembangunan sanitasi permukiman	-	149.999.810,00	
0401.21	Program perencanaan pembangunan daerah		1.904.280.320,00	
0401.21.002	Penyusunan rancangan RPJPD	-	100,00	
0401.21.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	-	374.871.600,00	
0401.21.012	Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD	-	274.998.700,00	
0401.21.015	Penyusunan RKPD	-	209.999.700,00	
0401.21.016	Penyusunan Perubahan RKPD	-	60.575.160,00	
0401.21.018	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	-	129.999.840,00	
0401.21.023	Dana penunjang satuan tugas pendamping RPIJM	-	99.999.950,00	
0401.21.024	Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	-	69.999.910,00	
0401.21.026	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pelaporan	-	389.998.700,00	
0401.21.028	Fasilitasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan	-	149.999.990,00	
0401.21.033	Dana penunjang gerakan nasional kemitraan air GN-KPA	-	73.836.990,00	
0401.21.034	Dana penunjang kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman	-	69.999.680,00	
0401.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		1.838.078.300,00	
0401.22.004	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	-	290.000.000,00	
0401.22.009	Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi	-	30.000.000,00	
0401.22.010	Pengendalian inflasi daerah	-	160.000.000,00	
0401.22.011	Koordinasi pembangunan ekonomi berkelanjutan	-	158.078.300,00	
0401.22.017	Penyusunan Data dan Penilaian Tanggungjawab Sosial Perusahaan	-	200.000.000,00	
0401.22.022	Festival kabupaten lestari	-	1.000.000.000,00	
0401.23	Program perencanaan sosial budaya		1.525.828.600,00	
0401.23.003	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	-	285.000.000,00	
0401.23.006	Pembinaan, evaluasi dan pelaporan lintas sektoral	-	305.195.400,00	
0401.23.008	Koordinasi dan fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan	-	145.215.800,00	
0401.23.009	Kinerja dan akuntabilitas guru	-	385.418.000,00	
0401.23.010	Fasilitasi Program Peningkatan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (P2-EMAS)	-	200.000.000,00	
0401.23.015	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	-	109.999.400,00	
0401.23.016	Koordinasi dan Fasilitasi Pencapaian Target SDGs	-	95.000.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		66.825.500,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		66.825.500,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	25.000.000,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	36.825.500,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.24.021	Peringatan hari besar nasional dan daerah	-	5.000.000,00	
	JUMLAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		7.999.646.396,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		6.403.894.250,00	
0402	Keuangan		6.351.881.350,00	
0402.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.730.705.780,00	
0402.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	1.800.000,00	
0402.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	460.008.000,00	
0402.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	14.725.000,00	
0402.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	2.120.000,00	
0402.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	207.466.000,00	
0402.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	61.855.750,00	
0402.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	44.165.000,00	
0402.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	9.322.500,00	
0402.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	18.000.000,00	
0402.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	5.142.800,00	
0402.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	252.600.000,00	
0402.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	78.563.330,00	
0402.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	435.047.400,00	
0402.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	38.500.000,00	
0402.01.023	Penataan dokumen arsip	-	101.390.000,00	
0402.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		172.600.000,00	
0402.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	81.200.000,00	
0402.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	44.500.000,00	
0402.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	21.000.000,00	
0402.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	25.900.000,00	
0402.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		54.429.900,00	
0402.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	20.330.200,00	
0402.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	7.500.000,00	
0402.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	6.600.000,00	
0402.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	6.000.000,00	
0402.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	13.999.700,00	
0402.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		4.382.566.770,00	
0402.15.001	Penyusunan Analisa Standar Belanja	-	69.333.900,00	
0402.15.002	Penyusunan standar satuan harga	-	107.002.010,00	
0402.15.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	-	292.233.650,00	
0402.15.007	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	-	213.404.200,00	
0402.15.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	-	282.535.000,00	
0402.15.009	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	184.380.500,00	
0402.15.010	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	-	115.750.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0402.15.011	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	-	52.750.500,00	
0402.15.031	Penyusunan status penggunaan aset/barang milik daerah	-	64.591.100,00	
0402.15.032	Penyusunan anggaran kas	-	42.795.800,00	
0402.15.034	Penyusunan laporan barang milik daerah	-	85.603.700,00	
0402.15.052	Penilaian aset/barang milik daerah	-	50.223.800,00	
0402.15.055	Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan	-	51.114.250,00	
0402.15.058	Penyusunan laporan semester 1 dan Prognosis SKPD	-	60.979.800,00	
0402.15.060	Pengamanan dan pengendalian aset/barang milik daerah	-	167.810.310,00	
0402.15.062	Pemeliharaan/pengembangan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIM Gaji)	-	100.000.000,00	
0402.15.063	Pengelolaan pembiayaan daerah	-	50.008.000,00	
0402.15.064	Penyusunan Standar Tambahan Penghasilan Bagi ASN	-	88.076.600,00	
0402.15.065	Penyusunan Standar Biaya Perjalanan Dinas	-	102.586.500,00	
0402.15.067	Penyusunan, rekonsiliasi, konsolidasi dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah	-	175.001.800,00	
0402.15.068	Pendampingan dan bimbingan pengelolaan keuangan SKPD	-	47.855.300,00	
0402.15.069	Pemindahtanganan aset/barang milik daerah	-	90.171.600,00	
0402.15.070	Rekonsiliasi laporan pengadaan barang milik daerah	-	81.321.000,00	
0402.15.076	Penghapusan aset/barang milik daerah	-	69.612.500,00	
0402.15.077	Pemusnahan aset/barang milik daerah	-	48.472.250,00	
0402.15.079	Penyusunan Standar Satuan Biaya	-	80.150.950,00	
0402.15.080	Pengelolaan kas daerah	-	110.739.500,00	
0402.15.081	Pengelolaan administrasi SP2D	-	95.970.500,00	
0402.15.085	Sosialisasi permendagri tentang pedoman penyusunan APBD	-	39.996.500,00	
0402.15.087	Rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan dan dana dari provinsi	-	68.304.000,00	
0402.15.088	Pengelolaan administrasi gaji dan tunjangan PNS	-	88.538.800,00	
0402.15.090	Pembangunan/pemeliharaan portal (website)	-	70.000.000,00	
0402.15.092	Evaluasi dan pelaporan dana alokasi khusus (DAK)	-	48.448.400,00	
0402.15.094	Penyusunan Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil	-	74.016.500,00	
0402.15.095	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)	-	22.396.500,00	
0402.15.096	Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah	-	189.485.500,00	
0402.15.101	Pembangunan/pemeliharaan aplikasi BLUD	-	66.809.000,00	
0402.15.102	Pembinaan pengelolaan keuangan PPK BLUD	-	101.304.600,00	
0402.15.106	Penyusunan rekonsiliasi konsolidasi laporan keuangan BLUD	-	34.391.000,00	
0402.15.108	Pengelolaan administrasi keuangan belanja subsidi dan bantuan keuangan (Bansos)	-	71.471.250,00	
0402.15.112	Pemeliharaan Sistem Informasi Tata Naskah dan Persuratan Elektronik (SITAN)	-	49.000.000,00	
0402.15.113	Pembangunan Sistem Aplikasi Digital Arsip Keuangan	-	99.000.000,00	
0402.15.114	Pengelolaan Administrasi SKPD dan PPKD	-	50.273.300,00	
0402.15.117	Pembinaan transaksi non tunai	-	25.020.800,00	
0402.15.118	Penyusunan KUA dan PPAS	-	63.288.300,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0402.15.120	Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Daerah	-	160.347.300,00	
0402.15.131	Pemeliharaan dan pengembangan sisteem informasi barang daerah (SIMBADA)	-	80.000.000,00	
0402.16	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		11.578.900,00	
0402.16.001	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	-	11.578.900,00	
0405	Pemerintahan Umum		52.012.900,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		52.012.900,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	42.627.400,00	
0405.24.021	Peringatan hari besar nasional dan daerah	-	9.385.500,00	
	JUMLAH Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		6.403.894.250,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		6.664.023.157,00	
0402	Keuangan		6.601.944.707,00	
0402.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.966.125.860,00	
0402.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	5.170.000,00	
0402.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	363.708.000,00	
0402.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	15.936.000,00	
0402.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	168.919.000,00	
0402.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	46.998.400,00	
0402.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	39.479.060,00	
0402.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	10.383.000,00	
0402.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	7.608.000,00	
0402.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	26.650.000,00	
0402.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	310.000.000,00	
0402.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	150.000.000,00	
0402.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	802.523.400,00	
0402.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	18.751.000,00	
0402.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		144.140.000,00	
0402.02.010	Pengadaan mebeleur	-	15.400.000,00	
0402.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	61.500.000,00	
0402.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	17.500.000,00	
0402.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	27.000.000,00	
0402.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	14.740.000,00	
0402.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	8.000.000,00	
0402.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		23.276.000,00	
0402.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	23.276.000,00	
0402.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		99.990.000,00	
0402.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	99.990.000,00	
0402.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		24.358.365,00	
0402.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	6.011.951,00	
0402.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	5.342.900,00	
0402.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	7.230.000,00	
0402.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	5.773.514,00	
0402.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		4.344.054.482,00	
0402.15.023	Penagihan dan penatausahaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	-	135.932.600,00	
0402.15.025	Penyusunan laporan hasil penerimaan pendapatan daerah	-	87.778.456,00	
0402.15.026	Penyusunan dan analisis potensi PAD	-	96.614.171,00	
0402.15.027	Penyusunan target pendapatan	-	41.999.905,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0402.15.028	Penyampaian SPPT PBB P2	-	199.289.000,00	
0402.15.029	Penegakan hukum perpajakan daerah	-	102.314.150,00	
0402.15.030	Sosialisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	-	148.807.300,00	
0402.15.031	Penertiban pajak reklame	-	57.236.420,00	
0402.15.032	Pelayanan dan analisis benda berharga	-	102.262.400,00	
0402.15.033	Pemutahiran data PBB P2	-	369.205.600,00	
0402.15.035	Pemeliharaan dan Pengembangan SISMIOP PBB-P2	-	230.000.000,00	
0402.15.036	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda)	-	183.332.600,00	
0402.15.037	Sistem Informasi Manajemen (SIM) BPHTB	-	107.060.000,00	
0402.15.039	Verifikasi, klarifikasi dan validasi pajak daerah	-	248.536.630,00	
0402.15.040	Pendataan subjek/objek pajak daerah	-	275.255.350,00	
0402.15.041	Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah	-	210.000.000,00	
0402.15.042	Pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah	-	159.998.400,00	
0402.15.044	Pengelolaan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah	-	205.852.000,00	
0402.15.045	Rekonsiliasi penerimaan daerah Kabupaten Sintang	-	102.046.500,00	
0402.15.046	Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan dana transfer dan pendapatan lain-lain	-	80.225.430,00	
0402.15.047	Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama peningkatan dana transfer bagi hasil pajak dan bukan pajak	-	130.000.170,00	
0402.15.048	Penyusunan peraturan Bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah	-	114.429.300,00	
0402.15.049	Penyelesaian keberatan dan banding	-	252.579.600,00	
0402.15.051	Penatausahaan piutang daerah	-	207.411.800,00	
0402.15.119	Revaluasi NJOP	-	50.000.000,00	
0402.15.121	Sosialisasi pajak daerah melalui video visual layanan masyarakat	-	75.000.000,00	
0402.15.124	Zona integrasi	-	75.231.200,00	
0402.15.128	Penghapusan piutang pajak daerah	-	136.245.000,00	
0402.15.129	Penagihan piutang PBB	-	159.410.500,00	
0405	Pemerintahan Umum		62.078.450,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		62.078.450,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	40.000.000,00	
0405.24.021	Peringatan hari besar nasional dan daerah	-	22.078.450,00	
	JUMLAH Badan Pengelola Pendapatan Daerah		6.664.023.157,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		1.930.866.453,00	
0403	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		1.880.448.303,00	
0403.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		839.203.740,00	
0403.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	2.575.000,00	
0403.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	115.100.000,00	
0403.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	5.000.000,00	
0403.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	400.000,00	
0403.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	158.774.000,00	
0403.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	110.994.365,00	
0403.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	77.325.225,00	
0403.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	7.441.300,00	
0403.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	6.720.000,00	
0403.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	16.169.000,00	
0403.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	171.830.000,00	
0403.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	10.095.000,00	
0403.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	130.866.600,00	
0403.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	20.589.750,00	
0403.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	5.323.500,00	
0403.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		69.700.000,00	
0403.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	25.000.000,00	
0403.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	27.300.000,00	
0403.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	8.000.000,00	
0403.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	9.400.000,00	
0403.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		20.564.975,00	
0403.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	3.000.200,00	
0403.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	11.183.500,00	
0403.06.010	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	-	3.064.700,00	
0403.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	3.316.575,00	
0403.16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		66.012.000,00	
0403.16.008	Tim Seleksi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV	-	35.972.000,00	
0403.16.016	Diklat Kompetensi Bendahara	-	30.040.000,00	
0403.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		884.967.588,00	
0403.17.005	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	-	29.994.000,00	
0403.17.007	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	-	35.000.000,00	
0403.17.008	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	-	63.788.000,00	
0403.17.009	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	-	35.001.000,00	
0403.17.018	Usul Kenaikan Pangkat PNS	-	135.438.750,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0403.17.019	Mutasi Pindah PNS	-	35.759.485,00	
0403.17.020	Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah	-	40.100.700,00	
0403.17.021	Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala	-	40.000.000,00	
0403.17.022	Penyelesaian Pengurusan SK Pemberhentian dengan Hormat dengan Hak Pensiun	-	87.242.945,00	
0403.17.023	Pelantikan dan Sumpah/ Janji Jabatan Struktural	-	33.385.000,00	
0403.17.024	Ujian Dinas	-	42.146.650,00	
0403.17.025	Pemberian Bantuan Ijin Belajar S2	-	14.000.000,00	
0403.17.026	Penyelesaian Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu	-	35.397.500,00	
0403.17.027	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional	-	44.999.875,00	
0403.17.030	Pelaksanaan Perhimpunan LHKPN	-	29.724.250,00	
0403.17.033	Proses Pembinaan dan Penyelesaian Ijin Perceraian	-	24.289.250,00	
0403.17.034	Pengolahan dan Penyelesaian Cuti PNS	-	34.853.400,00	
0403.17.036	Penyelesaian Taspen, Penyelesaian Pensiun Peg dan Janda	-	21.293.500,00	
0403.17.040	Pengelolaan dan Pengembangan Korpri	-	25.000.000,00	
0403.17.042	Rekon database sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) BKN	-	24.076.480,00	
0403.17.043	Penyelesaian permasalahan kartu pegawai elektronik	-	28.751.803,00	
0403.17.047	Sinkronisasi data Aparatur Sipil Negara	-	24.725.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		50.418.150,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		50.418.150,00	
0405.24.016	Peringatan Hari Jadi Kota Sintang	-	20.574.500,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	29.843.650,00	
	JUMLAH Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.930.866.453,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		1.304.255.700,00	
0101	Pendidikan		1.202.121.000,00	
0101.23	Program Pendidikan Tinggi		1.202.121.000,00	
0101.23.001	Penerimaan calon mahasiswa dan evaluasi mahasiswa program kerjasama	-	1.108.878.500,00	
0101.23.002	Seleksi penerimaan mahasiswa kedokteran dan evaluasi program pendidikan jalur beasiswa fakultas kedokteran	-	93.242.500,00	
0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		102.134.700,00	
0103.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		102.134.700,00	
0103.27.010	Pengendalian dan pemantauan manajemen PDAM	-	75.665.800,00	
0103.27.012	Pengangkatan dewan pengawas PDAM	-	26.468.900,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		1.983.360.100,00	
0210	Komunikasi dan Informatika		1.922.235.800,00	
0210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		151.067.500,00	
0210.15.008	Kegiatan Menyebarkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat	-	73.627.500,00	
0210.15.009	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi website LPSE sintang.go.id	-	77.440.000,00	
0210.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		165.842.750,00	
0210.17.005	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi SPSE dan Sirup	-	34.142.750,00	
0210.17.006	Bimbingan teknis proses pengadaan barang/ jasa pemerintah	-	69.835.000,00	
0210.17.007	Bimbingan teknis penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	-	61.865.000,00	
0210.18	Program kerjasama informasi dan media massa		1.605.325.550,00	
0210.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	1.399.994.150,00	
0210.18.004	Peliputan dan pemberitaan	-	199.572.400,00	
0210.18.006	Penyusunan naskah pidato	-	5.759.000,00	
0214	Statistik		61.124.300,00	
0214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		61.124.300,00	
0214.15.013	Pembakuan namainama rupabumi kabupaten sintang	-	10.791.500,00	
0214.15.014	Kodefikasi dan data wilayah administrasi kabupaten sintang	-	10.160.000,00	
0214.15.016	Penyusunan profil kegiatan perekonomian	-	40.172.800,00	
03	URUSAN PILIHAN		200.440.000,00	
0304	Kehutanan		200.440.000,00	
0304.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		200.440.000,00	
0304.15.002	Perencanaan pembangunan tanaman hutan raya	-	200.440.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		34.905.349.270,00	
0401	Perencanaan		532.906.150,00	
0401.15	Program Pengembangan data/informasi		53.328.000,00	
0401.15.010	Pengendalian administrasi pelaporan pembangunan	-	53.328.000,00	
0401.16	Program Kerjasama Pembangunan		55.148.300,00	
0401.16.015	Koordinasi dan identifikasi pemecahan masalah - masalah daerah	-	55.148.300,00	
0401.21	Program perencanaan pembangunan daerah		251.607.450,00	
0401.21.031	Penyusunan dokumen kegiatan pembangunan	-	51.501.150,00	
0401.21.032	Pengumpulan, penganalisaan dan pengelolaan data penyusunan profil daerah tertinggal	-	200.106.300,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0401.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		172.822.400,00	
0401.22.018	Monitoring dan inventarisasi kegiatan perkmbangan perkonomian	-	92.213.800,00	
0401.22.019	Monitoring dan inventarisasi kegiatan produksi dan distribusi bidang perekonomian	-	40.562.450,00	
0401.22.020	Monitoring dan inventarisasi permasalahan bidang perkonomian	-	40.046.150,00	
0405	Pemerintahan Umum		34.372.443.120,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		18.030.911.170,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	20.952.500,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	4.778.069.500,00	
0405.01.005	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	-	797.000.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	120.140.000,00	
0405.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	640.576.600,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	217.468.400,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	324.999.270,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	101.002.000,00	
0405.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	44.640.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	1.592.799.500,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	4.281.338.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	114.035.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	2.926.279.200,00	
0405.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	692.745.000,00	
0405.01.023	Penataan dokumen arsip	-	39.495.100,00	
0405.01.026	Pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU)	-	1.231.100.000,00	
0405.01.027	Pengelolaan administrasi keuangan	-	86.529.000,00	
0405.01.029	Penataan dan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	-	21.742.100,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		3.801.505.460,00	
0405.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	57.000.000,00	
0405.02.006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	-	1.311.550.460,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	201.970.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	310.470.000,00	
0405.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	-	229.760.000,00	
0405.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	419.180.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	802.005.000,00	
0405.02.025	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	-	81.800.000,00	
0405.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	78.240.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	40.500.000,00	
0405.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	269.030.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		141.475.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	141.475.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		659.171.600,00	
0405.05.00	Pendidikan dan pelatihan formal	-	575.060.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
1	Pendidikan dan pelatihan formal	-	575.060.000,00	
0405.05.007	Bimbingan teknis penyusunan LPJ keuangan bagi penerima bantuan	-	84.111.600,00	
0405.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		254.128.300,00	
0405.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	16.099.300,00	
0405.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	2.334.300,00	
0405.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	2.831.500,00	
0405.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	4.438.000,00	
0405.06.010	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	-	5.274.500,00	
0405.06.013	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kabupaten sintang	-	117.644.000,00	
0405.06.014	Penyusunan perjanjian kinerja kabupaten sintang	-	96.999.800,00	
0405.06.017	Penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT)	-	5.834.500,00	
0405.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	2.672.400,00	
0405.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		6.984.614.510,00	
0405.16.003	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	-	125.250.000,00	
0405.16.004	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	-	178.692.500,00	
0405.16.005	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	-	1.523.186.000,00	
0405.16.006	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	-	2.170.555.000,00	
0405.16.007	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	-	139.994.410,00	
0405.16.008	Penyusunan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD	-	49.998.400,00	
0405.16.011	Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	-	102.940.000,00	
0405.16.018	Kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah	-	134.355.000,00	
0405.16.019	Fasilitasi kunjungan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	-	74.966.200,00	
0405.16.020	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	-	387.678.000,00	
0405.16.021	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/kementerian/lembaga pemerintah non kemneterian/luar negeri	-	637.268.500,00	
0405.16.026	Biaya penunjang operasional rumah jabatan kepala daerah	-	875.503.500,00	
0405.16.027	Biaya penunjang operasional rumah jabatan wakil kepala daerah	-	584.227.000,00	
0405.17	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		362.306.000,00	
0405.17.028	Pelayanan dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten sintang	-	75.000.000,00	
0405.17.030	Koordinasi pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah	-	79.999.500,00	
0405.17.031	Penyusunan dan penyebarluasan bahan kebijakan, standar, system dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah	-	77.311.000,00	
0405.17.032	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa pemerintah	-	69.610.000,00	
0405.17.041	Pelaksanaan inventarisasi paket, riset dan analisis pasar, penyusunan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah	-	60.385.500,00	
0405.21	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		35.000.050,00	
0405.21.005	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan	-	35.000.050,00	
0405.22	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		1.025.099.000,00	
0405.22.007	Evaluasi peraturan desa	-	29.300.060,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.22.008	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum terpadu	-	120.641.000,00	
0405.22.009	Dokumentasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan	-	127.934.750,00	
0405.22.010	Sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan	-	48.930.000,00	
0405.22.011	Penelitian, pengkajian dan penelaahan keputusan kepala daerah	-	67.320.000,00	
0405.22.012	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan keluarga sadar hukum	-	30.198.500,00	
0405.22.013	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	-	44.842.050,00	
0405.22.016	Penelitian, pengkajian dan penelaahan nota kesepahaman, kontrak dan perjanjian	-	21.450.000,00	
0405.22.017	Penyusunan dan pembahasan peraturan daerah	-	196.177.500,00	
0405.22.018	Penyusunan dan pembahasan peraturan bupati	-	92.564.000,00	
0405.22.019	Penyusunan program pembentukan peraturan daerah	-	23.240.240,00	
0405.22.020	Pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	-	94.490.000,00	
0405.22.024	Fasilitasi penyusunan perda dan perbub kelembagaan	-	128.010.900,00	
0405.23	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		245.656.290,00	
0405.23.003	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	-	98.853.000,00	
0405.23.009	Pemekaran wilayah kecamatan	-	74.803.500,00	
0405.23.011	Fasilitasi dan monitoring penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat dan Lurah	-	71.999.790,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		861.180.090,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	349.303.000,00	
0405.24.003	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	-	21.239.900,00	
0405.24.008	Peringatan Hari Otonomi Daerah	-	4.995.800,00	
0405.24.015	Peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat	-	4.985.000,00	
0405.24.016	Peringatan Hari Jadi Kota Sintang	-	349.999.990,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	20.759.400,00	
0405.24.022	Peringatan hari ulang tahun pemerintah daerah	-	4.987.500,00	
0405.24.023	Peringatan hari lahir pancasila	-	4.918.000,00	
0405.24.028	Upacara peringatan hari jadi kota sintang	-	99.991.500,00	
0405.25	Program Bantuan Hukum		396.590.450,00	
0405.25.001	Penanganan kasus, pengaduan permasalahan hukum di luar pengadilan	-	100.350.000,00	
0405.25.002	Penanganan kasus, pengaduan, gugatan hukum di dalam pengadilan	-	236.407.750,00	
0405.25.004	Perumusan dan pemetaan permasalahan hukum	-	30.089.000,00	
0405.25.005	Layanan komunikasi masyarakat di bidang bantuan hukum	-	29.743.700,00	
0405.26	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah		373.609.000,00	
0405.26.002	Penyusunan formasi jabatan	-	101.688.500,00	
0405.26.006	Penyusunan Analisis Jabatan	-	23.895.500,00	
0405.26.008	Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kabupaten Sintang	-	35.687.050,00	
0405.26.009	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	145.013.250,00	
0405.26.011	Pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa	-	67.324.700,00	
0405.27	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		89.916.400,00	
0405.27.001	Pembinaan kompetensi inovasi pelayanan publik	-	46.571.900,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.27.002	Fasilitasi penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	-	43.344.500,00	
0405.29	Program Pemerintahan Peningkatan di Bidang Kesejahteraan Rakyat		534.106.900,00	
0405.29.001	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penerimaan Bantuan	-	120.351.900,00	
0405.29.002	Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat	-	118.328.200,00	
0405.29.003	Verifikasi Penerima Belanja Hibah dan Bansos	-	295.426.800,00	
0405.30	Program Peningkatan Kerukunan Beragama		577.172.900,00	
0405.30.001	Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	-	88.950.700,00	
0405.30.002	Kegiatan Pelayanan Jemaah Haji	-	488.222.200,00	
	JUMLAH Sekretariat Daerah		38.393.405.070,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		9.468.875.500,00	
0405	Pemerintahan Umum		9.468.875.500,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.728.218.500,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	5.175.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	250.000.000,00	
0405.01.004	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	-	47.385.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	54.700.000,00	
0405.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	490.500.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	50.000.000,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	25.000.000,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	25.000.000,00	
0405.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	58.079.400,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	150.000.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	200.000.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	1.168.875.600,00	
0405.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	200.000.000,00	
0405.01.031	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (jangan di pakai, pindah ke program peningkatan pengembangan sistem pelaporan.....)	-	3.503.500,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		620.000.000,00	
0405.02.006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	-	50.000.000,00	
0405.02.008	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	-	50.000.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	50.000.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	50.000.000,00	
0405.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	-	100.000.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	100.000.000,00	
0405.02.025	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	-	100.000.000,00	
0405.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	30.000.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	40.000.000,00	
0405.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	50.000.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		414.345.500,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	414.345.500,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		150.000.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	150.000.000,00	
0405.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		28.380.000,00	
0405.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	9.751.500,00	
0405.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	4.026.000,00	
0405.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	3.718.000,00	
0405.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	4.548.500,00	
0405.06.01	Penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT)	-	3.080.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
7	Penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT)	-	3.080.000,00	
0405.06.018	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	-	3.256.000,00	
0405.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		5.465.473.000,00	
0405.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah	-	2.028.068.000,00	
0405.15.003	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	-	200.000.000,00	
0405.15.004	Rapat-rapat paripurna	-	200.000.000,00	
0405.15.005	Kegiatan Reses	-	1.067.405.000,00	
0405.15.006	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	-	300.000.000,00	
0405.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	-	1.000.000.000,00	
0405.15.009	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	670.000.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		62.458.500,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	10.151.500,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	52.307.000,00	
	JUMLAH Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		9.468.875.500,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		5.943.291.900,00	
0405	Pemerintahan Umum		5.943.291.900,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		976.245.100,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	6.800.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	115.500.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	16.990.000,00	
0405.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	3.614.755,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	50.378.725,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	42.878.420,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	3.091.200,00	
0405.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	6.780.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	33.561.600,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	511.780.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	21.980.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	143.390.400,00	
0405.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	19.500.000,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		259.937.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	24.805.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	110.430.000,00	
0405.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	35.252.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	52.500.000,00	
0405.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	12.500.000,00	
0405.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	1.200.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	23.250.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		256.501.500,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	225.560.000,00	
0405.05.004	Penilaian angka kredit	-	30.941.500,00	
0405.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		17.546.000,00	
0405.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	3.840.700,00	
0405.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	3.270.200,00	
0405.06.010	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	-	3.154.200,00	
0405.06.021	Penyusunan program kerja pengawasan tahunan	-	4.126.700,00	
0405.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	3.154.200,00	
0405.17	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		3.727.600.080,00	
0405.17.002	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	-	455.400.000,00	
0405.17.004	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	-	188.523.800,00	
0405.17.005	Inventarisasi temuan pengawasan	-	269.521.680,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.17.008	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	-	100.565.000,00	
0405.17.009	Audit Alokasi Dana Desa	-	397.590.000,00	
0405.17.010	Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	-	77.122.800,00	
0405.17.011	Evaluasi LAKIP	-	408.415.000,00	
0405.17.012	Pemeliharaan program SIMHP	-	6.000.000,00	
0405.17.013	Invetarisasi penetapan TPTGR	-	103.480.600,00	
0405.17.014	Review RKA SKPD	-	59.372.000,00	
0405.17.015	Pencanangan zona integritas	-	84.559.000,00	
0405.17.016	Sapu bersih pungutan liar	-	90.360.000,00	
0405.17.017	Probity Audit	-	43.595.700,00	
0405.17.018	Penanganan laporan gratifikasi	-	97.919.700,00	
0405.17.019	Penilaian mandiri reformasi birokrasi	-	34.403.700,00	
0405.17.020	Pelaksanaan penguatan dan evaluasi penerapan SPIP	-	38.848.000,00	
0405.17.021	Laporan LHKPN/LHAKSN	-	75.596.800,00	
0405.17.022	Pelaksanaan pengawasan internal berkala pada Dinas dan LTD	-	462.450.000,00	
0405.17.027	Review Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	38.595.700,00	
0405.17.033	Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala pada Kecamatan dan Kelurahan	-	167.360.000,00	
0405.17.034	Layanan aspirasi pengaduan online rakyat sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N)	-	138.169.200,00	
0405.17.035	Monitoring/ Tindak Lanjut Pengawasan	-	312.560.000,00	
0405.17.036	Audit Manajemen Kepegawaian	-	38.595.700,00	
0405.17.037	Audit Tata Kelola Teknologi Informasi	-	38.595.700,00	
0405.18	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		655.724.220,00	
0405.18.001	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	-	181.250.000,00	
0405.18.002	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	-	381.430.000,00	
0405.18.003	Peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur pengawasan	-	66.754.320,00	
0405.18.004	Pelaksanaan penguatan kapabilitas APIP	-	26.289.900,00	
0405.19	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		4.217.800,00	
0405.19.002	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	-	1.961.800,00	
0405.19.003	Penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan semesteran dan tahunan	-	2.256.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		45.520.200,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	45.520.200,00	
		JUMLAH Inspektorat	5.943.291.900,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		212.760.200,00	
0206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		24.940.000,00	
0206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		24.940.000,00	
0206.15.015	Pelaksanaan e-KTP	-	24.940.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		127.855.700,00	
0207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		9.969.500,00	
0207.16.014	Penunjang pengendalian inflasi daerah	-	9.969.500,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		85.211.200,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	44.425.000,00	
0207.17.020	Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah	-	20.786.200,00	
0207.17.023	Koordinasi pemecahan masalah perkebunan	-	20.000.000,00	
0207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		32.675.000,00	
0207.20.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	-	32.675.000,00	
0213	Kepemudaan dan Olah Raga		49.964.500,00	
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		49.964.500,00	
0213.20.041	Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup	-	49.964.500,00	
0216	Kebudayaan		10.000.000,00	
0216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		10.000.000,00	
0216.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	-	10.000.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		631.836.600,00	
0405	Pemerintahan Umum		631.836.600,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		388.326.600,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	2.230.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	15.600.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	6.200.000,00	
0405.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	1.504.415,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	27.294.300,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	5.887.500,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	1.755.885,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	63.583.500,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	79.170.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	90.985.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	84.060.000,00	
0405.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	10.056.000,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		107.250.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	29.000.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	20.000.000,00	
0405.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	30.000.000,00	
0405.02.02	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	-	18.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
3	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	-	18.000.000,00	
0405.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	4.250.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	6.000.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		22.400.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	22.400.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		65.980.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	65.980.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		47.880.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	47.880.000,00	
	JUMLAH Kantor Kecamatan Sungai Tebelian		844.596.800,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		26.170.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		26.170.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		26.170.000,00	
0105.15.008	Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	-	15.145.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	11.025.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		251.509.600,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		180.387.600,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		14.270.000,00	
0207.15.012	Monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin	-	5.960.000,00	
0207.15.013	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	-	8.310.000,00	
0207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		8.983.600,00	
0207.16.014	Penunjang pengendalian inflasi daerah	-	8.983.600,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		88.234.000,00	
0207.17.005	Penyelenggaraan lomba/penilaian desa	-	9.080.000,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	28.540.000,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	6.540.000,00	
0207.17.020	Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah	-	10.000.000,00	
0207.17.023	Koordinasi pemecahan masalah perkebunan	-	12.609.000,00	
0207.17.024	Monitoring dan pendataan kegiatan pembangunan	-	11.000.000,00	
0207.17.026	Pelaksanaan penertiban perijinan diwilayah kecamatan	-	10.465.000,00	
0207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		17.740.000,00	
0207.18.005	Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	-	9.575.000,00	
0207.18.011	Monitoring, evaluasi, pembinaan, pelaksanaan dan pelaporan aset desa	-	8.165.000,00	
0207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		30.315.000,00	
0207.20.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	-	30.315.000,00	
0207.21	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan		20.845.000,00	
0207.21.001	Sosialisasi dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak	-	12.405.000,00	
0207.21.002	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)	-	8.440.000,00	
0213	Kepemudaan dan Olah Raga		61.130.000,00	
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		61.130.000,00	
0213.20.028	Pekan olahraga dan seni pelajar antar sekolah	-	11.130.000,00	
0213.20.031	Pelaksanaan Pertandingan Olahraga Peringatan Hari Besar Nasional/ HUT RI	-	50.000.000,00	
0216	Kebudayaan		9.992.000,00	
0216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		9.992.000,00	
0216.15.019	Gawai Dayak	-	9.992.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		481.372.760,00	
0405	Pemerintahan Umum		481.372.760,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		280.487.760,00	
0405.01.00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	360.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	360.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	14.400.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	4.500.000,00	
0405.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	160.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	20.191.018,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	10.746.500,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	2.013.000,00	
0405.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1.320.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	11.343.750,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	34.820.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	106.680.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	59.171.400,00	
0405.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	13.155.000,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	1.627.092,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		111.700.000,00	
0405.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	20.000.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	15.000.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	25.000.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	11.000.000,00	
0405.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	8.200.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	24.500.000,00	
0405.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	2.800.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	5.200.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		16.800.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	16.800.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		41.490.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	41.490.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		30.895.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	30.895.000,00	
	JUMLAH Kantor Kecamatan Kelam Permai		759.052.360,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		25.340.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		25.340.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		25.340.000,00	
0105.15.008	Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	-	15.000.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	10.340.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		261.024.660,00	
0206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		25.000.000,00	
0206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		25.000.000,00	
0206.15.058	Pelayanan penerapan e-KTP Kecamatan	-	25.000.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		166.024.660,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		23.118.000,00	
0207.15.012	Monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin	-	23.118.000,00	
0207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		10.064.160,00	
0207.16.014	Penunjang pengendalian inflasi daerah	-	10.064.160,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		94.042.500,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	38.230.500,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	23.180.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	10.000.000,00	
0207.17.021	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	-	10.266.000,00	
0207.17.023	Koordinasi pemecahan masalah perkebunan	-	12.366.000,00	
0207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		19.380.000,00	
0207.20.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	-	19.380.000,00	
0207.21	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan		19.420.000,00	
0207.21.001	Sosialisasi dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak	-	12.000.000,00	
0207.21.002	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)	-	7.420.000,00	
0213	Kepemudaan dan Olah Raga		50.000.000,00	
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		50.000.000,00	
0213.20.041	Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup	-	50.000.000,00	
0216	Kebudayaan		20.000.000,00	
0216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		20.000.000,00	
0216.15.019	Gawai Dayak	-	20.000.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		486.276.500,00	
0405	Pemerintahan Umum		486.276.500,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		289.821.500,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	1.525.500,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	4.200.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	20.600.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	20.859.000,00	
0405.01.01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	8.797.500,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	8.797.500,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	23.950.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	45.665.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	53.590.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	89.019.000,00	
0405.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	18.816.000,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	2.799.500,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		79.810.000,00	
0405.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	38.500.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	9.260.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	29.000.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	3.050.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		15.000.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	15.000.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		38.360.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	38.360.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		63.285.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	63.285.000,00	
	JUMLAH Kantor Kecamatan Binjai Hulu		772.641.160,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		49.915.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		49.915.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		49.915.000,00	
0105.15.008	Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	-	25.925.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	23.990.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		350.826.600,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		279.396.600,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		46.495.000,00	
0207.15.014	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin	-	21.490.000,00	
0207.15.015	Pembinaan pemerintah desa	-	25.005.000,00	
0207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		22.551.600,00	
0207.16.014	Penunjang pengendalian inflasi daerah	-	9.921.600,00	
0207.16.017	Pembinaan, monitoring dan evaluasi BUMDES	-	12.630.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		143.470.000,00	
0207.17.002	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	-	29.285.000,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	11.247.500,00	
0207.17.008	Penyelenggaraan lomba/penilaian desa tingkat kecamatan	-	27.995.000,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	14.972.500,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	24.090.000,00	
0207.17.021	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	-	23.850.000,00	
0207.17.036	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)	-	12.030.000,00	
0207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		4.800.000,00	
0207.18.006	Rapat kerja Camat dengan Lurah/Kades	-	4.800.000,00	
0207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		42.795.000,00	
0207.20.006	Pembinaan administrasi keuangan desa	-	42.795.000,00	
0207.21	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan		19.285.000,00	
0207.21.001	Sosialisasi dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak	-	19.285.000,00	
0213	Kepemudaan dan Olah Raga		61.430.000,00	
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		61.430.000,00	
0213.20.029	Fasilitasi pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	-	11.430.000,00	
0213.20.041	Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup	-	50.000.000,00	
0216	Kebudayaan		10.000.000,00	
0216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		10.000.000,00	
0216.15.019	Gawai Dayak	-	10.000.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		447.894.500,00	
0405	Pemerintahan Umum		447.894.500,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		323.969.500,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	930.000,00	
0405.01.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	-	9.600.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
2	listrik	-	9.600.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	5.000.000,00	
0405.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	180.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	18.004.900,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	2.623.500,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	2.046.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	6.003.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	85.040.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	133.365.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	34.647.600,00	
0405.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	20.010.000,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	6.519.500,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		67.300.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	13.500.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	27.800.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	18.000.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	8.000.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		40.235.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	40.235.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		16.390.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	16.390.000,00	
	JUMLAH Kantor Kecamatan Tempunak		848.636.100,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		54.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		54.000.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		54.000.000,00	
0105.15.008	Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	-	25.000.000,00	
0105.15.009	Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	14.500.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	14.500.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		358.162.390,00	
0206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		25.000.000,00	
0206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		25.000.000,00	
0206.15.015	Pelaksanaan e-KTP	-	25.000.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		260.338.890,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		44.500.000,00	
0207.15.012	Monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin	-	14.500.000,00	
0207.15.013	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	-	15.500.000,00	
0207.15.015	Pembinaan pemerintah desa	-	14.500.000,00	
0207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		9.241.500,00	
0207.16.014	Penunjang pengendalian inflasi daerah	-	9.241.500,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		161.597.390,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	31.000.000,00	
0207.17.007	Inventarisasi aset desa	-	14.500.000,00	
0207.17.009	Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan batas desa	-	11.500.000,00	
0207.17.013	Pembinaan UKS	-	14.750.000,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	25.794.890,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	14.750.000,00	
0207.17.021	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	-	14.750.000,00	
0207.17.023	Koordinasi pemecahan masalah perkebunan	-	22.052.500,00	
0207.17.024	Monitoring dan pendataan kegiatan pembangunan	-	12.500.000,00	
0207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		35.000.000,00	
0207.20.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	-	35.000.000,00	
0207.21	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan		10.000.000,00	
0207.21.002	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)	-	10.000.000,00	
0213	Kepemudaan dan Olah Raga		62.943.500,00	
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		62.943.500,00	
0213.20.029	Fasilitasi pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	-	13.086.500,00	
0213.20.041	Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup	-	49.857.000,00	
0216	Kebudayaan		9.880.000,00	
0216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		9.880.000,00	
0216.15.019	Gawai Dayak	-	9.880.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		691.356.730,00	
0405	Pemerintahan Umum		691.356.730,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		486.781.730,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	979.500,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	7.200.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	5.500.000,00	
0405.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	1.427.800,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	40.734.000,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	10.499.830,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	4.250.400,00	
0405.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	960.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	34.960.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	45.035.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	242.845.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	76.495.200,00	
0405.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	15.895.000,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		37.371.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	7.491.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	23.880.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	6.000.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		15.215.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	15.215.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		77.235.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	77.235.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		74.754.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	74.754.000,00	
	JUMLAH Kantor Kecamatan Dedai		1.103.519.120,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		46.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		46.000.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		46.000.000,00	
0105.15.008	Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	-	30.000.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	16.000.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		427.000.000,00	
0206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		25.000.000,00	
0206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		25.000.000,00	
0206.15.015	Pelaksanaan e-KTP	-	25.000.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		316.000.000,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		41.000.000,00	
0207.15.007	Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	-	15.000.000,00	
0207.15.012	Monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin	-	26.000.000,00	
0207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		10.000.000,00	
0207.16.014	Penunjang pengendalian inflasi daerah	-	10.000.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		213.000.000,00	
0207.17.001	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	-	19.000.000,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	40.000.000,00	
0207.17.008	Penyelenggaraan lomba/penilaian desa tingkat kecamatan	-	26.000.000,00	
0207.17.009	Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan batas desa	-	8.000.000,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	18.000.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	19.000.000,00	
0207.17.020	Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah	-	25.000.000,00	
0207.17.023	Koordinasi pemecahan masalah perkebunan	-	26.000.000,00	
0207.17.026	Pelaksanaan penertiban perijinan diwilayah kecamatan	-	20.000.000,00	
0207.17.036	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)	-	12.000.000,00	
0207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		27.000.000,00	
0207.20.006	Pembinaan administrasi keuangan desa	-	27.000.000,00	
0207.21	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan		25.000.000,00	
0207.21.001	Sosialisasi dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak	-	25.000.000,00	
0213	Kepemudaan dan Olah Raga		76.000.000,00	
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		76.000.000,00	
0213.20.006	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	-	46.000.000,00	
0213.20.029	Fasilitasi pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	-	19.000.000,00	
0213.20.041	Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup	-	11.000.000,00	
0216	Kebudayaan		10.000.000,00	
0216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		10.000.000,00	
0216.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	-	10.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		619.599.920,00	
0405	Pemerintahan Umum		619.599.920,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		302.072.500,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	1.470.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	15.000.000,00	
0405.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	6.000.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	2.200.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	38.000.000,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	8.760.000,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	2.814.100,00	
0405.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1.440.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	12.600.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	37.000.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	92.820.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	52.828.400,00	
0405.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	28.640.000,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	2.500.000,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		173.967.920,00	
0405.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	11.000.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	34.968.880,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	27.000.000,00	
0405.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	-	49.464.520,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	42.134.520,00	
0405.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	2.400.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	7.000.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		25.000.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	0,00	
0405.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	25.000.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		70.000.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	70.000.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		48.559.500,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	48.559.500,00	
	JUMLAH Kantor Kecamatan Sepauk		1.092.599.920,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		293.723.400,00	
0206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		18.920.000,00	
0206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		18.920.000,00	
0206.15.058	Pelayanan penerapan e-KTP Kecamatan	-	18.920.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		204.038.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		115.890.000,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	50.930.000,00	
0207.17.008	Penyelenggaraan lomba/penilaian desa tingkat kecamatan	-	29.935.000,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	23.550.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	11.475.000,00	
0207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		55.322.600,00	
0207.20.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	-	55.322.600,00	
0207.21	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan		32.825.400,00	
0207.21.001	Sosialisasi dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak	-	32.825.400,00	
0213	Kepemudaan dan Olah Raga		50.275.400,00	
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		50.275.400,00	
0213.20.041	Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup	-	50.275.400,00	
0216	Kebudayaan		20.490.000,00	
0216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		20.490.000,00	
0216.15.019	Gawai Dayak	-	20.490.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		535.250.400,00	
0405	Pemerintahan Umum		535.250.400,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		369.656.400,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	2.100.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	13.819.500,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	14.067.900,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	22.271.000,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	12.925.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	21.413.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	43.880.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	145.355.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	73.495.200,00	
0405.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	15.800.000,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	4.529.800,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		35.000.000,00	
0405.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	35.000.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		10.800.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	10.800.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		63.615.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	63.615.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		56.179.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	56.179.000,00	
	JUMLAH Kantor Kecamatan Ketungau Hilir		828.973.800,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		25.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		25.000.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		25.000.000,00	
0105.15.008	Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	-	25.000.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		233.564.600,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		125.564.600,00	
0207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		11.030.400,00	
0207.16.014	Penunjang pengendalian inflasi daerah	-	11.030.400,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		109.465.000,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	48.870.000,00	
0207.17.008	Penyelenggaraan lomba/penilaian desa tingkat kecamatan	-	21.420.000,00	
0207.17.009	Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan batas desa	-	3.010.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	15.000.000,00	
0207.17.023	Koordinasi pemecahan masalah perkebunan	-	21.165.000,00	
0207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		5.069.200,00	
0207.18.006	Rapat kerja Camat dengan Lurah/Kades	-	5.069.200,00	
0213	Kepemudaan dan Olah Raga		98.000.000,00	
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		98.000.000,00	
0213.20.029	Fasilitasi pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	-	4.500.000,00	
0213.20.031	Pelaksanaan Pertandingan Olahraga Peringatan Hari Besar Nasional/ HUT RI	-	43.500.000,00	
0213.20.041	Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup	-	50.000.000,00	
0216	Kebudayaan		10.000.000,00	
0216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		10.000.000,00	
0216.15.019	Gawai Dayak	-	10.000.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		686.654.400,00	
0405	Pemerintahan Umum		686.654.400,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		455.565.000,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	7.900.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	15.600.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	4.500.000,00	
0405.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	160.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	50.044.400,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	14.621.000,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	10.000.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	23.100.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	48.275.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	224.190.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	32.619.600,00	
0405.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	23.520.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	1.035.000,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		104.593.000,00	
0405.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	41.980.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	21.000.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	14.500.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	4.500.000,00	
0405.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	6.000.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	16.613.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		15.300.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	15.300.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		39.970.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	39.970.000,00	
0405.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		10.736.400,00	
0405.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	1.789.400,00	
0405.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	1.789.400,00	
0405.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	1.789.400,00	
0405.06.017	Penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT)	-	1.789.400,00	
0405.06.018	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	-	1.789.400,00	
0405.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	1.789.400,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		60.490.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	60.490.000,00	
	JUMLAH Kantor Kecamatan Ketungau Tengah		945.219.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		40.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		40.000.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		10.000.000,00	
0105.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	10.000.000,00	
0105.24	Program Fasilitas Peningkatan Demokrasi dan Pemilu		30.000.000,00	
0105.24.007	pemantauan distribusi logistik dan posko penyelenggaraan pilkada	-	30.000.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		189.240.200,00	
0206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		48.500.000,00	
0206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		48.500.000,00	
0206.15.014	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	23.500.000,00	
0206.15.015	Pelaksanaan e-KTP	-	25.000.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		80.740.200,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		10.000.000,00	
0207.15.012	Monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin	-	10.000.000,00	
0207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		12.040.200,00	
0207.16.014	Penunjang pengendalian inflasi daerah	-	12.040.200,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		44.700.000,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	24.700.000,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	10.000.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	10.000.000,00	
0207.21	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan		14.000.000,00	
0207.21.002	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)	-	14.000.000,00	
0213	Kepemudaan dan Olah Raga		50.000.000,00	
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		50.000.000,00	
0213.20.006	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	-	50.000.000,00	
0216	Kebudayaan		10.000.000,00	
0216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		10.000.000,00	
0216.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	-	10.000.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		639.530.400,00	
0405	Pemerintahan Umum		639.530.400,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		414.971.400,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	2.100.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	3.600.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	1.500.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	22.580.200,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	3.300.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	20.735.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	32.495.000,00	
0405.01.01	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam	-	260.335.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
9	daerah	-	260.335.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	54.371.400,00	
0405.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	10.000.000,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	3.954.800,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		111.614.000,00	
0405.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	100.000.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	11.614.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		59.955.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	59.955.000,00	
0405.20	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan dan Informasi Pelayanan Publik		21.165.000,00	
0405.20.002	Fasilitasi penyelesaian masalah perkebunan dan kehutanan	-	21.165.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		31.825.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	31.825.000,00	
	JUMLAH Kantor Kecamatan Ketungau Hulu		868.770.600,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		40.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		40.000.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		40.000.000,00	
0105.15.008	Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	-	30.000.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	10.000.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		320.000.000,00	
0206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		25.000.000,00	
0206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		25.000.000,00	
0206.15.015	Pelaksanaan e-KTP	-	25.000.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		230.000.000,00	
0207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		10.000.000,00	
0207.16.012	Operasi Pasar	-	10.000.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		120.000.000,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	15.000.000,00	
0207.17.008	Penyelenggaraan lomba/penilaian desa tingkat kecamatan	-	15.000.000,00	
0207.17.009	Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan batas desa	-	10.000.000,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	15.000.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	10.000.000,00	
0207.17.021	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	-	30.000.000,00	
0207.17.023	Koordinasi pemecahan masalah perkebunan	-	25.000.000,00	
0207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		5.000.000,00	
0207.18.006	Rapat kerja Camat dengan Lurah/Kades	-	5.000.000,00	
0207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		50.000.000,00	
0207.20.006	Pembinaan administrasi keuangan desa	-	50.000.000,00	
0207.21	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan		45.000.000,00	
0207.21.001	Sosialisasi dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak	-	30.000.000,00	
0207.21.002	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)	-	15.000.000,00	
0213	Kepemudaan dan Olah Raga		50.000.000,00	
0213.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda		10.000.000,00	
0213.15.005	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	-	10.000.000,00	
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		40.000.000,00	
0213.20.037	Kompetisi Olahraga Tradisonal	-	10.000.000,00	
0213.20.041	Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup	-	30.000.000,00	
0216	Kebudayaan		15.000.000,00	
0216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		15.000.000,00	
0216.15.019	Gawai Dayak	-	15.000.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		582.086.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		582.086.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		490.551.000,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	600.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	9.000.000,00	
0405.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	16.800.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	18.000.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	31.464.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	203.825.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	86.950.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	109.800.000,00	
0405.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	14.112.000,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		45.000.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	30.000.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	15.000.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		43.535.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	43.535.000,00	
0405.26	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah		3.000.000,00	
0405.26.003	Pengambilan sumpah/jani PNS dan pelantikan pejabat struktural	-	3.000.000,00	
	JUMLAH Kantor Kecamatan Kayan Hilir		942.086.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		230.978.100,00	
0206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		24.520.000,00	
0206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		24.520.000,00	
0206.15.015	Pelaksanaan e-KTP	-	24.520.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		161.310.100,00	
0207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		11.666.600,00	
0207.16.012	Operasi Pasar	-	11.666.600,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		114.492.500,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	35.332.500,00	
0207.17.008	Penyelenggaraan lomba/penilaian desa tingkat kecamatan	-	26.215.000,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	12.920.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	15.205.000,00	
0207.17.023	Koordinasi pemecahan masalah perkebunan	-	24.820.000,00	
0207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		9.406.000,00	
0207.18.006	Rapat kerja Camat dengan Lurah/Kades	-	9.406.000,00	
0207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		25.745.000,00	
0207.20.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	-	25.745.000,00	
0213	Kepemudaan dan Olah Raga		31.278.000,00	
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		31.278.000,00	
0213.20.041	Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup	-	31.278.000,00	
0216	Kebudayaan		13.870.000,00	
0216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		13.870.000,00	
0216.15.019	Gawai Dayak	-	13.870.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		617.236.600,00	
0405	Pemerintahan Umum		617.236.600,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		429.890.600,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	2.550.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	2.400.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	15.302.300,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	21.548.350,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	14.575.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	53.314.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	121.220.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	194.400.000,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	4.580.950,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		35.000.000,00	
0405.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	35.000.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		127.760.000,00	
0405.05.00	Pendidikan dan pelatihan formal	-	127.760.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
1	Pendidikan dan pelatihan formal	-	127.760.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		24.586.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	24.586.000,00	
	JUMLAH Kantor Kecamatan Kayan Hulu		848.214.700,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		20.805.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		20.805.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		20.805.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	20.805.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		244.045.400,00	
0206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		24.900.000,00	
0206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		24.900.000,00	
0206.15.015	Pelaksanaan e-KTP	-	24.900.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		169.227.800,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		43.940.000,00	
0207.15.015	Pembinaan pemerintah desa	-	43.940.000,00	
0207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		11.065.400,00	
0207.16.014	Penunjang pengendalian inflasi daerah	-	11.065.400,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		71.182.400,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	27.332.400,00	
0207.17.020	Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah	-	19.380.000,00	
0207.17.023	Koordinasi pemecahan masalah perkebunan	-	24.470.000,00	
0207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		23.660.000,00	
0207.20.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	-	23.660.000,00	
0207.21	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan		19.380.000,00	
0207.21.002	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)	-	19.380.000,00	
0213	Kepemudaan dan Olah Raga		49.917.600,00	
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		49.917.600,00	
0213.20.041	Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup	-	49.917.600,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		680.254.650,00	
0405	Pemerintahan Umum		680.254.650,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		419.140.650,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	2.790.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	13.980.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	12.612.450,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	32.899.800,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	14.245.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	76.562.400,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	164.820.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	72.343.200,00	
0405.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	25.700.000,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	3.187.800,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		99.500.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	30.000.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	23.000.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	6.000.000,00	
0405.02.031	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan kantor	-	20.500.000,00	
0405.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	20.000.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		83.185.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	83.185.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		78.429.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	78.429.000,00	
	JUMLAH Kantor Kecamatan Serawai		945.105.050,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		281.822.360,00	
0206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		18.082.400,00	
0206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		18.082.400,00	
0206.15.015	Pelaksanaan e-KTP	-	18.082.400,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		149.317.560,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		114.965.860,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	44.207.500,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	23.866.100,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	18.686.800,00	
0207.17.020	Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah	-	9.080.000,00	
0207.17.023	Koordinasi pemecahan masalah perkebunan	-	19.125.460,00	
0207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		12.659.700,00	
0207.18.006	Rapat kerja Camat dengan Lurah/Kades	-	12.659.700,00	
0207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		6.992.000,00	
0207.20.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	-	6.992.000,00	
0207.21	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan		14.700.000,00	
0207.21.002	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)	-	14.700.000,00	
0213	Kepemudaan dan Olah Raga		87.595.000,00	
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		87.595.000,00	
0213.20.031	Pelaksanaan Pertandingan Olahraga Peringatan Hari Besar Nasional/ HUT RI	-	37.800.000,00	
0213.20.041	Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup	-	49.795.000,00	
0216	Kebudayaan		26.827.400,00	
0216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		26.827.400,00	
0216.15.019	Gawai Dayak	-	26.827.400,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		565.138.320,00	
0405	Pemerintahan Umum		565.138.320,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		337.916.320,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	2.850.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	4.740.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	1.800.000,00	
0405.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	4.979.120,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	13.748.100,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	3.591.500,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	6.936.600,00	
0405.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1.980.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	12.673.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	99.110.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	15.170.000,00	
0405.01.02	Penyediaan tenaga kontrak	-	146.988.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0	Penyediaan tenaga kontrak	-	146.988.000,00	
0405.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	23.350.000,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		69.020.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	8.660.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	6.600.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	4.000.000,00	
0405.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	9.500.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	4.310.000,00	
0405.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	35.950.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		5.650.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	5.650.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		81.310.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	81.310.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		71.242.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	47.309.000,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	23.933.000,00	
	JUMLAH Kantor Kecamatan Ambalau		846.960.680,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		245.741.376,00	
0206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		25.000.000,00	
0206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		25.000.000,00	
0206.15.015	Pelaksanaan e-KTP	-	25.000.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		190.786.876,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		19.304.800,00	
0207.15.014	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin	-	9.384.800,00	
0207.15.019	Pembinaan, pengembangan dan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan kepariwisataan	-	9.920.000,00	
0207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		4.590.000,00	
0207.16.014	Penunjang pengendalian inflasi daerah	-	4.590.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		145.392.876,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	20.059.201,00	
0207.17.007	Inventarisasi aset desa	-	10.000.000,00	
0207.17.008	Penyelenggaraan lomba/penilaian desa tingkat kecamatan	-	22.439.000,00	
0207.17.009	Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan batas desa	-	15.000.000,00	
0207.17.013	Pembinaan UKS	-	8.566.500,00	
0207.17.020	Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah	-	26.130.000,00	
0207.17.021	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	-	7.500.000,00	
0207.17.023	Koordinasi pemecahan masalah perkebunan	-	13.278.175,00	
0207.17.024	Monitoring dan pendataan kegiatan pembangunan	-	9.920.000,00	
0207.17.033	Penyuluhan dan Peringatan PKK	-	12.500.000,00	
0207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		17.500.000,00	
0207.20.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	-	17.500.000,00	
0207.21	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan		3.999.200,00	
0207.21.002	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)	-	3.999.200,00	
0213	Kepemudaan dan Olah Raga		9.963.600,00	
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		9.963.600,00	
0213.20.029	Fasilitasi pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	-	9.963.600,00	
0214	Statistik		10.000.000,00	
0214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		10.000.000,00	
0214.15.010	Penyusunan profil kecamatan	-	10.000.000,00	
0216	Kebudayaan		9.990.900,00	
0216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya		9.990.900,00	
0216.15.019	Gawai Dayak	-	9.990.900,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		833.827.919,00	
0405	Pemerintahan Umum		833.827.919,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		548.734.075,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	2.250.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	37.200.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	2.600.000,00	
0405.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	400.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	38.460.200,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	9.460.000,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	7.508.600,00	
0405.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	3.000.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	64.107.900,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	58.455.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	42.980.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	270.595.200,00	
0405.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	7.728.000,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	3.989.175,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		51.573.196,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	5.400.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	22.000.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	15.678.500,00	
0405.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	3.494.696,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	5.000.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		16.800.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	16.800.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		85.630.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	85.630.000,00	
0405.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		20.112.250,00	
0405.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	11.636.400,00	
0405.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	3.476.350,00	
0405.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	4.999.500,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		100.242.400,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	100.242.400,00	
0405.26	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah		10.735.998,00	
0405.26.003	Pengambilan sumpah/jani PNS dan pelantikan pejabat struktural	-	10.735.998,00	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		379.762.200,00	
0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		250.000.000,00	
0103.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		250.000.000,00	
0103.15.003	Pembangunan jalan	-	250.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		129.762.200,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		129.762.200,00	
0105.15.002	Pembangunan pos jaga/ronda	-	120.337.200,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	9.425.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		69.547.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		69.547.000,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		27.808.600,00	
0207.15.002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	-	11.673.600,00	
0207.15.013	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	-	9.425.000,00	
0207.15.034	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	-	6.710.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		41.738.400,00	
0207.17.013	Pembinaan UKS	-	7.540.000,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	7.670.400,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	9.425.000,00	
0207.17.022	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	-	12.103.000,00	
0207.17.034	Penegasan batas wilayah kelurahan	-	5.000.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		299.148.500,00	
0405	Pemerintahan Umum		299.148.500,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		138.847.500,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	810.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	14.064.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	350.000,00	
0405.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	180.000,00	
0405.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	2.445.300,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	25.912.200,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	3.581.000,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	1.800.000,00	
0405.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1.080.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	8.378.600,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	28.275.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	51.971.400,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		47.700.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	40.100.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	2.800.000,00	
0405.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	2.400.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	2.400.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		8.900.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	8.900.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		60.670.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	60.670.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		43.031.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	43.031.000,00	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		392.770.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0102	Kesehatan		19.990.000,00	
0102.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		14.140.000,00	
0102.21.002	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	-	14.140.000,00	
0102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		5.850.000,00	
0102.29.004	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	-	5.850.000,00	
0104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		362.460.000,00	
0104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		362.460.000,00	
0104.16.007	Pembangunan jalan lingkungan perumahan	-	115.000.000,00	
0104.16.009	Peningkatan jalan lingkungan perumahan	-	132.460.000,00	
0104.16.016	Pembangunan sanitasi	-	115.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		10.320.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		10.320.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	10.320.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		36.440.500,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		36.440.500,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		10.320.000,00	
0207.15.013	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	-	10.320.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		26.120.500,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	2.740.500,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	13.390.000,00	
0207.17.022	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	-	9.990.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		213.239.500,00	
0405	Pemerintahan Umum		213.239.500,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		83.129.500,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	845.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	8.280.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	500.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	13.097.700,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	2.310.000,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	776.000,00	
0405.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1.080.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	8.700.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	10.155.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	18.345.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	17.323.800,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	1.717.000,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		49.410.000,00	
0405.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	17.500.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	11.100.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	14.510.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	4.500.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	1.800.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		5.520.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	5.520.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		67.680.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	67.680.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		7.500.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	7.500.000,00	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		391.950.000,00	
0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		275.000.000,00	
0103.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		175.000.000,00	
0103.16.001	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	-	175.000.000,00	
0103.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		100.000.000,00	
0103.24.002	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum	-	100.000.000,00	
0104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		109.000.000,00	
0104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		109.000.000,00	
0104.16.007	Pembangunan jalan lingkungan perumahan	-	109.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		7.950.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		7.950.000,00	
0105.15.001	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	7.950.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		48.187.425,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		48.187.425,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		3.400.000,00	
0207.15.019	Pembinaan, pengembangan dan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan kepariwisataan	-	3.400.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		44.787.425,00	
0207.17.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan posyandu dan poskesdes	-	8.640.000,00	
0207.17.020	Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah	-	12.840.000,00	
0207.17.022	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	-	10.587.425,00	
0207.17.025	Penataan lingkungan	-	12.720.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		205.890.575,00	
0405	Pemerintahan Umum		205.890.575,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		94.919.575,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	3.470.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	1.200.000,00	
0405.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	3.757.975,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	13.794.000,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	6.600.000,00	
0405.01.01	Penyediaan makanan dan minuman	-	13.110.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
7	Penyediaan makanan dan minuman	-	13.110.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	13.540.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	39.447.600,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		45.500.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	9.000.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	14.000.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	9.000.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	7.500.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	6.000.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		18.000.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	18.000.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		33.290.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	33.290.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		14.181.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	14.181.000,00	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		470.950.117,00	
0102	Kesehatan		23.485.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		8.985.000,00	
0102.16.009	Peningkatan kesehatan masyarakat	-	8.985.000,00	
0102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		14.500.000,00	
0102.20.002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	-	14.500.000,00	
0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		421.485.117,00	
0103.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		235.965.363,00	
0103.15.003	Pembangunan jalan	-	235.965.363,00	
0103.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		185.519.754,00	
0103.16.003	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	-	185.519.754,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		25.980.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		25.980.000,00	
0105.15.002	Pembangunan pos jaga/ronda	-	20.600.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	5.380.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		50.914.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		50.914.000,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		32.009.000,00	
0207.15.006	PAP Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM)	-	6.031.000,00	
0207.15.013	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	-	5.380.000,00	
0207.15.021	Pembinaan dan penyuluhan masyarakat	-	20.598.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		18.905.000,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	6.031.000,00	
0207.17.022	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	-	12.874.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		206.991.600,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405	Pemerintahan Umum		206.991.600,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		98.924.890,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	540.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	14.040.000,00	
0405.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	320.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	11.906.900,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	1.320.000,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	766.000,00	
0405.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1.026.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	6.292.800,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	13.185.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	31.180.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	17.323.800,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	1.024.390,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		28.690.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	13.200.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	8.140.000,00	
0405.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	2.600.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	3.200.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	1.550.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		9.450.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	9.450.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		55.160.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	53.550.000,00	
0405.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	1.610.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		14.766.710,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	14.766.710,00	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		319.890.000,00	
0102	Kesehatan		55.000.000,00	
0102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		20.000.000,00	
0102.20.002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	-	20.000.000,00	
0102.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		20.000.000,00	
0102.21.002	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	-	20.000.000,00	
0102.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		15.000.000,00	
0102.25.011	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu	-	15.000.000,00	
0104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		259.000.000,00	
0104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		259.000.000,00	
0104.16.002	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	-	3.000.000,00	
0104.16.007	Pembangunan jalan lingkungan perumahan	-	66.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0104.16.011	Pembangunan MCK	-	5.000.000,00	
0104.16.016	Pembangunan sanitasi	-	50.000.000,00	
0104.16.017	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	-	45.000.000,00	
0104.16.018	Penerangan jalan permukiman	-	80.000.000,00	
0104.16.021	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	-	10.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		5.890.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		5.890.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	5.890.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		65.275.000,00	
0206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		6.970.000,00	
0206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		6.970.000,00	
0206.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	-	6.970.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		58.305.000,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		13.195.000,00	
0207.15.013	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	-	7.540.000,00	
0207.15.019	Pembinaan, pengembangan dan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan kepariwisataan	-	5.655.000,00	
0207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		9.000.000,00	
0207.16.009	Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan	-	9.000.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		36.110.000,00	
0207.17.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan posyandu dan poskesdes	-	4.280.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	7.035.000,00	
0207.17.022	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	-	2.635.000,00	
0207.17.025	Penataan lingkungan	-	2.160.000,00	
0207.17.037	Optimalisasi pembinaan posyandu dan PKK	-	20.000.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		242.835.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		242.835.000,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		119.960.000,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	630.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	14.400.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	1.000.000,00	
0405.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	400.000,00	
0405.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	3.300.165,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	25.769.935,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	1.897.500,00	
0405.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1.320.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	6.729.800,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	11.385.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	17.280.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	35.847.600,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		53.220.000,00	
0405.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	25.000.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	23.000.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	2.400.000,00	
0405.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	1.620.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	1.200.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		6.000.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	6.000.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		38.655.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	38.655.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		25.000.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	25.000.000,00	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		191.460.000,00	
0102	Kesehatan		184.000.000,00	
0102.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		184.000.000,00	
0102.25.005	Pembangunan posyandu	-	184.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		7.460.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		7.460.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	7.460.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		53.109.600,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		42.849.600,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		5.850.000,00	
0207.15.013	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	-	5.850.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		36.999.600,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	7.460.000,00	
0207.17.022	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	-	9.999.800,00	
0207.17.024	Monitoring dan pendataan kegiatan pembangunan	-	7.460.000,00	
0207.17.033	Penyuluhan dan Peringatan PKK	-	7.034.800,00	
0207.17.037	Optimalisasi pembinaan posyandu dan PKK	-	5.045.000,00	
0210	Komunikasi dan Informatika		10.260.000,00	
0210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		10.260.000,00	
0210.15.019	Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Domain, Hosting dan Website Pemerintah Daerah	-	10.260.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		439.427.570,00	
0405	Pemerintahan Umum		439.427.570,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		147.682.770,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	1.200.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	24.996.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	600.000,00	
0405.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	320.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	24.999.900,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	6.599.780,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	2.000.000,00	
0405.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1.200.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	18.674.500,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	10.845.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	15.900.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	35.847.600,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	4.499.990,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		224.619.800,00	
0405.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	200.000.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	7.386.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	9.583.800,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	2.500.000,00	
0405.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	1.200.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	3.950.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		8.500.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	8.500.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		48.595.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	48.595.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		10.030.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	10.030.000,00	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		305.500.000,00	
0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		100.000.000,00	
0103.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		100.000.000,00	
0103.16.003	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	-	100.000.000,00	
0104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		200.000.000,00	
0104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		120.000.000,00	
0104.16.007	Pembangunan jalan lingkungan perumahan	-	100.000.000,00	
0104.16.021	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	-	20.000.000,00	
0104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		80.000.000,00	
0104.19.001	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran	-	80.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		5.500.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		5.500.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	5.500.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		31.757.500,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		31.757.500,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		22.324.500,00	
0207.15.011	Kompetisi desa dan kader desa dalam upaya pencegahan stunting	-	16.824.500,00	
0207.15.013	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	-	5.500.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		9.433.000,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	2.185.000,00	
0207.17.022	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	-	1.748.000,00	
0207.17.024	Monitoring dan pendataan kegiatan pembangunan	-	5.500.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		296.742.500,00	
0405	Pemerintahan Umum		296.742.500,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		114.901.500,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	750.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	15.720.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	4.920.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	11.030.100,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	2.640.000,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	1.806.600,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	6.555.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	12.420.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	39.140.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	17.323.800,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	2.596.000,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		116.206.000,00	
0405.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	35.000.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	32.175.500,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	24.800.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	18.000.000,00	
0405.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	3.580.500,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	2.650.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		8.470.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	8.470.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		46.880.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	46.880.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		10.285.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	10.285.000,00	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		361.860.000,00	
0102	Kesehatan		28.533.000,00	
0102.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		19.250.000,00	
0102.25.011	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu	-	19.250.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		9.283.000,00	
0102.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	-	2.338.000,00	
0102.29.003	Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita	-	5.775.000,00	
0102.29.004	Pelatihan dan pendidikan perawat anak balita	-	1.170.000,00	
0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		72.761.000,00	
0103.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		72.761.000,00	
0103.16.003	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	-	72.761.000,00	
0104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		252.706.000,00	
0104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		242.706.000,00	
0104.16.009	Peningkatan jalan lingkungan perumahan	-	144.206.000,00	
0104.16.016	Pembangunan sanitasi	-	30.000.000,00	
0104.16.019	Pengadaan Sarana dan Prasana Pengelolaan Persampahan	-	68.500.000,00	
0104.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		10.000.000,00	
0104.19.014	Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan	-	10.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		7.860.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		7.860.000,00	
0105.15.005	Pengendalian keamanan lingkungan	-	4.230.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	3.630.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		76.644.000,00	
0206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		4.230.000,00	
0206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		4.230.000,00	
0206.15.009	Pengembangan data base kependudukan	-	4.230.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		72.414.000,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		38.660.000,00	
0207.15.022	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	-	4.230.000,00	
0207.15.025	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	-	4.430.000,00	
0207.15.042	Pengembangan minat dan budaya baca	-	30.000.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		33.754.000,00	
0207.17.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan posyandu dan poskesdes	-	4.230.000,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	4.280.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	3.630.000,00	
0207.17.020	Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah	-	3.630.000,00	
0207.17.022	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	-	5.980.000,00	
0207.17.024	Monitoring dan pendataan kegiatan pembangunan	-	3.130.000,00	
0207.17.033	Penyuluhan dan Peringatan PKK	-	3.305.000,00	
0207.17.034	Penegasan batas wilayah kelurahan	-	1.610.000,00	
0207.17.037	Optimalisasi pembinaan posyandu dan PKK	-	3.959.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		195.496.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		195.496.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		101.826.000,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	660.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	9.000.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	2.100.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	20.658.000,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	4.453.500,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	7.220.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	37.300.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	19.557.000,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	877.500,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		18.000.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	8.000.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	8.000.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	2.000.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		7.200.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	7.200.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		61.150.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	61.150.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		7.320.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	7.320.000,00	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		390.300.000,00	
0102	Kesehatan		20.810.000,00	
0102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		16.200.000,00	
0102.20.002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	-	16.200.000,00	
0102.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		4.610.000,00	
0102.21.002	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	-	4.610.000,00	
0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		343.190.000,00	
0103.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		171.595.000,00	
0103.15.003	Pembangunan jalan	-	171.595.000,00	
0103.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		171.595.000,00	
0103.16.003	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	-	171.595.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		26.300.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		26.300.000,00	
0105.15.002	Pembangunan pos jaga/ronda	-	20.000.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	6.300.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		25.110.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		25.110.000,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		6.810.000,00	
0207.15.013	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	-	6.810.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		18.300.000,00	
0207.17.002	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	-	7.820.000,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	3.220.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	7.260.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		218.590.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		218.590.000,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		84.280.000,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	950.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	1.656.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	5.000.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	15.515.650,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	2.475.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	4.370.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	11.385.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	25.625.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	16.723.800,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	579.550,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		64.000.000,00	
0405.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	43.000.000,00	
0405.02.013	Sewa Gedung Kantor	-	18.000.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	3.000.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		5.500.000,00	
0405.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	5.500.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		59.810.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	59.810.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		5.000.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	5.000.000,00	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		384.375.000,00	
0102	Kesehatan		11.160.000,00	
0102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		11.160.000,00	
0102.20.002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	-	11.160.000,00	
0104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		352.000.000,00	
0104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		352.000.000,00	
0104.16.002	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	-	152.000.000,00	
0104.16.009	Peningkatan jalan lingkungan perumahan	-	200.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		21.215.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		21.215.000,00	
0105.15.002	Pembangunan pos jaga/ronda	-	17.090.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	4.125.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		25.171.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		25.171.000,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		3.750.000,00	
0207.15.021	Pembinaan dan penyuluhan masyarakat	-	3.750.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		21.421.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	4.125.000,00	
0207.17.022	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	-	6.010.000,00	
0207.17.034	Penegasan batas wilayah kelurahan	-	4.125.000,00	
0207.17.037	Optimalisasi pembinaan posyandu dan PKK	-	7.161.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		224.454.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		224.454.000,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		83.249.000,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	510.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	1.800.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	600.000,00	
0405.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	240.000,00	
0405.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	1.151.700,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	12.403.600,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	896.100,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	7.920.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	20.680.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	37.047.600,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		70.590.000,00	
0405.02.003	Pembangunan gedung kantor	-	12.320.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	8.690.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	20.350.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	13.046.000,00	
0405.02.013	Sewa Gedung Kantor	-	11.000.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	2.984.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	2.200.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		8.085.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	5.390.000,00	
0405.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	2.695.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		55.010.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	55.010.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		7.520.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	7.520.000,00	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		388.240.000,00	
0102	Kesehatan		30.660.000,00	
0102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		26.040.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0102.20.002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	-	26.040.000,00	
0102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		4.620.000,00	
0102.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	-	4.620.000,00	
0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		150.000.000,00	
0103.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		100.000.000,00	
0103.15.005	Pembangunan jembatan	-	100.000.000,00	
0103.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		50.000.000,00	
0103.16.003	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	-	50.000.000,00	
0104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		200.000.000,00	
0104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		200.000.000,00	
0104.16.007	Pembangunan jalan lingkungan perumahan	-	200.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		7.580.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		7.580.000,00	
0105.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	3.340.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	4.240.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		23.110.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		23.110.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		23.110.000,00	
0207.17.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan posyandu dan poskesdes	-	6.360.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	4.240.000,00	
0207.17.022	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	-	2.067.500,00	
0207.17.024	Monitoring dan pendataan kegiatan pembangunan	-	4.240.000,00	
0207.17.033	Penyuluhan dan Peringatan PKK	-	1.962.500,00	
0207.17.034	Penegasan batas wilayah kelurahan	-	4.240.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		222.650.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		222.650.000,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		91.509.500,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	450.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	9.168.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	1.500.000,00	
0405.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	160.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	12.009.400,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	2.420.300,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	770.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	5.775.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	4.880.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	18.040.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	34.647.600,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	1.689.200,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		82.620.500,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	26.000.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	21.000.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	9.320.000,00	
0405.02.013	Sewa Gedung Kantor	-	20.000.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	3.300.500,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	3.000.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		6.600.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	6.600.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		32.900.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	32.900.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		9.020.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	9.020.000,00	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		345.950.000,00	
0104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		320.000.000,00	
0104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		300.000.000,00	
0104.16.007	Pembangunan jalan lingkungan perumahan	-	100.000.000,00	
0104.16.009	Peningkatan jalan lingkungan perumahan	-	100.000.000,00	
0104.16.016	Pembangunan sanitasi	-	100.000.000,00	
0104.20	Program pengelolaan areal pemakaman		20.000.000,00	
0104.20.006	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	-	20.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		25.950.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		25.950.000,00	
0105.15.002	Pembangunan pos jaga/ronda	-	20.000.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	5.950.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		66.794.600,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		66.794.600,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		10.191.500,00	
0207.15.013	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	-	5.375.000,00	
0207.15.021	Pembinaan dan penyuluhan masyarakat	-	4.816.500,00	
0207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		19.227.500,00	
0207.16.004	Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan perternakan	-	4.227.500,00	
0207.16.005	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	-	15.000.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		37.375.600,00	
0207.17.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan posyandu dan poskesdes	-	3.260.000,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	3.770.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	3.680.000,00	
0207.17.022	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	-	6.709.600,00	
0207.17.033	Penyuluhan dan Peringatan PKK	-	6.700.000,00	
0207.17.03	Optimalisasi pembinaan posyandu dan PKK	-	13.256.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
7	Optimalisasi pembinaan posyandu dan PKK	-	13.256.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		221.255.400,00	
0405	Pemerintahan Umum		221.255.400,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		106.435.400,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	803.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	9.690.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	660.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	11.035.000,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	2.239.400,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	981.800,00	
0405.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1.200.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	4.370.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	14.920.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	22.620.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	37.047.600,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	868.600,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		39.550.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	13.100.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	14.000.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	4.950.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	4.000.000,00	
0405.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	1.000.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	2.500.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		5.850.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	5.850.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		60.520.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	60.520.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		8.900.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	8.900.000,00	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		325.354.000,00	
0104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		281.061.000,00	
0104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		281.061.000,00	
0104.16.007	Pembangunan jalan lingkungan perumahan	-	238.061.000,00	
0104.16.017	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	-	43.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		44.293.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		44.293.000,00	
0105.15.002	Pembangunan pos jaga/ronda	-	40.000.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	4.293.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		76.348.500,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		76.348.500,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		23.260.000,00	
0207.15.019	Pembinaan, pengembangan dan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan kepariwisataan	-	3.260.000,00	
0207.15.021	Pembinaan dan penyuluhan masyarakat	-	20.000.000,00	
0207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		30.733.000,00	
0207.16.004	Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan perternakan	-	10.383.000,00	
0207.16.005	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	-	20.350.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		22.355.500,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	3.260.000,00	
0207.17.022	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	-	6.889.500,00	
0207.17.037	Optimalisasi pembinaan posyandu dan PKK	-	12.206.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		232.297.500,00	
0405	Pemerintahan Umum		232.297.500,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		106.652.450,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	450.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	6.030.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	288.000,00	
0405.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	240.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	12.478.800,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	2.715.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	3.519.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	3.795.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	21.190.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	54.371.400,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	1.575.250,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		67.670.050,00	
0405.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	33.092.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	1.950.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	30.628.050,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	2.000.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		52.975.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	52.975.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		5.000.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	5.000.000,00	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		379.195.000,00	
0104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		245.067.000,00	
0104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		245.067.000,00	
0104.16.002	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	-	167.000.000,00	
0104.16.004	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	-	50.000.000,00	
0104.16.01	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan	-	28.067.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
7	bahaya kebakaran	-	28.067.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		134.128.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		128.528.000,00	
0105.15.002	Pembangunan pos jaga/ronda	-	100.000.000,00	
0105.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	19.453.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	9.075.000,00	
0105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		5.600.000,00	
0105.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	-	5.600.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		50.262.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		50.262.000,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		26.230.000,00	
0207.15.007	Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	-	9.425.000,00	
0207.15.019	Pembinaan, pengembangan dan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan kepariwisataan	-	2.925.000,00	
0207.15.021	Pembinaan dan penyuluhan masyarakat	-	13.880.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		24.032.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	4.025.000,00	
0207.17.022	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	-	5.950.000,00	
0207.17.037	Optimalisasi pembinaan posyandu dan PKK	-	14.057.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		204.543.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		204.543.000,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		93.790.700,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	540.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	12.120.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	500.000,00	
0405.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	240.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	18.748.100,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	2.905.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	4.400.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	18.850.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	34.647.600,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	840.000,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		58.949.400,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	4.400.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	10.450.000,00	
0405.02.014	Pengadaan pemasangan listrik (tambah daya)	-	4.000.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	2.309.000,00	
0405.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	600.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	2.000.000,00	
0405.02.04	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	35.190.400,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	35.190.400,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		7.700.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	7.700.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		31.575.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	31.575.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		12.527.900,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	12.527.900,00	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		386.000.000,00	
0104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		384.000.000,00	
0104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		384.000.000,00	
0104.16.002	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	-	150.000.000,00	
0104.16.009	Peningkatan jalan lingkungan perumahan	-	198.000.000,00	
0104.16.016	Pembangunan sanitasi	-	36.000.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		2.000.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		2.000.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	2.000.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		14.000.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		14.000.000,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		2.000.000,00	
0207.15.019	Pembinaan, pengembangan dan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan kepariwisataan	-	2.000.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		12.000.000,00	
0207.17.009	Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan batas desa	-	2.000.000,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	6.000.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	2.000.000,00	
0207.17.022	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan	-	2.000.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		234.000.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		234.000.000,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		95.140.000,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	570.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	600.000,00	
0405.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	240.000,00	
0405.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	2.968.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	12.742.540,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	2.851.860,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	2.000.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	5.200.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	13.855.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	17.065.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	37.047.600,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		58.000.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	20.000.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	25.000.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	10.000.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	3.000.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		8.000.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	8.000.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		62.860.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	62.860.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		10.000.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	10.000.000,00	
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		410.500.000,00	
0102	Kesehatan		40.882.000,00	
0102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		13.970.000,00	
0102.16.009	Peningkatan kesehatan masyarakat	-	13.970.000,00	
0102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		16.472.000,00	
0102.20.002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	-	16.472.000,00	
0102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		10.440.000,00	
0102.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita	-	10.440.000,00	
0104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		297.088.000,00	
0104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		297.088.000,00	
0104.16.007	Pembangunan jalan lingkungan perumahan	-	297.088.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		72.530.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		72.530.000,00	
0105.15.002	Pembangunan pos jaga/ronda	-	60.000.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	12.530.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		42.297.500,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		42.297.500,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		10.345.000,00	
0207.15.019	Pembinaan, pengembangan dan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan kepariwisataan	-	10.345.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		31.952.500,00	
0207.17.002	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	-	10.055.000,00	
0207.17.013	Pembinaan UKS	-	6.952.500,00	
0207.17.014	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	6.645.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	8.300.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		181.202.495,00	
0405	Pemerintahan Umum		181.202.495,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		80.366.995,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	1.427.500,00	
0405.01.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	-	16.860.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
2	listrik	-	16.860.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	1.000.000,00	
0405.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	1.421.695,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	16.768.400,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	1.650.000,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	1.338.800,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	2.796.800,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	10.000.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	9.780.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	17.323.800,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		20.358.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	5.758.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	5.750.000,00	
0405.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	4.000.000,00	
0405.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	500.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	4.350.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		6.160.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	6.160.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		69.130.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	69.130.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		5.187.500,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	5.187.500,00	
	JUMLAH Kantor Kecamatan Sintang		11.497.357.877,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		36.855.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		36.855.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		36.855.000,00	
0105.15.008	Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	-	30.000.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	6.855.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		32.693.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		32.693.000,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		8.525.000,00	
0207.15.012	Monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin	-	8.525.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		15.643.000,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	8.793.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	6.850.000,00	
0207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		8.525.000,00	
0207.20.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	-	8.525.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		244.767.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		244.767.000,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		102.147.000,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	900.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	3.600.000,00	
0405.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	320.000,00	
0405.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	1.843.489,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	8.886.511,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	9.642.000,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	4.270.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	26.220.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	21.465.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	25.000.000,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		78.000.000,00	
0405.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	35.000.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	13.600.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	15.000.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	4.400.000,00	
0405.02.013	Sewa Gedung Kantor	-	10.000.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		55.475.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	55.475.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		620.000,00	
0405.24.021	Peringatan hari besar nasional dan daerah	-	620.000,00	
0405.26	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah		8.525.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.26.001	Pembinaan perangkat kecamatan	-	8.525.000,00	
	JUMLAH Kantor Kecamatan Bukit Mangat		314.315.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		36.855.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		36.855.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		36.855.000,00	
0105.15.008	Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	-	30.000.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	6.855.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		32.693.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		32.693.000,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		8.525.000,00	
0207.15.014	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin	-	8.525.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		15.643.000,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	8.793.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	6.850.000,00	
0207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		8.525.000,00	
0207.20.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	-	8.525.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		209.767.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		209.767.000,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		102.147.000,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	900.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	3.600.000,00	
0405.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	320.000,00	
0405.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	1.843.489,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	8.886.511,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	9.642.000,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	4.270.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	26.220.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	21.465.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	25.000.000,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		43.000.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	13.600.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	15.000.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	4.400.000,00	
0405.02.013	Sewa Gedung Kantor	-	10.000.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		55.475.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	55.475.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		620.000,00	
0405.24.021	Peringatan hari besar nasional dan daerah	-	620.000,00	
0405.26	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah		8.525.000,00	
0405.26.001	Pembinaan perangkat kecamatan	-	8.525.000,00	

	JUMLAH Kantor Kecamatan Inggar	279.315.000,00	
--	--------------------------------	----------------	--

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		36.855.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		36.855.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		36.855.000,00	
0105.15.008	Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	-	30.000.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	6.855.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		32.693.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		32.693.000,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		8.525.000,00	
0207.15.012	Monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin	-	8.525.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		15.643.000,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	8.793.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	6.850.000,00	
0207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		8.525.000,00	
0207.20.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	-	8.525.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		244.767.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		244.767.000,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		102.147.000,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	900.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	3.600.000,00	
0405.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	320.000,00	
0405.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	1.843.489,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	8.886.511,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	9.642.000,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	4.270.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	26.220.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	21.465.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	25.000.000,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		78.000.000,00	
0405.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	35.000.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	13.600.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	15.000.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	4.400.000,00	
0405.02.013	Sewa Gedung Kantor	-	10.000.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		55.475.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	55.475.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		620.000,00	
0405.24.021	Peringatan hari besar nasional dan daerah	-	620.000,00	
0405.26	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah		8.525.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.26.001	Pembinaan perangkat kecamatan	-	8.525.000,00	
	JUMLAH Kantor Kecamatan Tontang		314.315.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		36.855.000,00	
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		36.855.000,00	
0105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		36.855.000,00	
0105.15.008	Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	-	30.000.000,00	
0105.15.011	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	-	6.855.000,00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		32.693.000,00	
0207	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		32.693.000,00	
0207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		8.525.000,00	
0207.15.012	Monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin	-	8.525.000,00	
0207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		15.643.000,00	
0207.17.006	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	-	8.793.000,00	
0207.17.019	Optimalisasi pengelolaan PBB	-	6.850.000,00	
0207.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		8.525.000,00	
0207.20.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	-	8.525.000,00	
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		244.767.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		244.767.000,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		102.147.000,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	900.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	3.600.000,00	
0405.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	320.000,00	
0405.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	1.843.489,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	8.886.511,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	9.642.000,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	4.270.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	26.220.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	21.465.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	25.000.000,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		78.000.000,00	
0405.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	35.000.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	13.600.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	15.000.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	4.400.000,00	
0405.02.013	Sewa Gedung Kantor	-	10.000.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		55.475.000,00	
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	55.475.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		620.000,00	
0405.24.021	Peringatan hari besar nasional dan daerah	-	620.000,00	
0405.26	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah		8.525.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.26.001	Pembinaan perangkat kecamatan	-	8.525.000,00	
	JUMLAH Kantor Kecamatan Sintang Barat		314.315.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
04	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		2.000.000.000,00	
0401	Perencanaan		990.610.600,00	
0401.16	Program Kerjasama Pembangunan		65.520.500,00	
0401.16.012	Koordinasi kerjasama kawasan perbatasan	-	65.520.500,00	
0401.17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		925.090.100,00	
0401.17.006	Inventarisasi potensi kawasan perbatasan	-	65.332.800,00	
0401.17.007	Koordinasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan	-	100.280.500,00	
0401.17.008	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan batas negara	-	58.499.000,00	
0401.17.010	Identifikasi infrastruktur kawasan perbatasan	-	68.771.500,00	
0401.17.012	Koordinasi pengelolaan batas negara	-	98.355.800,00	
0401.17.013	Koordinasi pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan	-	98.678.000,00	
0401.17.014	Penyusunan profil kawasan perbatasan	-	103.502.500,00	
0401.17.015	Penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perbatasan	-	200.000.000,00	
0401.17.016	Monitoring dan evaluasi pengelolaan infrastruktur, ekonomi dan kesra kawasan perbatasan	-	68.909.000,00	
0401.17.017	Monitoring dan evaluasi pengembangan potensi kawasan perbatasan	-	62.761.000,00	
0405	Pemerintahan Umum		1.009.389.400,00	
0405.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		620.998.900,00	
0405.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	-	1.950.000,00	
0405.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	86.400.000,00	
0405.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	41.000.000,00	
0405.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	-	30.128.400,00	
0405.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	6.373.400,00	
0405.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	4.479.000,00	
0405.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	-	13.110.000,00	
0405.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	158.380.000,00	
0405.01.019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	-	70.730.000,00	
0405.01.020	Penyediaan tenaga kontrak	-	146.990.400,00	
0405.01.021	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	-	54.000.000,00	
0405.01.022	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	-	7.457.700,00	
0405.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		252.500.000,00	
0405.02.010	Pengadaan mebeleur	-	56.000.000,00	
0405.02.011	Pengadaan perangkat komputer dan printer	-	122.000.000,00	
0405.02.012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	5.500.000,00	
0405.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	60.000.000,00	
0405.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	8.000.000,00	
0405.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	-	1.000.000,00	
0405.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		22.500.000,00	
0405.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	22.500.000,00	
0405.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		64.885.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1		3	4	5
0405.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	64.885.000,00	
0405.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		18.916.500,00	
0405.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	1.686.000,00	
0405.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	2.778.500,00	
0405.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	1.163.500,00	
0405.06.006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	-	1.526.500,00	
0405.06.009	Penyusunan rencana strategis perangkat daerah	-	6.752.500,00	
0405.06.010	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah	-	1.268.500,00	
0405.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	3.741.000,00	
0405.24	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah		29.589.000,00	
0405.24.001	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	5.916.000,00	
0405.24.018	Pameran pembangunan	-	23.673.000,00	
	JUMLAH Badan Pengelola Perbatasan Daerah		2.000.000.000,00	
	JUMLAH		731.532.166.991,00	